



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 130/157/Wk-Pyk-2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar**

Payakumbuh, 16 Februari 2023

Kepada Yth :

1. **Menteri PAN & RB RI**
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Kepala Bappenas RI

di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh (LKjIP) Tahun 2022	1 (satu) Dokumen	Terlampir
2.	Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023	1 (satu) Dokumen	Terlampir

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si



**PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH**

LKIP





**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR




Puji syukur dan ucapan Alhamdulillah, atas kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dirampungkan. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini secara substantif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanah atau mandat yang diterima.

Materi laporan antara lain menguraikan capaian sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukurannya. Tahun 2022 ini merupakan Tahun Kelima dari pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, dan untuk masing-masing indikator telah ditetapkan target yang akan dicapai dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Februari 2023
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (**Clean and Good Governance**) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan berorientasi kepada hasil (**Result Oriented Government**), sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini memuat Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi internal sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 Misi, 9 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun Kelima (tahun 2022) periode perencanaan 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

Misi I terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 100% kategori sangat baik (lebih dari 90% s/d 100%).

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

Misi II terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran atau 100% kategori sangat baik (lebih dari 90% s/d 100%).

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

Misi III terdapat 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 100 % kategori sangat baik (lebih dari 90% s/d 100%).

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

Misi IV terdapat 2 sasaran dan 4 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 100% kategori Sangat Baik (lebih dari 90% s/d 100%).

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi V terdapat 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 100 % kategori Sangat Baik (lebih dari 90% s/d 100%).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, bahwa 11 indikator sasaran atau **100 %** bermakna **Sangat Baik**. Jadi jika di total Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 sebesar

112,95%, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 104,63 %, mengalami **peningkatan** sebesar **8,32%**.

Peningkatan total rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2022 terjadi karena semua indikator Kinerja Sasaran realisasinya tercapai sehingga mempengaruhi hasil capaian rata-rata Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan.

Penyebab dari Peningkatan total rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah karena sudah terkendalinya **Pandemi Covid 19** di Kota Payakumbuh, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan lancar guna menunjang pencapaian target indikator sasaran Pemerintah Kota.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Sejarah Kota Payakumbuh	3
	1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	5
	1.5 Gambaran Umum Kota Payakumbuh	6
	1.6 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	1.7 Sumber Daya Aparatur.....	13
	1.8 Perekonomian	14
	1.9 Sistematika Penulisan	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	19
	2.1 Rencana Strategis	19
	2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2022 Setelah direviu	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
	3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	31
	3.2 Realisasi Anggaran	196
	3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan	197
BAB IV	PENUTUP	206

LAMPIRAN

1. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja Tahun 2022)
3. Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022.

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh.....	7
Tabel 1.2	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh	8
Tabel 1.3	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Payakumbuh Tahun 2022	10
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	11
Tabel 1.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	16
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstanta 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	17
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebelum direviu	24
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Payakumbuh sebelum direviu Tahun 2017-2022	26
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebelum direviu	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022	30
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Sasaran dan Indikator Misi I Tahun 2022	35
Tabel 3.5	Data Capaian Sasaran Misi I Tahun 2022	36
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas	36
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022	37
Tabel 3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022	38
Tabel 3.9	Dimensi Kesehatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022	39
Tabel 3.10	Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022	41

Tabel 3.11	Sarana Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022	44
Tabel 3.12	Sumber Daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022	44
Tabel 3.13	10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022	46
Tabel 3.14	Perkembangan Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh s/d Desember 2022	48
Tabel 3.15	Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022	50
Tabel 3.16	Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022	51
Tabel 3.17	Jumlah Kelas, Rombel, Murid dan Rata-rata per Kelas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022	51
Tabel 3.18	Rasio Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022	52
Tabel 3.19	Dimensi Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022	53
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan	56
Tabel 3.21	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022	56
Tabel 3.22	Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) beserta Kontribusinya (%) di Sumatera Barat Maret 2022	59
Tabel 3.23	Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022	62
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran	71
Tabel 3.25	Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022	72
Tabel 3.26	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2018-2022	73
Tabel 3.27	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	74
Tabel 3.28	Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	75
Tabel 3.29	Sasaran Strategis dan IKU pada Misi II	82
Tabel 3.30	Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1-2	83
Tabel 3.31	Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh (persen)	85
Tabel 3.32	Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh tahun 2017-2021	86
Tabel 3.33	Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Payakumbuh tahun 2018-2022	87

Tabel 3.34	Perkembangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	88
Tabel 3.35	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	89
Tabel 3.36	Prasarana dan Fasilitas pendukung di Pasar Tradisional Ibh	91
Tabel 3.37	Prasarana dan Fasilitas Pasar Pusat pertokoan Kota Payakumbuh	92
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2022	95
Tabel 3.39	Jumlah Teknologi yang Disampaikan oleh Penyuluh Tahun 2018 - 2022	97
Tabel 3.40	Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan tahun 2018-2022	98
Tabel 3.41	Jumlah dan Tipe Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun pada Tahun 2018 - 2022	99
Tabel 3.42	Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	100
Tabel 3.43	Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	100
Tabel 3.44	Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	101
Tabel 3.45	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	102
Tabel 3.46	Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	103
Tabel 3.47	Data Kunjungan Wisatawan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	105
Tabel 3.48	Laporan Pengunjung Hotel/Wisma Tahun 2020-2022 ..	106
Tabel 3.49	Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022	107
Tabel 3.50	Potensi Wisata Kota Payakumbuh Menurut Jenis dan Spesifikasinya	108
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2022	109
Tabel 3.52	Data Perkembangan Industri Tahun 2017-2021 Kota Payakumbuh	113
Tabel 3.53	Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2021	114
Tabel 3.54	Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	118
Tabel 3.55	Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2021	119
Tabel 3.56	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2022	122
Tabel 3.57	Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh	124

Tabel 3.58	Capaian Realisasi Investasi tahun 2018-2022 dibandingkan akumulasi 5 tahun RPJMD Perubahan 2017-2022	125
Tabel 3.59	Perkembangan Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022	126
Tabel 3.60	Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan Tahun 2022	127
Tabel 3.61	Jumlah Realisasi Investasi di Kota Payakumbuh tahun 2018-2022	128
Tabel 3.62	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2021	128
Tabel 3.63	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Aplikasi OSS RBA 2022	129
Tabel 3.64	Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH	135
Tabel 3.65	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	136
Tabel 3.66	Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	137
Tabel 3.67	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	138
Tabel 3.68	Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	139
Tabel 3.69	Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	140
Tabel 3.70	Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	141
Tabel 3.71	Sasaran dan Indikator Misi 4 Tahun 2022	148
Tabel 3.72	Data Capaian Indikator Sasaran Misi 4 Tahun 2022	148
Tabel 3.73	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan	149
Tabel 3.74	Kategori Nilai Indeks SPBE	162
Tabel 3.75	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022	163
Tabel 3.76	Daftar Langkah Strategis Pelaksanaan SPBE dalam Perspektif Komponen SPBE	168
Tabel 3.77	Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022	174
Tabel 3.78	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2022	174
Tabel 3.79	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	181
Tabel 3.80	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada 22 UKPP yang ada di Kota Payakumbuh	182
Tabel 3.81	Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022	183
Tabel 3.82	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	185

Tabel 3.83	Capaian Kinerja Indikator Persentase peningkatan zakat/wakaf, yang dikumpulkan melalui Lembaga/Badan Zakat/Wakaf Tahun 2022 s/d 2023 ..	191
Tabel 3.84	Target pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	192
Tabel 3.85	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	196

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Tahun 2022	9
Grafik 1.2	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2022	10
Grafik 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan ..	13
Grafik 1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan	14
Grafik 3.1	Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	42
Grafik 3.2	Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2018-2022	43
Grafik 3.3	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021	46
Grafik 3.4	Jenis Pekerjaan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2022	60
Grafik 3.5	Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)	62
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	72
Grafik 3.7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Payakumbuh Tahun 2021	75
Grafik 3.8	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Payakumbuh Tahun 2021	76
Grafik 3.9	Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2021	77
Grafik 3.10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2021	77
Grafik 3.11	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022	90
Grafik 3.12	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2018-2022	94
Grafik 3.13	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022	106
Grafik 3.14	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	111
Grafik 3.15	Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan pada Tahun 2022	127

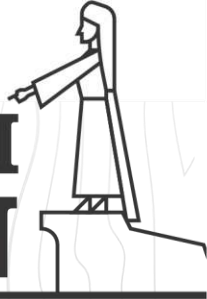
DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Jembatan Ratapan Ibu	5
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Payakumbuh	7
Gambar 3.1	Puskesmas Padang Karambia di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	49
Gambar 3.2	Data Vaksinasi Kota Payakumbuh Tahun 2022	49
Gambar 3.3	Pemasangan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	63
Gambar 3.4	Penyerahan Tanki Septic individu kepada masyarakat penerima sasaran	64
Gambar 3.5	Penyerahan Bantuan DTU 2% Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	65
Gambar 3.6	Penyerahan Bantuan Kepada Anak Disabilitas	66
Gambar 3.7	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Lulusan BLK	66
Gambar 3.8	Pelatihan Kewirausahaan Digitalisasi Oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2022	68
Gambar 3.9	Misi pada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022	83
Gambar 3.10	Fasilitas Perdagangan Antar Daerah dan antar Negara	94
Gambar 3.11	Kawasan Olahraga Payakumbuh Bugar	107
Gambar 3.12	Prasarana olahraga Payakumbuh Bugar	107
Gambar 3.13	Stadion Mini	108
Gambar 3.14	Sentra Makanan Ringan dan Kampung Rendang Kota Payakumbuh	112
Gambar 3.15	Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh	117
Gambar 3.16	Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi Sentra IKM Kota Payakumbuh	117
Gambar 3.17	Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh ...	117
Gambar 3.18	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh	120
Gambar 3.19	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD	121
Gambar 3.20	Gambar 3.20 Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2021 dan Tahun 2022	129
Gambar 3.21	Pelaksanaan bimbingan teknis pengurusan NIB tahun 2022	130
Gambar 3.22	Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional ...	131

Gambar 3.23 SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang)	134
Gambar 3.24 Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2022	144
Gambar 3.25 Pembahasan Keselarasan Antara Sasaran Strategis, Program Dan Kegiatan dalam Penyusunan RKPD	153
Gambar 3.26 Pelaksanaan Dialog Kinerja	154
Gambar 3.27 Penyerahan Reward Perangkat Daerah dan ASN Terinovator	155
Gambar 3.28 Pelatihan Peningkatan Kapasitas APIP	158
Gambar 3.29 Bimtek Penguatan SAKIP Kota Payakumbuh	159
Gambar 3.30 Kategori Pengembangan SPBE Kota Payakumbuh	166
Gambar 3.31 Meta Model Komponen Penyusun SPBE Kota Payakumbuh	166
Gambar 3.32 Keterpaduan Unsur SPBE Kota Payakumbuh	167
Gambar 3.33 Keterkaitan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI)	167
Gambar 3.34 Tampilan Aplikasi MY KOPAY	171
Gambar 3.35 Layanan POCADI, Posko UPP Satgas Saber Pungli dan Konter LKPM di MPP Kota Payakumbuh	176
Gambar 3.36 Tampilan Aplikasi Silakeh SMART & SiPaduko	177
Gambar 3.37 Tampilan Aplikasi Sitarang, Gistaru, SIMBG, KRK Online	179
Gambar 3.38 Penyerahan Piagam Opini WTP Tahun 2022 kepada Pj. Walikota Payakumbuh oleh Gubernur Sumatera Barat	186
Gambar 3.39 Tampilan Website Baznas Kota Payakumbuh	194
Gambar 3.40 Informasi Penerimaan Zakat secara non tunai	194
Gambar 3.41 Penerimaan Zakat Profesi Dari Muzakki Yang Diterima Oleh Staff BAZNAS Kota Payakumbuh	195

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbagai upaya dilakukan salah satu adalah fokus pada peningkatan capaian pada Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan, dimana salah satunya adalah akuntabilitas kinerja. Terkait dengan itu maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya secara rinci dan sistematis. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja tersebut berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Sasaran Strategis yang jelas dengan Indikator Kinerja yang SMART merupakan parameter keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan, demi menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Kota Payakumbuh menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Selanjutnya sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk melaporkan tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun budaya kerja yang dimulai dari pimpinan sampai kepada level staf untuk mencapai Visi, Misi Pemerintah Kota Payakumbuh. Sehingga tujuan mewujudkan masyarakat Kota Payakumbuh yang Maju, Sejahtera, Bermartabat akan tercapai dengan baik. Terakhir tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menyampaikan informasi tentang upaya-upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan perampingan-perampingan program dan kegiatan, sehingga akan terwujud efisiensi anggaran yang akan mengarah pada perampingan struktur organisasi pada kelembagaan Pemerintah Daerah.

Perlu juga dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini kami informasikan bahwa dalam tahun ini terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran yang mempengaruhi penurunan target kinerja pada sasaran dan indikator kinerja tertentu.

1.3 SEJARAH KOTA PAYAKUMBUH

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, dimana berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya

Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan peraturan tersebut Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember ditetapkan menjadi hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, berubah menjadi Kota Payakumbuh. Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah.

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik. Pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.



Gambar 1.1 Jembatan Ratapan Ibu

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta Peraturan Daerah terkait dengan Dokumen Perencanaan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Payakumbuh Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
9. Dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

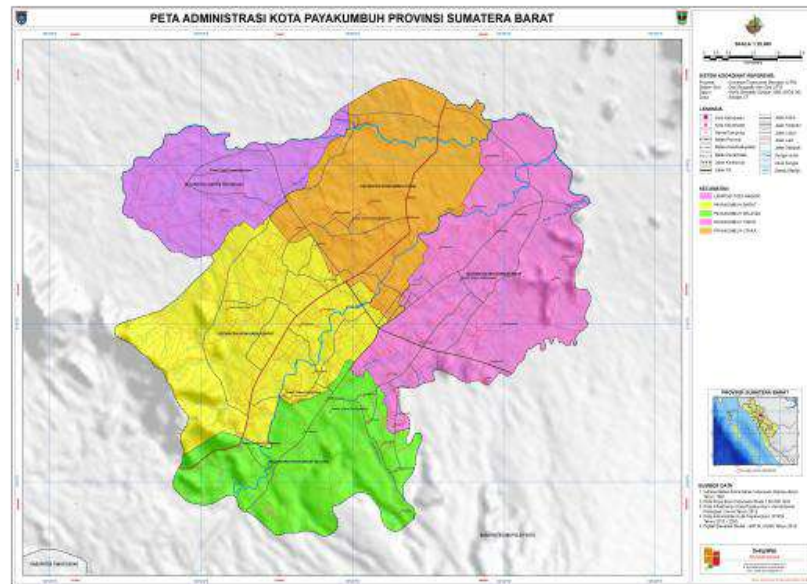
1.5 GAMBARAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota payakumbuh terletak antara 00°10' - 00°17' Lintang Selatan dan antara 100°35' sampai dengan 100°45' Bujur Timur dengan luas wilayah 80,43 Km². Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian ±514 m di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Payakumbuh berada pada rentang 450m-750m.

Pada posisi geografisnya, Kota Payakumbuh berbatasan dengan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Payakumbuh

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 80,43 km² yang setara dengan 0,19% dari luas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 Kecamatan menjadi 5 Kecamatan, dimana pada tanggal 23 Desember 2008 peresmian Kecamatan Payakumbuh Selatan dan pada tanggal 24 Desember 2008 peresmian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Pembagian wilayah administratif seperti pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	23,71
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	18,06
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	28,26
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aua Kuning	14,68	18,25
5	Lamposi Tigo Nagari	Sungai Durian	9,43	11,72
Total			80,43	100,00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2022

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas 22,73 km² atau 28,26 persen, sementara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah yang paling kecil yaitu seluas 9,43 km² atau 11,72 persen.

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 21°-32° celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63% sampai dengan 85%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 1.797 mm sampai dengan jumlah hari hujan 118 hari setahun. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan November sampai Mei dan musim kemarau pada bulan Juni sampai Oktober.

Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dilihat lebih rinci pada tabel 1. 2 dibawah ini :

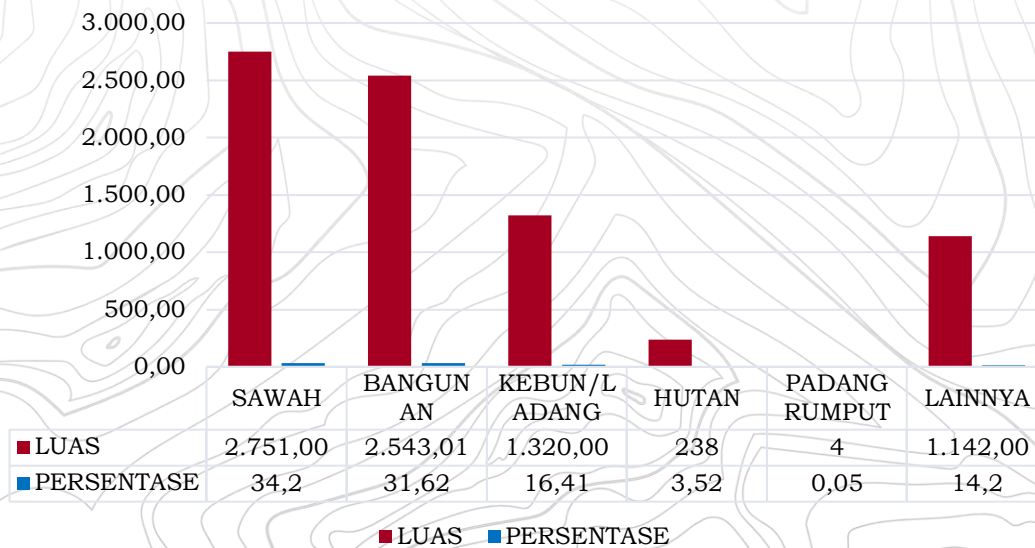
Tabel 1.2
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Sawah	2.751,00	34,20
2	Tanah untuk bangunan dan sekitarnya	2.543,01	31,62
3	Kebun/ladang	1.320,00	16,41
4	Kolam/tebat	-	-
5	Ditanami pohon (hutan rakyat)	283,00	3,52
6	Pengembalaan/Padang rumput	4,00	0,05
7	Lainnya	1142,00	14,20
Jumlah		8.043,00	100.00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2022

Bila dilihat dari segi penggunaan tanah di Kota Payakumbuh, bagian terbesar yaitu 34,20% atau 2.751,00 Ha digunakan untuk sawah. Selanjutnya luas Tanah untuk bangunan dan sekitarnya sebesar 2.543,01 Ha atau 31,62%, sedangkan luas lahan yang paling kecil persentasenya yaitu padang rumput sebesar 0,05%. Pertumbuhan penduduk yang semakin dinamis menjadi alibi perubahan ini. Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dilihat lebih rinci pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya Di Tahun 2022



3. Aspek Demografis

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Data ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur ruang daerah. Selain itu, informasi mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak/retribusi di masa yang akan datang.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diketahui jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 141.813 jiwa, yang terdiri dari 71.294 laki-laki dan 70.519 perempuan. Dari data tersebut terlihat penyebaran penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Payakumbuh Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

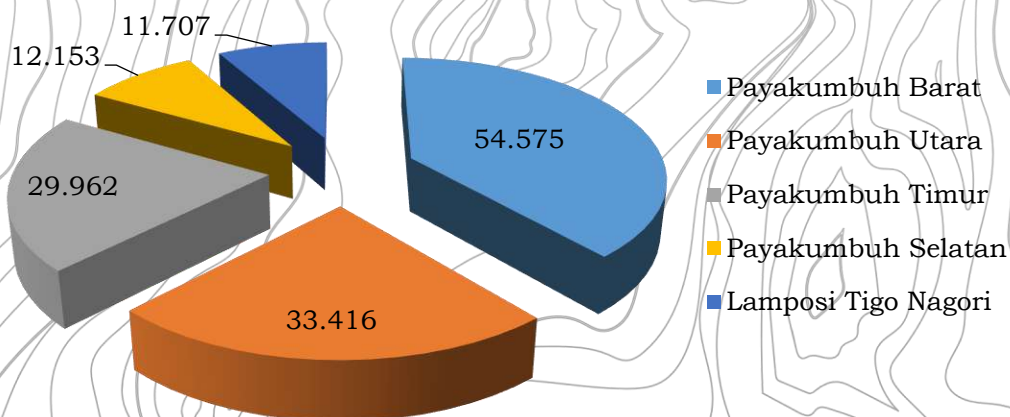
Tabel 1.3
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km.2)	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kepadatan Penduduk Tahun 2022
1	Payakumbuh Barat	19,06	52.499	53.232	54.260	54.614	54.575	2.863
2	Payakumbuh Utara	14,53	31.883	32.329	33.160	33.237	33.416	2.300
3	Payakumbuh Timur	22,73	28.274	28.670	29.305	29.668	29.962	1.318
4	Lamposi Tigo Nagari	9,43	10.015	10.155	11.516	11.662	11.707	1.241
5	Payakumbuh Selatan	14,68	11.032	11.187	11.960	12.030	12.153	828
	Kota Payakumbuh	80,43	133.703	135.573	140.201	141.171	141.813	1.763

Sumber : Data Agregat BAK Semester I Dukcapil Tahun 2022*

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan lain sebagainya.

Grafik 1.2
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2022



Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Kota Payakumbuh tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.863 jiwa/km. Sedangkan

kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan kepadatan penduduk 828 jiwa/km.

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
1	Payakumbuh Barat	27.365	38,38	27.210	38,59	54.575	38,48
2	Payakumbuh Utara	16.777	23,53	16.639	23,60	33.416	23,56
3	Payakumbuh Timur	15.153	21,25	14.809	20,00	29.962	21,13
4	Lamposi Tigo Nagori	5.887	8,26	5.820	8,25	11.707	8,26
5	Payakumbuh Selatan	6.112	8,57	6.041	8,57	12.153	8,57
	Jumlah	71.294	100	70.519	100	141.813	100

Sumber : Data Agregat BAK Semester I Dukcapil Kota Payakumbuh Tahun 2022*

1.6 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka disusunlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat

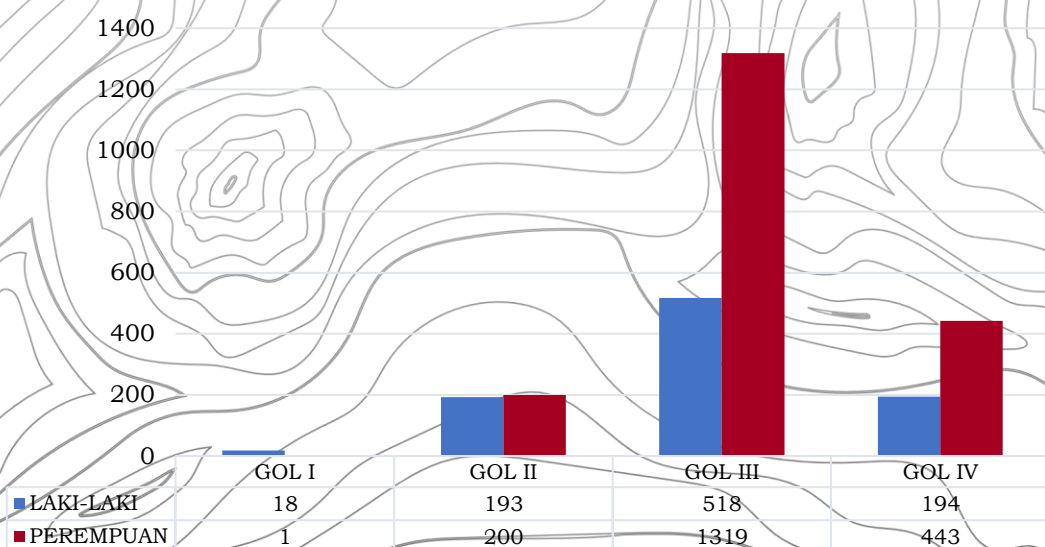
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh :
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian PBJ dan Dalbang
 - Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Protokoler dan Dokumentasi
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
 - d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
- a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
3. Inspektorat
4. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Badan Keuangan Daerah
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Daerah, terdiri dari :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
 - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - g. Dinas Koperasi dan UKM
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Pertanian
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Pendidikan
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - q. Dinas Sosial
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. 5 (lima) Kecamatan dan 47 Kelurahan terdiri dari :
- a. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 17 kelurahan
 - b. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 9 kelurahan
 - c. Kecamatan Payakumbuh Timur 9 kelurahan
 - d. Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri 6 kelurahan
 - e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terdiri dari 6 kelurahan.

1.7 SUMBER DAYA APARATUR

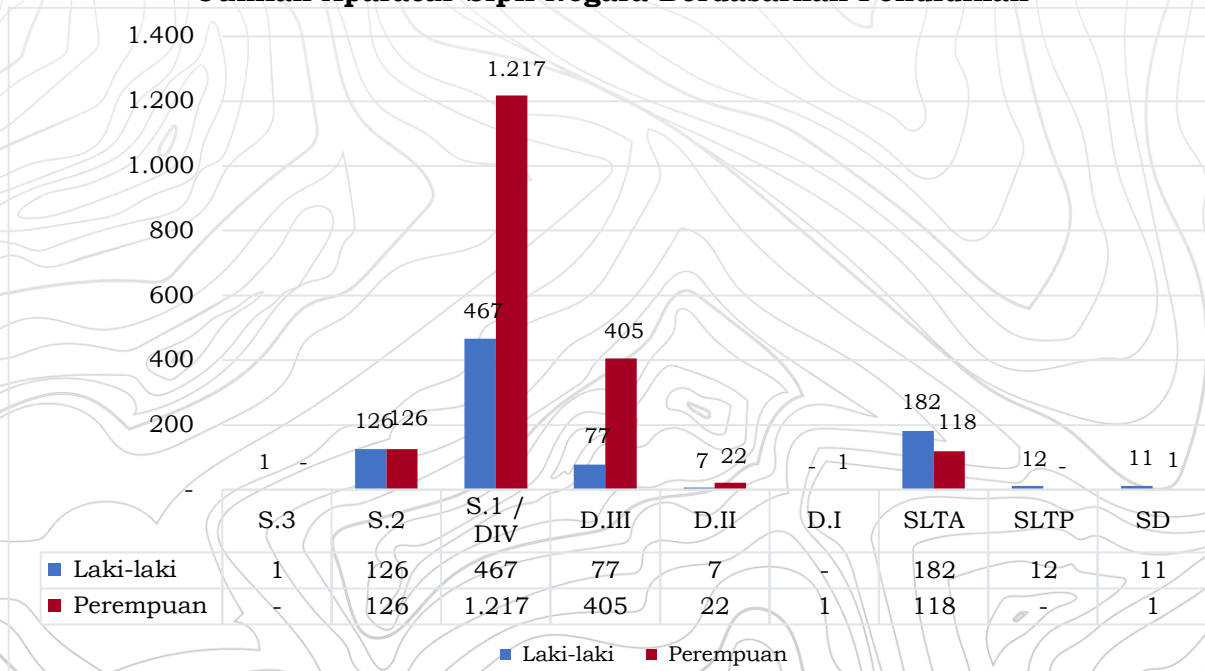
Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2022 berjumlah 2.773 orang, terdiri dari 1.890 orang perempuan dan 883 orang laki-laki, sebagaimana data grafis berikut ini :

Grafik 1. 3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan



Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, Tahun 2022

Grafik 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, tahun 2022

1.8 PEREKONOMIAN

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 7,291 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 0,467 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 6,824 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh mulai sudah bergeraknya kegiatan produksi hampir di seluruh lapangan usaha dan inflasi yang rendah.

Pembentukan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2021 kontribusi terbesar adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 24,01 persen di (angka ini turun dari 24,48 persen tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,61 persen (meningkat dari 13,50 persen di tahun 2017), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,89 persen (turun dari 12,52 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,42 persen (meningkat dari 7,15 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing- masing 7,78 persen dan 6,07 persen. Peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6,00 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Payakumbuh tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4,57 triliun rupiah. Nilai tersebut naik dari 4,41 triliun rupiah pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya data distribusi PDRB Kota Payakumbuh atas harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh
Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7,04	6,75	6,35	6,43	6,07
2	Pertambangan & Penggalian	0,58	0,56	0,52	0,52	0,51
3	Industri Pengolahan	5,26	5,13	4,80	4,86	5,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
6	Konstruksi	13,50	13,57	13,76	13,67	13,61
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda motor	24,48	25,15	25,13	24,53	24,01
8	Transportasi dan Pergudangan	12,52	12,50	12,61	11,72	11,89
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,13	3,23	3,34	3,03	3,11
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,32	7,56	8,25	8,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,28	5,98	5,72	5,91	6,17
12	Real Estate	2,92	2,83	2,81	2,9	2,86
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,11	6,89	7,00	7,58	7,78
15	Jasa Pendidikan	4,51	4,52	4,64	4,94	4,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,43	1,47	1,53	1,64
17	Jasa Lainnya	3,51	3,59	3,74	3,49	3,46
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Buku Perkembangan Produksi Daerah Bidang Ekonomi Semester I, Tahun 2022

b. Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2017-2021 yang cenderung melemah, perekonomian Kota Payakumbuh periode 2017- 2021 masih dapat tetap tumbuh di atas perekonomian nasional, yakni sebesar 6,12; 6,02; 5,89; -1,65 dan 3,58 persen. Selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 3,58 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya -1,65 persen Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,58 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang -1,65 persen (Tabel 1.6). Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 42,78 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 51,64 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstanta
2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,79	0,26	(0,19)	1,49	1,64
2	Pertambangan dan Penggalian	2,96	3,63	0,17	(2,09)	4,04
3	Industri Pengolahan	0,80	4,54	2,84	(3,21)	2,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,91	4,07	2,44	(6,22)	2,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	1,28	2,39	(1,65)	3,32
6	Konstruksi	8,30	7,39	6,86	(5,95)	1,37
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	6,89	7,10	6,72	(1,02)	3,58
8	Transportasi dan Pergudangan	4,40	6,75	6,86	(9,40)	5,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,59	8,08	8,05	(11,62)	7,01
10	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,93	9,31	10,25	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38	0,92	1,81	1,29	6,17
12	Real Estate	3,85	4,00	5,32	0,19	1,72
13	Jasa Perusahaan	5,89	4,04	4,55	(4,15)	1,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,10	4,69	4,83	(0,48)	0,65
15	Jasa Pendidikan	7,45	7,89	8,25	6,22	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	7,22	7,53	8,87	5,59
17	Jasa Lainnya	9,97	7,81	7,93	(9,95)	4,19
Pertumbuhan PDRB		6,12	6,05	5,92	(1,65)	3,58

Sumber : Buku Perkembangan Produksi Daerah Bidang Ekonomi Semester I, Tahun 2022

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun 2020, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 – 2022, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2020) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh merupakan kerangka pembangunan Kota Payakumbuh untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan di capai oleh Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

VISI:

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih maka visi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Maju : Kondisi dimana pada tahun 2022, Payakumbuh menjadi lebih baik dengan kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek berkelanjutan lingkungan.

Sejahtera : Dimaknai sebagai peningkatan standar hidup masyarakat yang sehat, handal, makmur dan merata yang diindikasikan dengan pendapatan perkapita melampaui rata-rata nasional (non migas)

Bermartabat : Sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita.

Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam segala aktifitas kehidupan dan kegiatannya selalu bertolak dari kesadaran dan ketentuan yang bersumber dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang berdaulat, aman dan tentram.

Semangat Kebersamaan : Menghadirkan kekuatan politik, pemerintahan sosial budaya dan ekonomi dengan sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi serta konsumsi di mana kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Menggunakan model pertumbuhan tinggi yang independen dengan berbasis



produksi secara berkesinambungan untuk mendukung perkembangan UKM yang menjalankan konsep bisnis **One Village One Product (OVOP)**. Upaya agar UKM dapat eksis dan meningkatkan daya saing produk-produk mereka dalam perdagangan pasar nasional maupun pasar internasional, perlu memiliki jejaring dengan sesama UKM sesuai bidang gerakannya dan terus melakukan interaksi positif seperti: berbagi gagasan, dialog terbuka

Menuju Payakumbuh Menang : Kesiapan Payakumbuh untuk menghadapi globalisasi, berbasis kekuatan lokal, untuk menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain untuk menciptakan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Payakumbuh. Menuju Payakumbuh menang diartikan maju dalam ketersediaan infrastruktur, sejahtera secara ekonomi dan SDM yang bermartabat, dengan berbasis potensi lokal yang mempunyai daya saing dengan semangat kebersamaan.

MISI:

Misi Pertama : **Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.**

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas



Misi Kedua : Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh untuk lima tahun ke depan diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian kota Payakumbuh diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Misi Ketiga : Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Misi Keempat : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan efektifitas



dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan, mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur dan menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

Misi Kelima : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah

Penekanan pada akhlak mulia yang berbudaya juga memiliki maksud peningkatan intensitas perhatian terhadap peningkatan peran dan pemberdayaan kelembagaan budaya dalam membentuk akhlak mulia di masyarakat untuk mewujudkan pembangunan.

Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang: ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan lembaga budaya dimasyarakat dapat terlibat lebih aktif lagi dalam membentuk akhlak mulia dalam mewujudkan pembangunan daerah.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran setelah di reviu

VISI Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

“ Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang “

TUJUAN		SASARAN	
MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL, SEHAT DAN KOMPETITIF.			
1	Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas	1	Meningkatnya pembangunan manusia yang berkualitas
		2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
		3	Menurunnya Tingkat Pengangguran
MISI II : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN DENGAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DENGAN MEMUNCULKAN GERAKAN EKONOMI BERSAMA			
2	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		5	Meningkatnya investasi
MISI III : MENINGKATKAN PENATAAN KOTA, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN			
3	Meningkatkan Keberlanjutan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
MISI IV : MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH			
4	Meningkatnya Penerapan RB	7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan
		8	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah
MISI V : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDAYA BERDASARKAN ADAT BASANDI SYARA' SYARA' BASANDI KITABULLAH			
5	Meningkatnya tata Kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	9	Meningkatnya pengelolaan ZIS

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Setelah Direviu

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia dengan Surat Nomor : B/201/AA.05/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan agar Pemerintah Kota Payakumbuh agar Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas, serta menciptakan harmonisasi perencanaan dan penjabaran kinerja mengacu pada kerangka logis yang telah disusun sampai kelevel individu.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas Pemerintah Kota Payakumbuh telah Melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama setelah direviu untuk tingkat Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Payakumbuh setelah direviu
Tahun 2017-2022

Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Meningkatnya pembangunan manuasia yang berkualitas	1	IPM
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2	Tingkat Kemiskinan
3	Menurunnya tingkat Pengangguran	3	Tingkat Pengangguran
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	4	Laju pertumbuhan ekonomi
5	Meningkatnya investasi	5	Nilai Realisasi Investasi
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	7	Nilai Evaluasi AKIP Kota
		8	Indeks SPBE
		9	Indeks Pelayanan Publik
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	10	Opini LKPD dari BPK
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	11	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022 SETELAH DIREVIU

Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
6. Dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh
Tahun 2022 setelah direviu

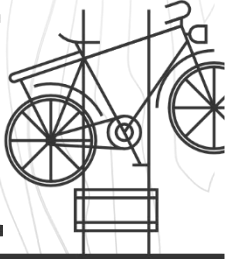
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	SKPD Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang berkualitas	1	IPM	79,52	Bappeda/BPS
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2	Tingkat Kemiskinan	5,64	Bappeda/BPS
3	Menurunnya tingkat pengangguran	3	Tingkat Pengangguran	6,30	Naker Perind/BPS
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,07	Bappeda/BPS
5	Meningkatnya investasi	5	Nilai Realisasi Investasi	203,80	DPM-PTSP



6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,59	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	7	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB (75)	Setdako
		8	Indeks SPBE	2,50	Dinas Kominfo
		9	Indeks Pelayanan Publik	4,51	Setdako
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	10	Opini LKPD dari BPK	WTP	BKD
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	11	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	100,00	Bagian Kesra Setdako

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 752.356.007.312,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Ordinal	Kategori
>90	Sangat Baik
75.00 – 89.99	Baik
65.00 – 74.99	Cukup
50.00 – 64.99	Kurang
0 – 49.99	Sangat Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang kualitas	IPM	Indeks	79,52	79,53	100,01	Sangat Baik
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,64	5,66	99,65	Sangat Baik
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran	Persentase	6,30	5,16	118,10	Sangat Baik

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,07	3,63	118,24	Sangat Baik
5	Meningkatnya investasi	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupaih	203,80	199,70	97,99	Sangat Baik

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai/Indeks	58,59	64,09	109,39	Sangat Baik

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori/ Nilai	BB	BB	100,00	Sangat Baik
		Indeks SPBE	Indeks	2,50	3,02	120,80	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,56	101,10	Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK	Kategori/ Nilai	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	Persentase peningkatan zakat/ wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	Persentase	100,00	177,19	177,19	Sangat Baik

3.1 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 maupun RKPD Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2017-2022 setelah direviu, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Berdasarkan dokumen tersebut ditetapkan 9 (Sembilan) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

Sasaran 1	Meningkatnya Pembangunan manusia yang berkualitas	1 indikator
Sasaran 2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 indikator
Sasaran 3	Menurunnya tingkat pengangguran	1 indikator

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya investasi	1 indikator

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 indikator
-----------	--	-------------

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	3 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 indikator

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Sasaran 1	Meningkatnya Pengelolaan ZIS	1 indikator
-----------	------------------------------	-------------

Secara umum Pemerintah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang kualitas	1	100,01					
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	99,65					
3	Menurunnya tingkat pengangguran	1	118,10					

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	1	118,24					
5	Meningkatnya investasi	1	97,99					

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	109,39					

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	3	107,30					
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	100					

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
9	Meningkatnya Pengelolaan ZIS	1	177,19					

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.

Misi mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif ini dimaksudkan untuk :

- Mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter, memiliki kompetensi dan daya saing melalui pengembangan kualitas pendidikan, pemanfaatan e- informasi dan kemampuan iptek yang maju dan tepat guna;
- Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata;
- Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat;
- Serta dengan menangani masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial.

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas, hal tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni :

1. Meningkatnya pembangunan manusia yang berkualitas
2. Menurunnya tingkat kemiskinan
3. Menurunnya tingkat pengangguran

Untuk masing-masing sasaran strategis memiliki 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Misi I Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1.	Meningkatnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,52	
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,64	
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran	6,30	

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran pada Misi 1 ini diuraikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Data Capaian Sasaran Misi I Tahun 2022

No	Indikator	Capaian tahun 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Th 2022 thdp RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,08	79,52	79,53	100,01	Sangat Baik	79,52	100,01
2	Tingkat Kemiskinan	6,16	5,64	5,66	99,65	Sangat Baik	5,64	99,65
3	Tingkat Pengangguran	6,47	6,30	5,16	118,10	Sangat Baik	6,30	118,10

Sumber : BPS, 2022 (Target Akhir RPJMD mengacu kepada target thn 2022 pada perwako nomor 3 tahun 2022 tentang RPD)

Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, “Meningkatnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas” menjadi salah satu sasaran dalam rangka mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif di Kota Payakumbuh. Tolak ukur atau indikator sasaran yang digunakan adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pembangunan manusia yang berkualitas tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

No	Indikator	Capaian tahun 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Th 2022 thdp RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	79,08	79,52	79,53	100,01	Sangat baik	79,52	100,01

Sumber : BPS, 2023 Target Akhir RPJMD mengacu kepada target thn-2022 pada perwako nomor 3 tahun 2022 tentang RPD)

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi IPM Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar 79,53 dari nilai yang ditargetkan sebesar

79,52 atau tercapai sebesar 100,01% dengan kategori sangat baik. Capaian pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 79,08 atau naik 0,45 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2022 adalah sebesar 100,01%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menggambarkan peningkatan kualitas pembangunan manusia pada suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan juga untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara masuk kedalam kelompok negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19
Kab. Pesisir selatan	69,40	70,08	69,90	70,03	70,84
Kab. Solok	68,60	69,08	69,08	69,24	70,02
Kab. Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68,69
Kab. Tanah datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29
Kab. Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63
Kab. Agam	71,70	72,37	72,46	72,57	73,29
Kab. Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28
Kab. Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77	67,41
Kab. Solok selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71
Kab. Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30
Kab. Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57
Kota Padang	82,25	82,68	82,82	82,90	83,29
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41	79,23
Kota Sawahlunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73
Kota Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97	78,78

Kota Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42
Kota Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08	79,53
Kota Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07	77,65
SUMBAR	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
INDONESIA	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Payakumbuh lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh 79,53 sedangkan rata-rata provinsi 73,26 dan Indonesia 72,91. Pada Tahun 2022 untuk tingkat provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ketiga setelah Kota Padang (83,29) dan Kota Bukittinggi (81,42).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk dari rata-rata ukuran pencapaian 3 (tiga) dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (bps.go.id, 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh berdasarkan dimensi pembentuknya dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh
Tahun 2018 - 2022

No	Dimensi / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kesehatan						
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,33	73,61	73,74	73,84	74,14
Pendidikan						
2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,46	10,72	10,73	10,81	10,82
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,24	14,25	14,26	14,27	14,29

	Ekonomi					
4	Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687
	IPM	77,91	78,23	78,95	78,90	79,53

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa nilai IPM Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d. 2022 secara umum mengalami peningkatan, dimana IPM Kota Payakumbuh Tahun 2020 sebesar 78,95 sedangkan tahun 2021 turun menjadi 78,90 atau turun sebesar 0,05 poin. Sedangkan untuk Tahun 2022 IPM Kota Payakumbuh naik menjadi 79,53. Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM Tahun 2022, secara umum juga mengalami kenaikan, baik Angka Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran riil perkapita. Capaian dimensi pembentuk IPM, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan pembentuk IPM digunakan indikator angka usia harapan hidup. Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Dimensi Kesehatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

No	Dimensi / Indikator IPM	2018	2019	2020	2021	2022
	Kesehatan					
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,33	73,61	73,74	73,84	74,14

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh sebesar 74,14 tahun lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 73,84 tahun.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah. Umur yang panjang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari faktor mendasar seperti jenis kelamin, ras, kondisi medis seseorang, dan riwayat kesehatan keluarga, hingga ditentukan oleh lingkungan, keadaan sosial dan psikis, juga ekonomi.

Faktor-faktor seperti lingkungan, sosial-ekonomi, dan demografi lah yang membuat suatu populasi penduduk di suatu negara dapat hidup lebih lama dibandingkan populasi di negara lain, hal itu tercermin dari suatu penghitungan statistika bernama Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*) yang biasa diukur dalam satu negara dan dibandingkan dengan negara lain.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya usia harapan hidup juga membuat jumlah orang lanjut usia (lansia) semakin banyak. Hal ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Bertambahnya jumlah lansia bisa berdampak positif jika lansia dalam keadaan sehat. Namun jika dalam keadaan sakit, maka potensi kerugian negara dari pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan meningkat. Jumlah kepesertaan JKN Kota Payakumbuh tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

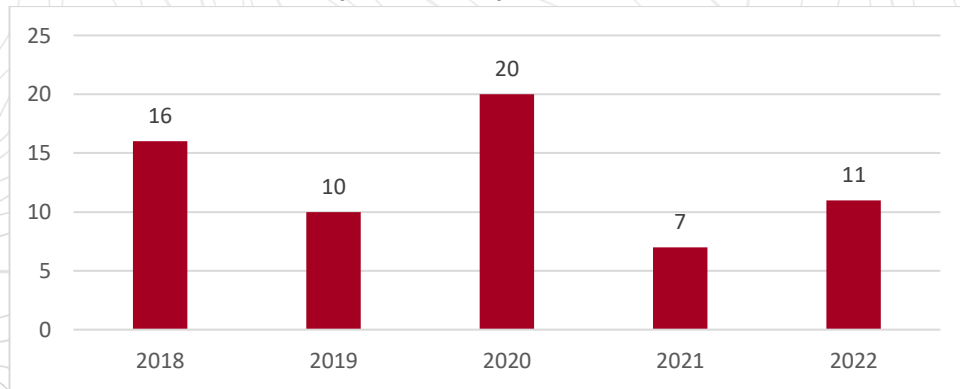
No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertaan JKN	Persentase
1	2018	133.703	120.062	89,80
2	2019	135.573	121.131	89,30
3	2020	137.487	124.128	90,28
4	2021	141.147	129.584	91,80
5	2022	141.813	137.077	96,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri. Terjadi kenaikan jumlah kepesertaan JKN pada tahun 2022 hingga mencapai 96,66%. Kepesertaan ini meningkat karena di Kota Payakumbuh selalu dilakukan validasi dan pengusulan kepesertaan setiap bulannya melalui Dinas Sosial, yang kemudian di teruskan melalui Dinas Kesehatan untuk masuk dalam program Jaminan Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC) di Kota Payakumbuh.

Salah satu indikator utama kesehatan daerah yang juga menjadi bahan analisis dalam menilai perkembangan kesehatan di suatu daerah adalah Indikator Angka Kematian Bayi. Indikator ini merupakan indikator yang amat penting dalam menilai status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Terkait dengan indikator ini di Kota Payakumbuh, dapat digambarkan sebagaimana Grafik 3.1.

Grafik. 3.1
Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

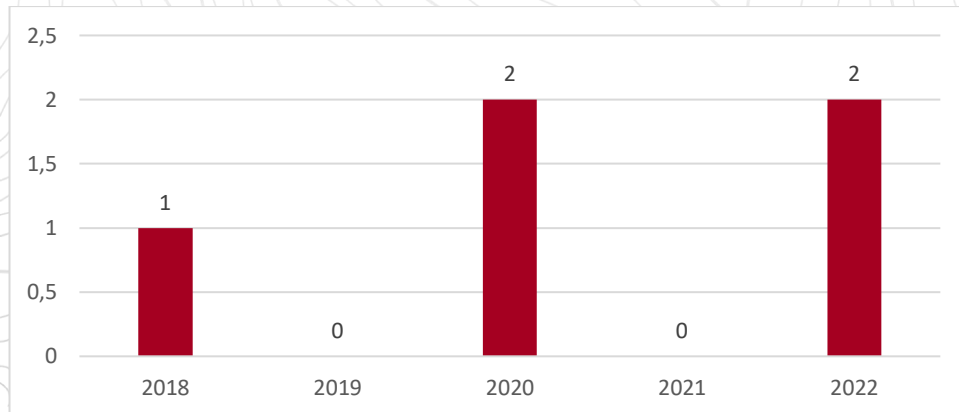


Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

Perkembangan indikator Angka Kematian Bayi di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi. Ada beberapa faktor penentu yang menyebabkan terjadinya kematian bayi yang sebagian besar terjadi karena faktor penjaagaan kondisi tubuh ibu hamil pada masa kehamilan. Hal ini terpengaruh juga akibat proses rujukan yang masih perlu dibenahi mulai dari tingkat keluarga yang terlambat memeriksakan secara dini ke pusat layanan kesehatan, kondisi cacat bawaan pada bayi, seperti kelainan pernafasan dan jantung, dan perawatan ibu semasa kehamilan serta kondisi gizi ibu hamil sehingga menyebabkan berat badan lahir rendah yang rentan terhadap resiko kematian bayi pasca persalinan.

Selanjutnya dengan indikator lain yang juga sangat penting, yakni Angka Kematian Ibu Melahirkan. Untuk indikator ini dapat dijabarkan untuk tingkat Kabupaten/Kota berupa Kasus Kematian Ibu melahirkan (angka absolut), Gambaran perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada grafik 3.2.

Grafik. 3.2
Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2018 – 2022



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

Kasus kematian Ibu melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setiap kasus kematian ibu selalu dilaksanakan Autopsi Verbal. Tahun 2018 - 2022 kasus kematian ibu melahirkan umumnya disebabkan karena eklamsia (tekanan darah tinggi) selama proses persalinan dan komplikasi infeksi (TBC). Pada tahun 2018 terdapat 1 Kasus dan Tahun 2019 tidak ada kasus dan pada Tahun 2020 terdapat 2 kasus. Sementara untuk tahun 2021, juga tidak ada kasus dan pada Tahun 2022 terdapat 2 kasus kematian Ibu melahirkan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka penurunan kasus kematian Ibu melahirkan ini perlu ditingkatkan lagi kemampuan dalam pelayanan *Antenatal Care* (ANC) yang berkualitas sebab kasus-kasus kematian Ibu dapat dideteksi dari resiko tinggi kehamilannya sejak dini melalui ANC.

Usia Harapan Hidup juga berhubungan dengan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Tahun 2022, sarana kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Sarana Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	4
2	Puskesmas	8
3	Balai Pengobatan	3
4	Klinik Bersalin	1
5	Puskesmas Pembantu	23
6	Poskeskel	14
7	Puskesmas Keliling	18
8	Posbindu	77
9	Posyandu	165
10	Dokter Praktek	82
11	Bidan Praktek	32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023



Gambar 3.1. Puskesmas Lampasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh

Sementara untuk Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Sumber Daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

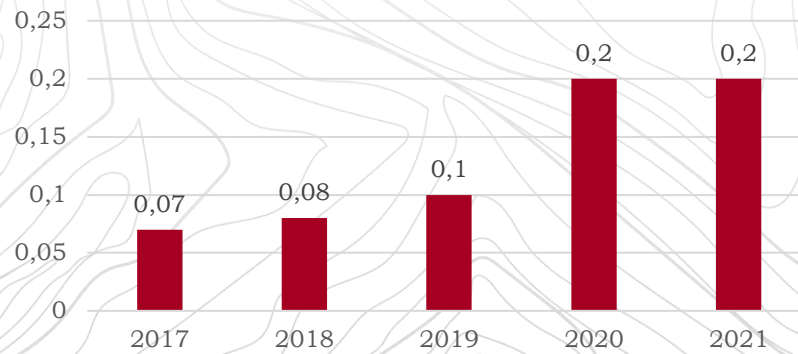
No	Jenis	Jumlah
1	Struktural	36 orang
2	Non Struktural	255 orang
3	Dokter Spesialis	33 orang
4	Dokter Umum	44 orang

5	Dokter Gigi	16 orang
6	Apoteker	24 orang
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	24 orang
8	Sarjana Keperawatan	62 orang
9	Sarjana Non Kesehatan	27 orang
10	Bidan	138 orang
11	Perawat	278 orang
12	Terapis Gigi dan Mulut	18 orang
13	Asisten Apoteker	41 orang
14	Rekam Medis	36 orang
15	Nutrisionis	21 orang
16	Analisis Laboratorium	34 orang
17	Sanitasi lingkungan	18 orang
18	Refraksionis	4 orang
19	Promosi Kesehatan	16 orang
20	Administrator kesehatan	5 orang
21	Radiologi	7 orang
22	Fisioterapi	5 orang
23	Epidemiolog Kesehatan	10 orang
24	Asisten Penata Anestesi	5 orang
25	Penata Anestesi	3 orang
26	Tenaga Keamanan	21 orang
27	Tenaga Kebersihan	35 orang
	Jumlah	1103 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Status gizi balita juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase prevalensi balita kekurangan gizi merupakan cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM) yang diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita yang memiliki berat badan dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS) dibagi dengan jumlah rata-rata balita yang ditimbang di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Grafik. 3.3
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh
Tahun 2017 – 2021



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Defenisi Operasional Balita Kekurangan Gizi adalah gabungan antara presentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang yang diperoleh dari hasil kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita (PSG). PSG ini dilakukan dengan cara penimbangan massal pada balita di setiap posyandu dengan cakupan balita ditimbang (D/S) minimal 80%.

Pada tahun 2021 presentase Balita Gizi Buruk stagnan pada angka 0,2%, namun secara umum prevalensi balita kekurangan gizi di Kota Payakumbuh periode 2017-2021 tidak mengkhawatirkan dan semakin membaik, karena dari pencapaiannya masih jauh di bawah standar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (<15,0%). Walaupun angka kekurangan gizi pada balita masih dibawah SPM harus tetap diwaspadai karena kasus-kasus balita kekurangan ini dapat memicu terjadinya Kurang Energi Protein (KEP) pada Balita yang menyebabkan Marasmus atau Kwashiorkor.

Usia harapan hidup terus membaik bagi sebagian besar orang Indonesia, namun sejumlah penyakit masih menjadi penyebab tingginya angka kematian dini di Indonesia. Berikut perkembangan 10 penyakit terbanyak di Kota Payakumbuh selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.13
10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2018	2019	2020	2021	2022
ISPA	16.247 (1)	16.795 (1)	9.393(2)	6.357 (2)	11.805 (2)
Hipertensi primer	9.523 (2)	12.381 (2)	9.761(1)	12.934(1)	11.360(1)

Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	5.726 (3)	5.252 (3)	1.754(6)	1.410(5)	1.791(7)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	3.042 (6)	3.149 (7)	-	1.391(6)	-
Penyakit kulit Alergi	2.461 (7)	-	-	-	-
Rheumatoid	3.297 (5)	3.167 (6)	-	-	-
Gangguan Refraksi dan Akomodasi	-	-	-	-	-
Diare	2.220 (8)	-	-	-	-
Penyakit saluran pernapasan atas lainnya	-	-	-	-	-
Diabetes	3.603 (4)	4.474 (4)	4.512(3)	4.755(3)	3.826(3)
Gasteritis	-	3.007 (8)	2.917(4)	-	2006 (6)
Dispepsia	2.239 (10)	-	619(9)	-	1605(8)
Cepalgia	2.873(7)	-	-	-	-
Dermatitis	-	3.395 (5)	2.168(5)	1.290(8)	1409(9)
Kelainan Refraksi	-	-	-	-	-
Myalgia	2.534(9)	-	-	-	-
Jantung	-	2.319 (9)	-	-	-
Karies Gigi	-	1.693 (10)	-	-	-
Vulnus	-	-	1606(7)	2.070(4)	3.137(4)
Febris	-	-	573(10)	1.270(7)	1.290(10)
Gout Arthritis	-	-	1148(8)	-	-
Gastroenteritis	-	-	-	-	2.701(5)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Dari Tabel 3.13 dapat terlihat dalam lima tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk rangking pertama dan kedua adalah penyakit Hipertensi dan ISPA. Hipertensi dan ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan. Hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik dalam kehidupan, sementara ISPA terkait pada kualitas udara yang ada disekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebabkan penurunan mutu udara.

Coronavirus Disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-

CoV-2), tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Coronavirus (Infeksi 2020-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah Provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik termasuk di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Payakumbuh secara khusus. Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Payakumbuh sampai dengan Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Perkembangan Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh s/d Desember 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Suspek	0	0	0
2	Kasus Baru	0	0	0
3	Total Kasus Konfirmasi	592	2.111	3.093
4	Sembuh	582	2.068	3.013
5	Isolasi	0	0	0
6	Rawat	0	0	0
7	Meninggal	9	44	60
8	Kontak erat	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Berdasarkan Tabel 3.15, dapat dilihat bahwa jumlah kasus covid-19 yang terkonfirmasi positif dari awal Pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh sampai dengan Desember 2022 sebanyak 3.093 kasus dengan total kesembuhan 3.013 dan meninggal 60 kasus. Secara keseluruhan dari kasus

kematian yang ditimbulkan oleh wabah covid-19 ini dari 3.093 orang yang terkonfirmasi positif dan meninggal 60 orang (1,94%) ini menandakan penanganan yang cukup baik dari pemerintah dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap wabah ini.

Guna menekan perkembangan kasus covid-19 serta membentuk *Herd Immunity*, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan vaksinasi terhadap kelompok sasaran yang telah ditentukan. Data vaksinasi untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini :

SASARAN	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3	VAKSINASI 4
TOTAL SASARAN 124.226	112.891 (90,88%)	97.109 (78,17%)	39.824 (41,67%)	264 (2,04%)
SDM KESEHATAN 1.137	1.556 (136,85%)	1.528 (134,39%)	1.408 (123,83%)	243 (21,37%)
PETUGAS PUBLIK 8.225	6.452 (78,44%)	6.121 (74,42%)	4.213 (51,22%)	0 (0,00%)
LANSIA 11.793	14.027 (118,94%)	11.601 (98,37%)	5.001 (42,41%)	0 (0,00%)
MASY UMUM & RENTAN 74.418	68.385 (91,89%)	59.517 (79,98%)	28.528 (38,43%)	2 (0,00%)
REMAJA (12TH - 17TH) 14.493	14.697 (101,41%)	13.389 (92,38%)	604 (4,17%)	0 (0,00%)
ANAK (6TH - 11TH)	7.774 (54,90%)	4.953 (34,98%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)

Gambar 3.2. Data Vaksinasi Kota Payakumbuh Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 3.2, data sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah sebanyak 124.226 orang. Yang telah mendapatkan vaksin 1 sebesar 90,88%,Vaksin 2 sebesar 78,17% ,vaksin 3 sebesar 41,67 dan vaksin 4 sebesar 2,05%.

b. Dimensi Pendidikan

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mengalami

peningkatan selama lima tahun terakhir dengan data sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

No	Dimensi / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	Pendidikan					
1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,46	10,72	10,73	10,81	10,82
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,24	14,25	14,26	14,27	14,29

Sumber : BPS, 2022

Rata-rata lama sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar 10,82 tahun lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 10,81, sedangkan untuk indikator harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 14,29 tahun, naik dari tahun 2021 sebesar 14,27 tahun atau naik 0,02 poin.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Pendidikan di Kota Payakumbuh tidak hanya berbicara tentang terciptanya sarana, prasarana, ataupun tenaga pengajar saja. Lebih dari itu, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya harus ditanamkan ke pelajar di Kota Payakumbuh. Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Payakumbuh saat ini sudah setingkat SMA, yaitu 10,82 tahun.

Angka ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Misalnya meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru,

pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dan sebagainya.

Tabel 3.16
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan		AKREDITASI		
		A	B	C
Sekolah TK / PAUD Negeri	6	3	3	-
Sekolah SDN/MIN	66	55	11	-
Sekolah SMPN/MTSN	12	10	2	-
Sekolah TK / PAUD Swasta	131	10	71	50
Sekolah SD/MI Swasta	8	6	1	1
Sekolah SMP/MTS Swasta	10	6	-	4
SMAN/SMKN/MAN	7	6	1	-
SMA/SMK/MA Swasta	6	3	2	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2023

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Kota Payakumbuh sebanyak 246 sekolah, dengan jumlah TK/PAUD sebanyak 139 sekolah. SD/MIN sebanyak 74 sekolah, SMP/MTSN sebanyak 22 sekolah dan SMA/SMK/MAN sebanyak 13 sekolah.

Apabila kita melihat sebaran sekolah yang ada di Kota Payakumbuh menurut tingkat pendidikan sudah cukup merata di setiap kecamatan. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal ini dapat menjadi daya ungkit dalam rangka meningkatkan angka Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.17
Jumlah Kelas, Rombel, Murid dan Rata-rata per Kelas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelas	Rombel	Murid	Rata-rata Murid per Kelas
1	Taman Kanak-kanak/RA	234	215	2975	13
	Negeri	17	15	241	14
	Swasta	217	200	2734	13
2	Sekolah Dasar/MI	605	716	17425	25
	Negeri	515	532	12935	25
	Swasta	175	184	4490	25
3	SMP/MTs	389	387	11551	29

	Negeri	256	245	7767	30
	Swasta	133	142	3784	28
4	SMA/SMK/MA	432	481	14107	28
	Negeri	314	372	11972	38
	Swasta	432	109	2135	18

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel 3.17, untuk rata-rata murid per kelas pada tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebanyak 13 murid per kelas, tingkat SD/MI sebanyak 25 murid per kelas, tingkat SMP/MTs sebanyak 29 Murid per kelas dan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 28 murid per kelas. Apabila melihat hal tersebut, untuk tingkat kenyamanan murid dalam menerima pembelajaran di sekolah dapat disebut layak. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.18
Rasio Guru dan Murid menurut
Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Kecamatan	Murid	Guru	Rasio
1	Taman Kanak-kanak/RA	2975	329	9
	Negeri	241	22	11
	Swasta	2734	307	9
2	Sekolah Dasar/MI	17425	1068	16
	Negeri	12935	766	17
	Swasta	4490	302	15
3	SMP/MTs	11551	823	14
	Negeri	7767	482	16
	Swasta	3784	341	11
4	SMA/SMK/MA	14107	1215	12
	Negeri	11972	894	13
	Swasta	2135	321	7

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel diatas, untuk rasio guru dan murid tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebesar 1:9, tingkat SD/MI 1:16, tingkat SMP/MTs sebesar 1:13 dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 1:11. Hal ini menggambarkan bahwa secara kuantitas jumlah guru yang tersebar di sekolah cukup untuk melayani murid yang ada di sekolah Kota Payakumbuh.

c. Dimensi Ekonomi

Indeks Pembangunan ekonomi pada dimensi ekonomi di ukur dengan indikator Pengeluaran riil per kapita disesuaikan atau daya beli. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 13.367 atau naik 50 poin dari tahun 2021. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun) tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Dimensi Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

No	Dimensi / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	Ekonomi					
1	Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	13.114	13.464	13.281	13.317	13.367

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pengeluaran riil per kapita disesuaikan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2018 s.d 2022. Terjadi penurunan pada tahun 2020, dari 13.464 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019 menjadi 13.281 ribu rupiah/orang/tahun atau turun 183 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan menurunnya nilai daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada tahun 2020 akibat dampak terjadinya pandemi covid-19. Untuk tahun 2022, pengeluaran riil per kapita disesuaikan kembali meningkat menjadi 13,617 ribu rupiah/orang/tahun, sejalan dengan makin membaiknya kondisi perekonomian.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Kota Payakumbuh. Sehingga bidang ini mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Untuk Dimensi Kesehatan dan Dimensi Pendidikan, telah didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang cukup dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Sementara untuk Dimensi Ekonomi, masyarakat Kota Payakumbuh selain memiliki mata pencaharian pertanian, juga banyak berusaha alam bidang industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan secara perputaran ekonomi, terus terjadi di Kota Payakumbuh. sehingga dalam Perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah yang cukup baik dalam bidang kesehatan

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
6. Program Kesiediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman
7. Program Pembinaan Perpustakaan
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
12. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
15. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
16. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Permasalahan

- a. Terjadinya kasus pandemi Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia secara umum maupun Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh secara khusus.
- b. Terjadinya pergeseran pola pembangunan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter dan melek Teknologi Informasi untuk menjawab tantangan kehidupan kedepan.
- c. Dalam Dimensi kesehatan terdapat perubahan gaya hidup yang berdampak pada pergeseran jenis penyakit yang sering muncul (dari Penyakit Menular menjadi Penyakit Tidak Menular); hipertensi, diabetes, jantung, TB,dll, disamping penyakit menular masih menjadi permasalahan terutama kasus Covid-19.
- d. Dalam Dimensi Ekonomi, masih belum optimalnya peningkatan produksi yang memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana aksi

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kota Payakumbuh antara lain:

1. Optimaliasai penanganan kasus Covid-19 karena terus mengalami perkembangan dalam bentuk virus dan pola penyebarannya. Dalam rangka pembentukan *herd immunity*, dilakukan program vaksinasi kepada kelompok sasaran yang perlu mendapatkan perlindungan.
2. Optimalisasi pelaksanaan program sekolah dan guru penggerak serta kurikulum merdeka untuk memperkuat pembangunan karakter peserta didik dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular antara lain melalui peningkatan promosi kesehatan dengan lebih menekankan kepada kegiatan preventif dan promotif.
4. Peningkatan program peningkatan kapasitas kepada Industri dan UMKM yang dapat memberikan nilai tambah dan hasil produksi.

Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di dunia dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang sangat penting saat ini, sehingga menjadi fokus bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangannya untuk membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan

Indikator kinerja untuk sasaran menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh adalah angka kemiskinan. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 sebesar 99,65% dengan kategori **sangat baik**.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator	Capaian tahun 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Th 2022 thd RPJMD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
2	Tingkat Kemiskinan	6,16	5,64	5,66	99,65	Sangat Baik	5,64	99,65

Sumber : BPS, 2022

Dari tabel diatas terlihat jika capaian tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 5,66 dengan capaian sebesar 99,65% atau dengan kategori sangat baik. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.21
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022

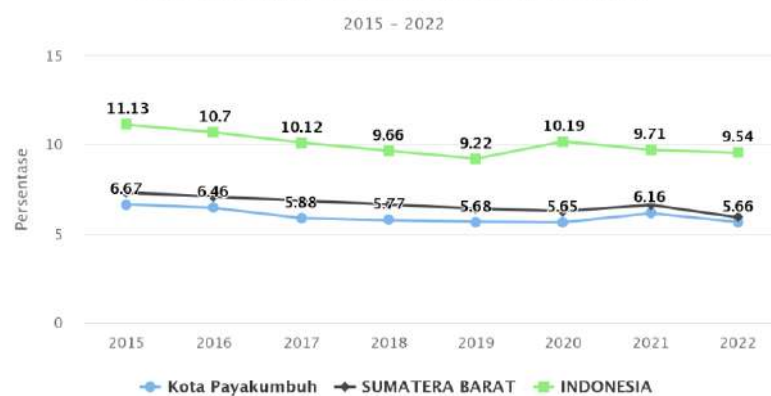
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
1	Kepulauan Mentawai	13,74	13,97	1,76	0,36	Rp 386.152,00
2	Pesisir Selatan	33,78	7,11	0,71	0,12	Rp 526.564,00
3	Solok	27,16	7,12	1,03	0,20	Rp 484.358,00
4	Sijunjung	15,07	6,00	0,96	0,25	Rp 484.572,00

5	Tanah Datar	14,91	4,26	0,62	0,12	Rp 466.907,00
6	Padang Pariaman	26,44	6,25	0,69	0,10	Rp 499.461,00
7	Agam	31,33	6,22	0,70	0,12	Rp 485.222,00
8	Lima Puluh Kota	26,00	6,59	0,92	0,24	Rp 504.670,00
9	Pasaman	19,94	6,85	0,65	0,11	Rp 431.915,00
10	Solok Selatan	11,81	6,51	1,12	0,25	Rp 470.090,00
11	Dharmasraya	15,08	5,56	0,74	0,16	Rp 530.693,00
12	Pasaman Barat	32,91	6,93	1,10	0,26	Rp 544.829,00
13	Kota Padang	42,37	4,26	0,61	0,13	Rp 634.581,00
14	Kota Solok	2,28	3,02	0,58	0,21	Rp 491.488,00
15	Kota Sawah Lunto	1,47	2,28	0,34	0,09	Rp 443.301,00
16	Kota Padang Panjang	2,89	5,14	0,41	0,05	Rp 543.609,00
17	Kota Bukittinggi	6,16	4,46	0,83	0,24	Rp 570.032,00
18	Kota Payakumbuh	8,08	5,66	0,49	0,07	Rp 573.234,00
19	Kota Pariaman	3,80	4,13	0,46	0,09	Rp 522.932,00

Sumber : BPS 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kota Payakumbuh nomor 11 (sebelas) terendah dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya angka kemiskinan di Kota Payakumbuh juga disebabkan karena tingginya Garis Kemiskinan (GK) Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Garis Kemiskinan adalah merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Perkembangan Presentase Penduduk Miskin



Menurut Badan Pusat Statistik ada 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh, nelayan, buruh bangunan atau pekerjaan lain yang pendapatannya di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat atau tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, ternak, emas dan lain-lain.

Berdasarkan indikator di atas dapat kita lihat rata-rata penduduk Kota Payakumbuh berada di luar kategori masyarakat miskin. Selain itu faktor yang mempengaruhi terhadap tingginya Garis Kemiskinan suatu daerah dipengaruhi oleh komoditi makanan dan non makanan. Secara umum jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh tahun 2022 mencapai lebih kurang 8.026 jiwa (5,66%) berkurang sebesar 670 jiwa orang dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 8.696 jiwa (6,16%) .

Secara umum pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Peran komoditi makan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi makanan termasuk di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022 komoditi makan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan adalah beras sebesar 19,26% di daerah perkotaan, setelah itu rokok sebesar 14,69%. Dan untuk komoditi non makanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar untuk daerah perkotaan adalah perumahan sebesar 7,67% dan bensin sebesar 3,18%.

Tabel 3.22
Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) beserta Kontribusinya (%) di Sumatera Barat Maret 2022

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan :	72.81	Makanan :	78.7
Beras	19.26	Beras	22.50
Rokok kretek filter	14.69	Rokok kretek filter	17.03
Cabe merah	5.53	Cabe merah	5.89
Daging ayam ras	3.67	Tongkol/tuna/cakalang	3.27
Telur ayam ras	3.5	Telur ayam ras	3.10
Tongkol/tuna/cakalang	3.17	Daging ayam ras	2.87
Bawang merah	2.32	Bawang merah	2.43
Roti	2.06	Roti	2.36
Gula pasir	1.92	Gula pasir	2.34
Mie Instan	1.50	Kelapa	1.82
Tahu	1.32	Kue kering/ biskuit	1.27
Kue kering/ biskuit	1.15	Tahu	1.19
Kopi bubuk & kopi instans	1.06	Mie instan	1.16
Lainnya	11.66	Lainnya	11.47
Bukan Makanan :	27.19	Bukan Makanan :	21.30
Perumahan	7.67	Perumahan	5.56
Bensin	3.18	Bensin	2.89
Listrik	3.10	Listrik	1.95
Pendidikan	2.78	Pendidikan	1.47
Perlengkapan mandi	1.44	Perlengkapan mandi	1.20
Pakaian jadi anak-anak	1.00	Pakaian jadi perempuan dewasa	0.94

Pakaian jadi perempuan dewasa	0.99	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0.84
Lainnya	7.03	Lainnya	6.45

Sumber : BPS Provinsi Sumbar 2022

Jika dilihat dari pekerjaan penduduk miskin Kota Payakumbuh di 5 (lima) Kecamatan pada tahun 2022 rata-rata kepala keluarga bekerja sebagai pekerjaan lepas, pedagang, petani dan lainnya. Penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara.

Grafik 3.4
Jenis Pekerjaan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2022



Sumber : Data P3KE KemenkoPMK

© Kemenko PMK

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikelompokkan atas :

1. **Bidang pendidikan.** Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan memiliki peran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berupa pemberian alat perlengkapan siswa berupa buku gambar, alat tulis, pensil warna yang diberikan kepada anak kurang mampu ditingkat PAUD sebanyak 300 siswa, 60 siswa ditingkat Pendidikan kesetaraan, 2.099 siswa di tingkat Sekolah Dasar dan 2.575 siswa Sekolah

Menengah Pertama. Selain itu pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh juga memberikan bantuan biaya Pendidikan melalui program BOS kepada siswa yang kurang mampu sebesar Rp. 900.000,- per satu orang peserta didik per satu tahun yang tersebar di 66 SD Negeri, 15 SD Swasta, 10 SMP Negeri dan 10 SMP Swasta.

Selain itu pada tahun 2022, sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu (anak yatim) menerima bantuan dari Kemensos Republik Indonesia melalui Yayasan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) sebesar Rp. 600.000,- per anak yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan.



Selain itu Pemerintah Kota Payakumbuh juga memberikan bantuan bekerjasama dengan BAZNAZ Kota payakumbuh kepada 106 siswa SD dan SMP sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini berasal dari zakat ASN Kota Payakumbuh.

2. **Bidang kesehatan**, kebijakan pembangunan di prioritaskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan sistem jaminan kesehatan yang terkendali biaya dan mutunya;

Untuk pembiayaan jaminan kesehatan, terdapat 3 (tiga) sumber pendanaan yaitu :

a. Bersumber APBN

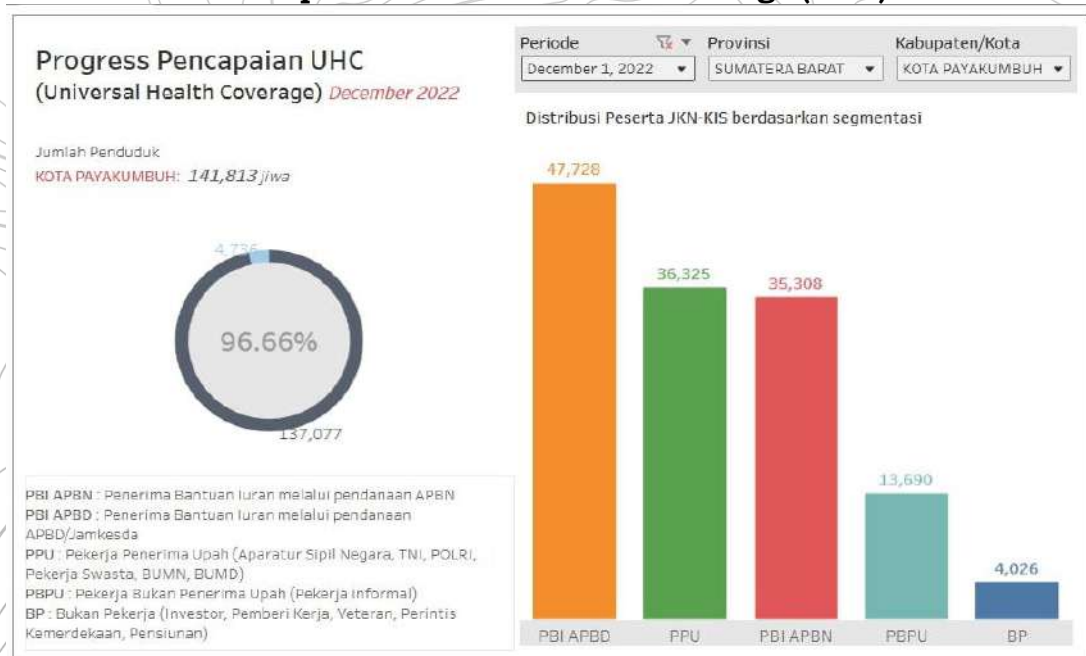
- b. Bersumber Sharing Pendanaan APBD Propinsi dan Kab/Kota
- c. Bersumber APBD Kota Payakumbuh.

Tabel 3.23
Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Kepesertaan	Jumlah
1	JKN Mandiri	8.000
2	KIS JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato)	32.903
3	KIS APBD	11.600
	Jumlah	52.503

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022.

Grafik 3.5
Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)



Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Universal Health Coverage telah dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh sejak Bulan September 2022. kondisi ini menguntungkan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh terutama pada segmen kepesertaan PBPU BP Pemda yang mana dapat mendaftarkan penduduk yang membutuhkan

Jaminan Kesehatan langsung aktif pada hari pendaftaran tanpa menunggu selama 14 hari.

3. **Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana**, mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yang berkaitan, antara lain :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2022 untuk pengentasan kemiskinan di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan penambahan pipa sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 420 sambungan rumah.



Gambar 3.3
Pemasangan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

b. Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai salah satu perangkat daerah yang diberikan tugas dan kewenangan dalam hal pengelolaan urusan perumahan dan kawasan permukiman melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola juga memiliki andil yang sangat besar dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh melaksanakan pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit yang pendanaannya didukung oleh DAK Bidang Perumahan dan DAU (sebagai pendamping) dengan proporsi

anggaran 40% DAK dan 60% DAU dan besaran total pendanaan setiap unit rumah adalah Rp. 50.000.000,-.

Selain itu pada tahun 2022 untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan pembenahan terhadap akses sanitasi layak bagi masyarakat. Pembenahan terhadap akses sanitasi layak ini adalah salah satunya berupa pembangunan tangki septik individu bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk tahun 2022, melalui pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi serta program Hibah Air Limbah Setempat (HALS) oleh kementerian keuangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh menargetkan terlaksananya pembangunan Tangki Septik Individu tersebut sebanyak ±738 unit dengan rincian 438 unit pembiayaan melalui DAK sanitasi dan 300 unit adalah pembiayaan melalui DAU/HALS. Dianggarkan dengan alokasi Rp. 4.560.328.060,-.



Gambar 3.4
Penyerahan Tanki Septic individu kepada masyarakat penerima sasaran

4. **Bidang sosial**, mencakup program dan kegiatan yang berkaitan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pada tahun 2022 Dinas Sosial memberikan bantuan berupa makanan kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas kepada 246 orang yang diberikan 1 kali untuk 3 bulan. Selain itu Pemerintah Kota Payakumbuh melalui program perlindungan dan jaminan sosial memberikan bantuan sosial dampak inflasi akibat kenaikan BBM. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS yang mengalami dampak akibat kenaikan BBM tetapi belum menerima Bansos lainnya. Penyaluran bantuan ini diserahkan secara non tunai melalui Bank Nagari kepada sebanyak 1.431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



Gambar 3.5
Penyerahan Bantuan DTU 2% Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Selain dari APBD pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin bersumber dari dana ABPN melalui Bantuan Program Sembako (BPNT), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).



Gambar 3.6
Penyerahan Bantuan Kepada Anak Disabilitas

5. **Bidang ekonomi**, yang mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu :

a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja sebanyak 3 (tiga) paket pelatihan yang terdiri dari pelatihan memasak kue/roti dengan peserta 16 orang, pelatihan menjahit dasar dengan peserta 32 orang.



Gambar 3.7
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Lulusan BLK

b. Dinas Ketahanan Pangan

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan berupa pemberian bantuan untuk 11 (sebelas) Kelompok Wanita Tani (KWT). Dan juga bantuan kepada 5 (lima) kelompok Dasawisma.

Pada tahun 2022 juga dilaksanakan pembangunan Desa Mandiri Pangan 1 (satu) kelurahan dan 4 (empat) kelurahan Desa Mandiri Pangan Lanjutan. Di kelurahan ini akan dilakukan pembinaan dan peningkatan motivasi dari anggota kelompok DMP agar bisa lebih aktif dalam menjalankan usaha produktif kelompok sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahun ini pelaksanaan Desa Mandiri Pangan 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Payobasung dan 4 (empat) kelurahan Desa Mandiri pangan Lanjutan yaitu :

1. Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, kelompok Sejahtera dan Suka maju.
2. Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, kelompok Sepakat dan Sepakat Bersama.
3. Kelurahan Tiakar kecamatan Payakumbuh Timur, kelompok Affinitas Bunga.
4. Kelurahan Koto Tuo Limo Kampaung kecamatan Payakumbuh Selatan, kelompok Koto Tuo Limo Kampaung

c. Dinas Koperasi dan UKM

Program Kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan pada Dinas Koperasi dan UKM adalah dengan melakukan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha sebanyak 40 orang dan pelatihan peningkatan SDM pelaku usaha sebanyak 40 orang serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku usaha untuk 1.000 orang pelaku usaha kuliner yang tersebar di 5 kecamatan.



Gambar 3.8
Pelatihan Kewirausahaan Digitalisasi Oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2022

d. Dinas Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Dimana dengan adanya pelatihan diharapkan nantinya akan meningkatkan daya jual produk olahan hasil perikanan. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan produk olahan hasil perikanan dengan mengadakan bazar. Selain itu untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh juga diberikan bantuan pupuk bersubsidi dan pemberian alat mesin pertanian kepada kelompok tani yang ada di 5 (lima) Kecamatan di Kota Payakumbuh.

Pada Dinas Pertanian ada 2 (dua) program yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh, yaitu :

- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain :

- Bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako.
- Bantuan sosial khusus seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai.
- Bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional.
- Bantuan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus.
- Bantuan Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar.
- Bantuan rehab rumah tidak layak huni.
- Bantuan akses air minum layak dan aman.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui peningkatan produktifitas dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

- Peningkatan akses pekerjaan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat miskin.
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan usaha.
- Peningkatan akses terhadap permodalan pinjaman melalui BLUD.
- Pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Pada Tahun 2022 disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hal ini menunjukkan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh.
2. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Payakumbuh tahun 2022.
3. Terdapat 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, baik yang menyentuh langsung, maupun mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Pemukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
11. Program Pemberdayaan Sosial
12. Program Rehabilitasi Sosial
13. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
14. Program Penempatan Tenaga Kerja
15. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
16. Program Hubungan Industrial
17. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
18. Program Pencatatan Sipil
19. Program Pengendalian Penduduk
20. Pembinaan Keluarga Berencana
21. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
22. Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
24. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
25. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
26. Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
27. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
28. Program Promosi Penanaman Modal
29. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

30. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
31. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
32. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
33. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
34. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
35. Program Perizinan Usaha Pertanian
36. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
37. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
38. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
39. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran 3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator kinerja untuk sasaran menurunnya tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh adalah **Tingkat Pengangguran**. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 sebesar **118,10 %** dengan kategori **sangat baik**. Tahun 2022 merupakan akhir periode RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

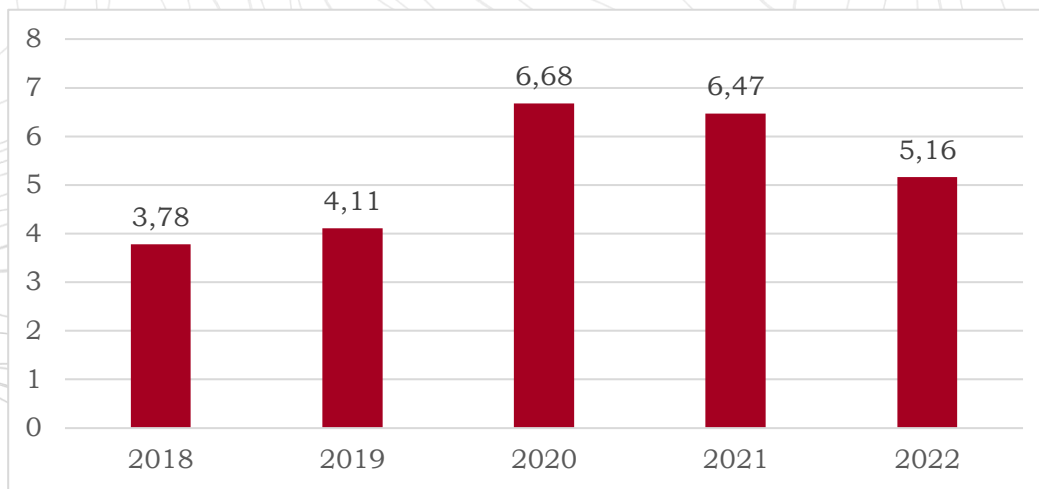
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

No	Indikator	Capaian tahun 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Th 20212thd RPJMD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Pengangguran	6,47	6,30	5,16	118,10	Sangat baik	6,30	118,10

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2023

Dari Tabel 3.24 terlihat jika capaian tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 5,16 dengan capaian kinerja sebesar 118,10 % atau dengan kategori sangat baik. Realisasi tahun 2022 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana tingkat pengangguran tahun 2021 sebesar 6,47 atau turun 1,31 poin. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan mengurangi angka pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik. 3.6
Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022



Sumber data : BPS, 2023

Berdasarkan grafik 3.6, tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren peningkatan. Tahun 2018 sebesar 3,78% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 4,11%. Kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi 6,68. Tahun 2021 turun menjadi 6,47%. Meskipun demikian secara umum, tingkat pengangguran Kota Payakumbuh masih lebih rendah dari rata-rata provinsi Sumatera Barat dan Nasional, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu
Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Kota Payakumbuh (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)	Indonesia (%)
1	2018	3,78	5,66	5,34
2	2019	4,11	5,38	7,05
3	2020	6,68	6,88	7,07
4	2021	6,47	6,52	6,49
5	2022	5,16	6,28	5,86

Sumber: BPS, 2023

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kota Payakumbuh tahun 2022 memiliki tingkat pengangguran 5,16%, meskipun yang ditargetkan oleh provinsi Sumatera Barat 6,30%. Dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran Kota Payakumbuh menempati posisi ke

sebelas terkecil. Kondisi ini lebih baik dari tahun 2021 dimana tingkat pengangguran Kota Payakumbuh menempati posisi ke dua belas terkecil. Dan dari 7 Kota di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ke tiga terbesar setelah Kota Pariaman dengan tingkat pengangguran sebesar 5,19% sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kab. Kepulauan Mentawai	2,31	2,92	3,98	2,79	1,39
Kab. Pesisir Selatan	6,03	6,02	7,00	5,97	4,61
Kab. Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,89
Kab. Sijunjung	3,22	3,64	5,30	3,57	4,87
Kab. Tanah Datar	4,01	3,20	4,79	4,63	5,91
Kab. Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60
Kab. Agam	4,93	4,78	4,61	5,06	4,93
Kab. Lima Puluh Kota	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72
Kab. Pasaman	6,04	5,28	5,04	4,92	5,38
Kab. Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71
Kab. Dharmasraya	4,02	5,06	5,31	5,00	6,23
Kab. Pasaman Barat	3,36	4,74	4,69	5,02	6,33
Kota					
Kota Padang	9,29	8,74	13,64	13,37	11,69
Kota Solok	6,03	7,06	8,35	5,15	3,90
Kota Sawahlunto	5,92	6,84	8,20	6,38	5,00
Kota Padang Panjang	5,35	4,38	7,22	4,90	4,84
Kota Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90
Kota Payakumbuh	3,95	4,13	6,68	6,47	5,16
Kota Pariaman	5,82	5,48	5,73	6,09	5,19
Provinsi Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jumlah penduduk bekerja dan pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena ketersediaan lapangan usaha, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk. Tahun 2022 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak

70.127 orang dan jumlah pengangguran 3.812 orang. Sedangkan tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 69.498 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 4.805 orang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan adanya penurunan jumlah pengangguran dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan prestasi tersendiri Kota Payakumbuh dimana tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan namun jumlah pengangguran naik. Secara persentase terjadi penurunan tingkat pengangguran, karena faktor pembagiannya cukup besar. Perkembangan data ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	67.083	65,892	69.808	74.303	73.939
Bekerja	64.545	63.182	65.144	69.498	70.127
Pengangguran	2.538	2.710	4.664	4.805	3.812
Bukan Angkatan Kerja	28.083	30.919	31.830	29.279	31.539
Sekolah	11.219	8.708	9.734	10.220	11.009*)
Mengurus Rumah Tangga	15.030	18.403	16.937	17.783	19.156*)
Lainnya	1.834	3.808	5.159	1.276	1.374*)
Penduduk Usia Kerja	95.166	96.811	101.638	103.582	105.532
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,49	68,06	68,68	71,73	70,06
Tingkat Pengangguran (%)	3,78	4,11	6,68	6,47	5,16

Sumber : BPS 2023

*) data diolah

Tingkat kesempatan kerja atau rasio penduduk bekerja Kota Payakumbuh juga mengalami fluktuasi, dimana Tahun 2022 sebesar 94,84 dan tahun 2021 sebesar 93,53. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan peluang angkatan kerja untuk terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi rasio penduduk bekerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja atau semakin sedikit jumlah pengangguran.

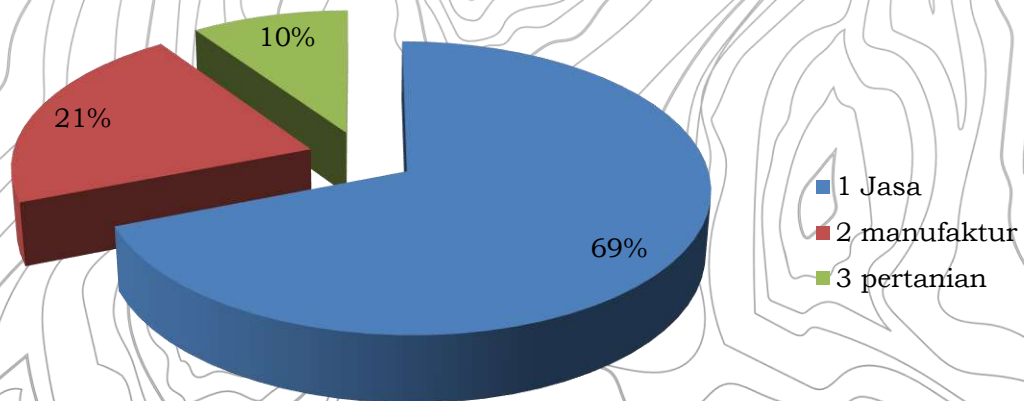
Tabel 3.28
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angkatan Kerja (orang)	67.083	65,892	69.808	74.303	73.939
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	64.545	63.182	65.144	69.498	70.127
3.	Jumlah Pengangguran	2.538	2.710	4.664	4.805	3.812
4.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,22	95,89	93,32	93,53	94,84
	Rasio	96	96	93	94	95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2023 (data diolah)

Lapangan pekerjaan utama Kota Payakumbuh yang menyerap tenaga kerja tersebar pada beberapa sektor lapangan usaha. Berdasarkan data Sakernas tahun 2021 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa.

Grafik. 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Payakumbuh Tahun 2021

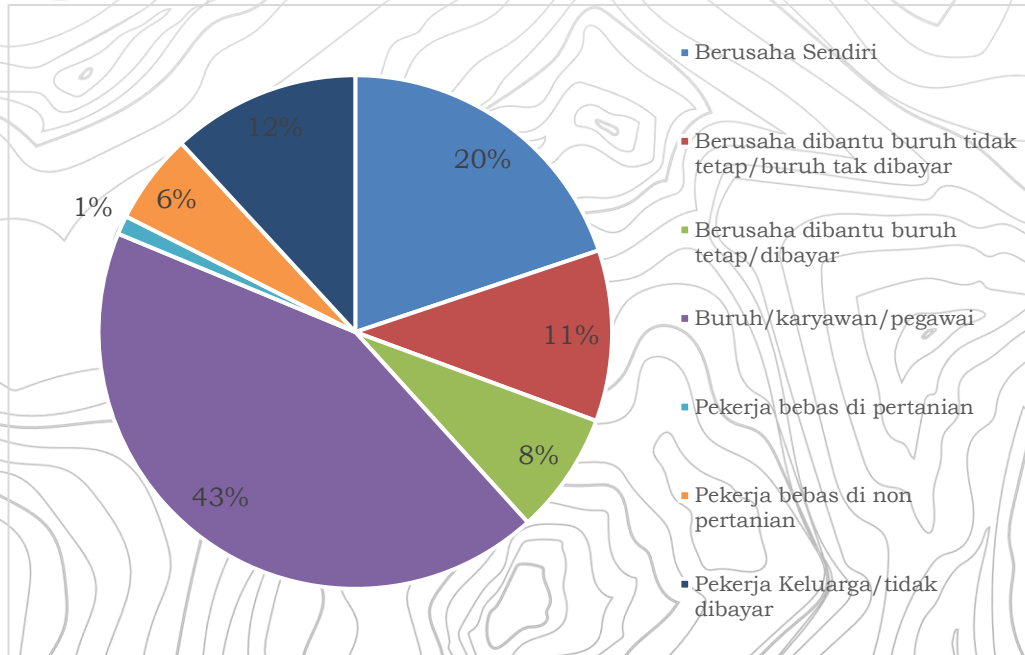


Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Hasil Sakernas Agustus 2021

Dalam hal status pekerjaan, penduduk bekerja di Kota Payakumbuh berdasarkan hasil Sakernas 2021 sebagian besar berstatus buruh/karyawan / pegawai yaitu sebesar 29.866 jiwa atau sebanyak 42,97% dari

total penduduk yang bekerja. Sedangkan untuk status pekerjaan yang paling sedikit adalah pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 820 orang atau 1,18%. Pembagian status pekerjaan utama penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 3.8.

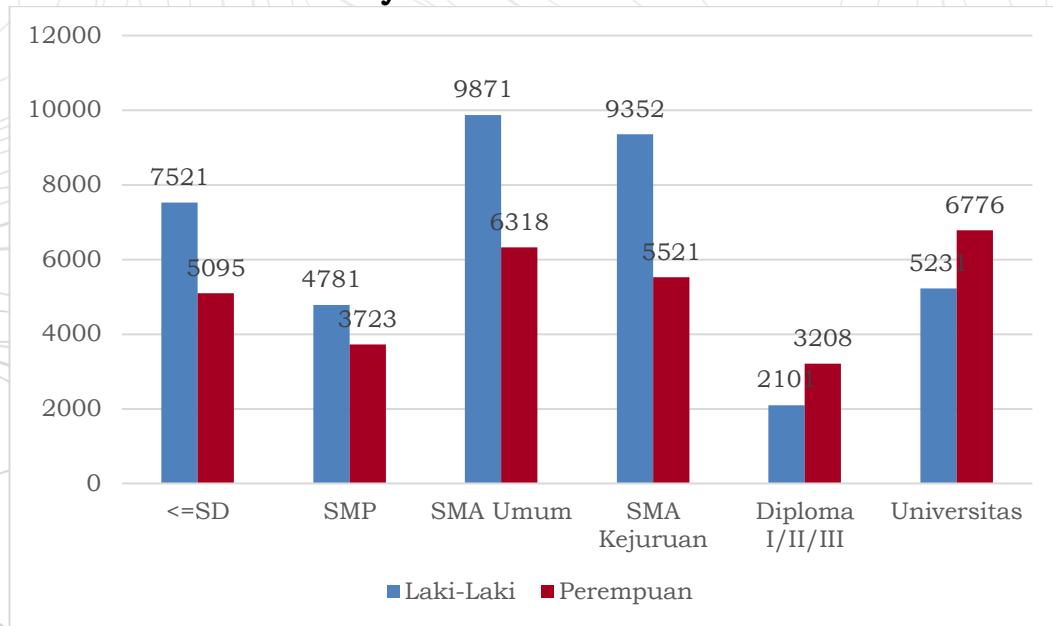
Grafik 3.8
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2021



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2021

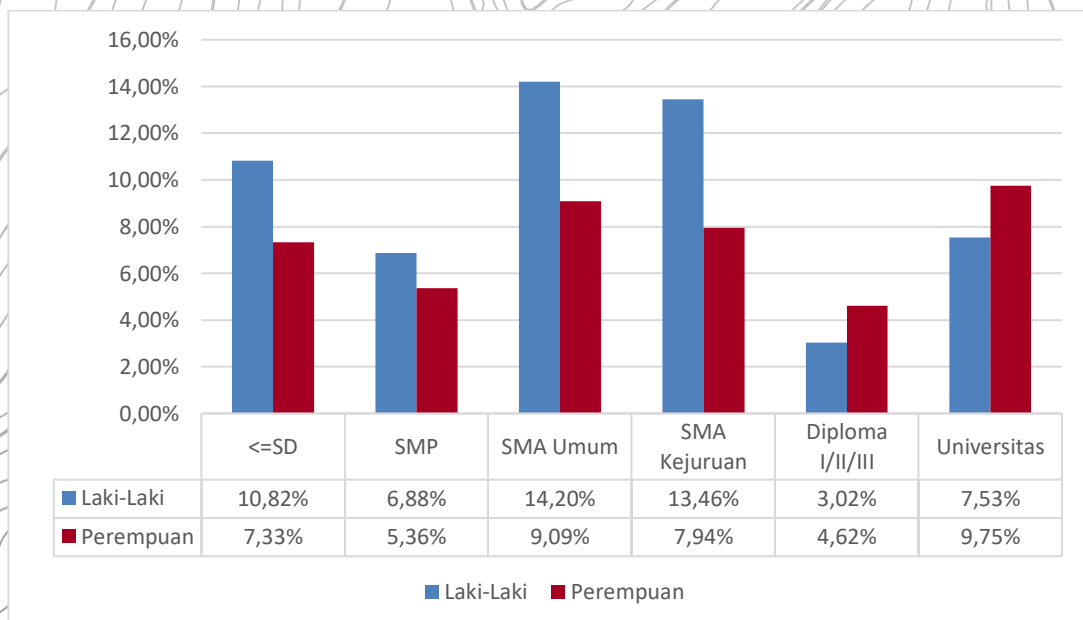
Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh, sebanyak 38.857 laki-laki dan sisanya 30.641 orang perempuan dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SMA Umum dan SMA Kejuruan. Namun untuk pendidikan tinggi baik diploma maupun universitas, lebih didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

Grafik. 3.9
Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2021



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2021

Grafik. 3.10
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2021



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2021

Beberapa program dalam rangka untuk penurunan angka pengangguran dan peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai yaitu melalui :

1. **Program Pelatihan Kerja dan produktifitas tenaga kerja**, dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan sub Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi. Kegiatan ini berupa kerjasama dengan instansi terkait seperti pelatihan boarding kejuruan pariwisata sebanyak 11 orang yang bersumber dari dana APBN (BBPVP Medan), pelatihan pemberdayaan bagi keluarga purna PMI sebanyak 20 orang yang bersumber dari dana UPT BP2MI (APBN), pelatihan membuat aneka macam roti/kue untuk pencari kerja sebanyak 16 orang yang bersumber dari dana BLK Kota Payakumbuh (APBN)
2. **Program penempatan tenaga kerja**, dalam bentuk kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja dengan sub kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online dan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online. Kegiatan dalam bentuk pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui Sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Sisnaker ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya. Disamping melalui aplikasi Sisnaker, penyebarluasan informasi bursa kerja melalui media sosial seperti facebook dan instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
3. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan bentuk kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Melalui kegiatan ini dilakukan beberapa upaya diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung

kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, kemudian Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di tingkat rumah tangga dan percontohan Pekarangan Pangan, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi serta pemberian bantuan kepada masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan sumber daya masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

4. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan bentuk Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan Sub kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan akan data yang valid dengan sasaran pelaku usaha UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang potensial untuk naik kelas.
5. **Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, dengan bentuk Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Pada Tahun 2022 dilaksanakan Kegiatan peningkatan SDM dan pemasaran produk pelaku usaha UMKM, bagaimana pelaku usaha bisa kreatif dalam menyikapi pandemi covid-19 melalui kegiatan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha UMKM dan pelatihan peningkatan SDM pelaku usaha UMKM. Sasaran Kegiatan ini adalah diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut akan terciptanya pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil di Kota Payakumbuh.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja.

2. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja yang bersifat produktif.
3. Terdapat kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dan Perusahaan di luar daerah dan pihak-pihak lain dalam hal penerimaan dan pelatihan tenaga kerja.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Penempatan Tenaga Kerja.
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Permasalahan

1. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Masih minimnya informasi dan fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dengan penyedia lapangan kerja sehingga kurangnya pemenuhan jumlah dan kualifikasi angkatan kerja.
3. Tenaga kerja banyak bekerja pada sektor buruh, sehingga belum mendapatkan pendapatan yang memadai dan rentan pemutusan hubungan kerja.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Peningkatan fasilitasi antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja.
3. Peningkatan kemandirian tenaga kerja untuk berusaha dalam sektor swasta.

Misi 2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama.

Tujuan: Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah, “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian dikatakan tumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian kota Payakumbuh diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat kota Payakumbuh.

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok

modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Secara ringkas, sasaran strategis dan indikator dapat dijelaskan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Sasaran Strategis dan IKU pada Misi II

No	Sasaran strategis	IKU	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ kriteria
				Alasan	Formulasi/ cara pengukuran	Sumber data	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	$LPE = \frac{((PDRB(t) / PDRB(t-1)) - 100) \times 100\%}{100}$	BPS/ Bappeda	Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan
2	Meningkatnya investasi	5 Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun n	DPMD-PTSP	Perhitungan langsung besaran investasi per tahun

Sumber Data : *Setdako Payakumbuh tahun 2022*

Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari misi ke 2 RPJMD yaitu membangun perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya saing dan berkeadilan, berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama. Penjabaran misi ini diarahkan memberdayakan segenap potensi perekonomian secara komprehensif, sehingga berakumulasi terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana peningkatan ekonomi yang merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesenjangan antar penduduk. Peningkatan ekonomi juga ditandai dengan semakin terbuka luas dan transparannya investasi yang menggerakkan banyak sektor ekonomi di tengah masyarakat sekaligus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Gambar 3.9
Visi dan Misi pada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan berdasarkan analisis data capaian kinerja makro daerah, pencapaian target kinerja sasaran pada misi 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.30
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1-2

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021 (%)	2022			Kategori	Target Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022	Capaian thn thdp Perubahan RPJMD20 17-2022 (%)
			Target (%)	Realisasi *) (%)	Nilai capaian %			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,58	3,07	3,63	118,24	Sangat baik	3,07	118,24
2.	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	172,4	203,80	199,70	97,99	Sangat baik	203,80	97,99

Sumber Data : BPS 2022 dan hasil monev perangkat daerah diolah *) data proyeksi

Sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa

meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhatikan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membuka kesempatan kerja yang luas apabila didukung oleh tumbuh dan berkembangnya sektor riil. Dimana sektor riil akan jauh menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan sektor finansial.

Di Kota Payakumbuh, capaian meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan yaitu pada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi kota payakumbuh sudah semakin meningkat, namun perlu dikaji kualitas pertumbuhannya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi sekarang ini ditambah lagi dengan masih dalam situasi pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Payakumbuh terus berusaha untuk melaksanakan pembangunan dan menggerakkan dan memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi tersebut.

Berikut ditampilkan perkembangan PDRB Kota Payakumbuh periode tahun 2018-2022 menurut kelompok lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010) yang bersumber dari BPS Kota Payakumbuh. Namun untuk data PDRB tahun 2022, BPS Kota Payakumbuh belum merilis data tersebut pada kondisi bulan Januari 2022 ini, oleh sebab itu data PDRB untuk tahun 2022 diperoleh berdasarkan angka proyeksi menggunakan tren kenaikan 5 tahun.

Tabel 3.31
Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh (persen)

2020	2021	2022*)
-1.65	3.58	3.63

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2022

*) Angka Proyeksi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Hal ini diperkirakan karena akselerasi kinerja ekonomi yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga. Membaiknya kondisi pandemi Covid-19 sejalan dengan perbaikan ekonomi baik nasional maupun lokal juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha. Kedepan, perbaikan ekonomi diperkirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa Lapangan Usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Industri Pengolahan Informasi dan Komunikasi dan Konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi hampir 50 % setiap tahunnya terhadap PDRB Kota Payakumbuh. Setelah Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap bruto memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Payakumbuh yaitu sekitar 25 %. Komponen konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi karena permintaannya terhadap barang bisa menggerakkan produksi barang tersebut. Bila dilihat dari sisi produksinya, sektor yang paling besar berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh adalah sektor *non-tradable* khususnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor *tradable* yang seharusnya dapat meningkat lapangan kerja justru pertumbuhannya lebih lambat dari sektor *non tradable*. Pandemi Covid-19 telah memperparah kondisi ekonomi masyarakat, kondisi ini menuntut pemerintah dan masyarakat harus berfikir keras agar tumbuh inovasi-inovasi baru dalam menjalani aktivitas ekonomi dan aktivitas kehidupan lainnya, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan

perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Dibutuhkan langkah konkrit untuk menaikkan kontribusi sektor-sektor *tradable* yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Payakumbuh dari tahun 2018 – 2022 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2022 diprediksi naik pada beberapa sektor usaha, sehingga berdampak pada kenaikan nilai PDRB dari sebesar Rp. 7.290.850,77 pada tahun 2021 menjadi Rp. 7.519.256,64 pada tahun 2022. Tabel 3.35 menggambarkan pergeseran dan struktur ekonomi Kota Payakumbuh dengan melihat perkembangan nilai dan kontribusi sektor PDRB atas dasar Harga Berlaku selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.32
Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB
Kota Payakumbuh tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022*)	
		(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	413.827,66	6,75	433.472,70	6,35	438.673,94	6,43	442.230,91	6,07	448.864,37	5,97
2	Pertambangan & penggalian	34.498,78	0,56	35.570,90	0,52	35.410,17	0,52	37.365,64	0,51	38.615,54	0,51
3	Industri Pengolahan	314.831,47	5,13	327.323,08	4,80	331.871,95	4,86	367.277,74	5,04	379.014,15	5,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.922,55	0,06	4.380,00	0,06	4.155,66	0,06	4.290,14	0,06	4.436,69	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.109,51	0,25	16.534,87	0,24	16.278,59	0,24	17.013,56	0,23	17.581,75	0,23
6	Konstruksi	832.699,94	13,57	939.219,58	13,76	932.935,71	13,67	991.944,12	13,61	1.024.291,11	13,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.542.874,45	25,15	1.714.777,49	25,13	1.673.597,29	24,53	1.750.503,67	24,01	1.808.969,01	24,06
8	Transportasi dan Pergudangan	766.254,57	12,49	860.457,53	12,61	799.911,39	11,72	866.755,82	11,89	895.572,89	11,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	198.504,76	3,24	228.069,39	3,34	206.615,13	3,03	226.915,99	3,11	234.441,91	3,12
10	Informasi dan Komunikasi	448.958,59	7,32	515.756,13	7,56	563.204,22	8,25	614.019,09	8,42	632.761,05	8,42

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	366.749,63	5,98	390.511,01	5,72	403.016,34	5,91	449.555,51	6,17	463.641.54	6,17
12	Real Estate	173.380,72	2,83	191.572,00	2,81	198.156,20	2,90	208.532,48	2,86	215.284.34	2,86
13	Jasa Perusahaan	15.271,11	0,25	16.719,91	0,25	16.225,36	0,24	16.612,80	0,23	17.180.06	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	422.546,36	6,89	477.456,65	7,00	517.029,81	7,58	567.209,12	7,78	584,571.24	7,77
15	Jasa Pendidikan	277.385,68	4,52	316.858,00	4,64	337.224,44	4,94	358.503,45	4,92	369,790.70	4,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.625,70	1,43	100.290,95	1,47	111.389,13	1,63	119.615,80	1,64	123,281.36	1,64
17	Jasa Lainnya	220.258,83	3,59	255.460,00	3,74	237.946,55	3,49	252.504,93	3,46	260,958.92	3,47
Total		6.134.700,30	100	6.824.430,16	100	6.823.641,86	100	7.290.850,77	100	7,519,256.64	100

Sumber : payakumbuhkota.bps.go.id, 2022

*) Angka Proyeksi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama 5 tahun digunakan data PDRB ADHK sebagaimana tertera pada Tabel. 3.33.

Tabel 3.33
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2010
kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

Lapangan usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	270.766,04	6,39	270.129,44	6,02	274.034,54	6,21	278.652,79	6,09	282,832.58	6,09
Pertambangan & penggalian	22.342,67	0,53	22.380,83	0,5	21.913,82	0,5	22.800,16	0,50	23,142.16	0,50
Industri Pengolahan	236.689,86	5,58	243.377,81	5,42	235.577,09	5,34	241.850,10	5,29	245,477.85	5,29
Pengadaan Listrik dan Gas	2.691,94	0,06	2.757,49	0,06	2.586,43	0,06	2.658,00	0,06	2,697.87	0,06
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.791,64	0,33	14.115,63	0,31	13.858,87	0,31	14.343,21	0,31	14,558.36	0,31
Konstruksi	557.007,14	13,14	594.976,20	13,26	559.385,32	12,67	567.261,17	12,41	575,770.09	12,41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	997.108,76	23,52	1.063.641,99	23,7	1.052.808,55	23,85	1.090.498,33	23,85	1,106,855.80	23,85

Transportasi dan Pergudangan	574.307,71	13,55	610.878,26	13,61	553.472,48	12,54	581.894,67	12,73	590,623.09	12,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	115.108,13	2,72	124.379,16	2,77	109.928,27	2,49	117.634,05	2,57	119,398.56	2,57
Informasi dan Komunikasi	398.920,19	9,41	435.873,42	9,71	480.567,25	10,89	507.324,82	11,1	514,934.69	11,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	249.665,64	5,89	254.189,68	5,66	257.470,63	5,83	273.357,19	5,98	277,457.55	5,98
Real Estat	116.639,26	2,75	122.844,50	2,74	123.081,43	2,79	125.197,65	2,74	127,075.61	2,74
Jasa Perusahaan	11.348,74	0,27	11.864,84	0,26	11.372,72	0,26	11.488,38	0,25	11,660.71	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288.594,14	6,81	302.399,80	6,74	300.955,65	6,82	302.922,24	6,63	307,466.07	6,63
Jasa Pendidikan	172.286,69	4,06	186.495,55	4,16	198.099,26	4,49	205.302,76	4,49	208,382.30	4,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.708,47	1,55	70.657,57	1,57	76.923,91	1,74	81.223,84	1,78	82,442.20	1,78
Jasa Lainnya	145.685,73	3,44	157.242,32	3,5	141.588,85	3,21	147.517,60	3,23	149,730.36	3,23
Total	4.238.662,76	100	4.488.204,49	100	4.413.625,08	100	4571926,96	100	4,640,505.86	100

Sumber : Payakumbuhkota.bps.go.id, 2022
*) Angka Proyeksi

Pendapatan per kapita sebagai salah satu ukuran untuk menilai kesejahteraan penduduk, dilakukan perbandingan antara PDRB ADHB tahun 2022 dengan jumlah penduduk tahun 2022. Perkembangan Jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 3.34

Tabel 3.34
Perkembangan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Luas (Km ²)	2018		2019		2020		2021		2022*)	
			Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/km ²)
1	Payakumbuh Barat	19,064	52.449	2.754	53.266	2.709	54.532	2.861	55.133	2.893	55.684	2.921
2	Payakumbuh Timur	22,730	28.274	1.244	28.477	1.253	29.325	1.290	29.669	1.305	29.966	1.318
3	Payakumbuh Utara	14,528	31.883	2.194	32.269	2.221	32.242	2,219	32.443	2.233	32.767	2.255
4	Payakumbuh Selatan	14,683	11.032	751	11.406	810	11.990	817	12.205	831	12.327	840
5	Lamposi Tigo Nagori	9,425	10.015	1.062	10.155	1.078	11.487	1,218	11.734	1.244	11.851	1.257
	Total	80,43	133.703	1.662	135.573	1.686	139.576	1.735	141.184	1.755	142.596	1.773

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2022
*) Angka Proyeksi

PDRB per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 3.35
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2018	6.134.700,30	4.238.662,76	133.703	45,88	31,70
2	2019	6.824.430,16	4.488.204,49	135.573	50,34	33,11
3	2020	6.823.641,86	4.413.625,08	139.576	48,89	31,62
4	2021	7.290.850,77	4.571.926,96	141.184	51,64	32,38
5	2022	7,519,256.64	4,640,505.86	142.596	52,73	32,54

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2022 (data diolah)

*) Angka Proyeksi

Tabel 3.38 menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada PDRB juga akan mempengaruhi angka PDRB perkapita, dimana pada tahun 2022 terjadi proyeksi kenaikan PDRB perkapita di Kota Payakumbuh. Hal ini terjadi dikarenakan mulai normalnya aktivitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi yang disebabkan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. PDRB Perkapita atas harga berlaku Kota Payakumbuh diproyeksi meningkat dari 51,64 juta pada tahun 2021 menjadi 52,73 juta pada tahun 2022.

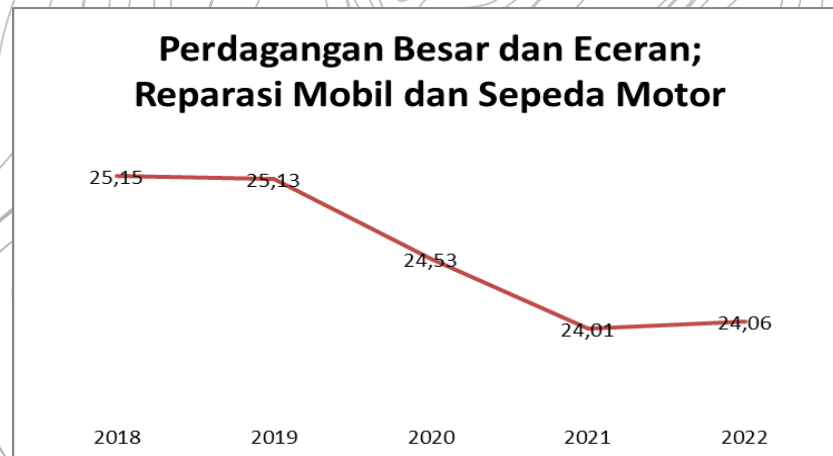
Kajian potensi dan permasalahan ekonomi di kota Payakumbuh menuntut pemilihan terhadap sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha yang berperan strategis dalam pembangunan. Kajian mengenai sektor strategis yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun sebagaimana dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 adalah :

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan minum;
4. Industri Pengolahan;
5. Informasi dan Komunikasi;
6. Konstruksi.

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Sebagai kota yang terletak di jalur perlintasan Sumbar-Riau, maka sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial dan berkembang di kota Payakumbuh. Selama lima tahun terakhir, kota Payakumbuh tumbuh menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sumatera Barat. Sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi selama lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada grafik di Gambar 3.10 terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan secara umum mengalami penurunan, setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai di tahun 2021, ditambah dengan kondisi pandemi Covid -19 yang menyebabkan jumlah pedagang menurun cukup banyak. Meskipun demikian secara produksi menurut 17 lapangan usaha, sektor perdagangan tetap memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh. Tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 menjadi 24,06 %.

Grafik 3.11
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda, 2022 (data diolah)

Pada tahun 2022 berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh pada sektor perdagangan, diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar yang sudah ada baik pasar pusat Kota Payakumbuh, Pasar Ibh maupun dengan meningkatkan sarana dan prasarana pada pusat perdagangan baru pada SPPK III pada kelurahan Tigo Koto Diate yang sebelumnya kelurahan Padang Kaduduak, kecamatan

Payakumbuh Utara. Kawasan ini juga telah diintegrasikan dengan kawasan sentra IKM Rendang yang menjadi produk unggulan kota Payakumbuh sehingga dapat menciptakan suatu aktivitas perekonomian baru yang terintegrasi. Selanjutnya juga dilaksanakan penataan pedagang kaki lima terutama pasar kuliner di pusat pertokoan Payakumbuh.

Adapun prasarana perdagangan yang tersedia di Kota Payakumbuh adalah pasar tradisional Ibh, dan pasar pusat pertokoan dimana profilnya dapat dilihat pada Tabel 3.36 dan Tabel 3.37.

Tabel 3.36
Prasarana dan Fasilitas Pendukung di Pasar Tradisional Ibh

1	Nama Pasar	: Pasar Tradisional Ibh Kota Payakumbuh
2	Alamat	: Jl. A. Yani Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
3	Telpon /Fax	: 0752 92239
4	Jenis Pasar	: Pasar Tradisional
5	Hari Operasional	: Setiap hari
6	Jam Operasional/hari	: 05.00 Wib s.d 21.00 Wib
7	Luas Tanah	: 2.2 Ha
8	Luas Bangunan	: 15400
9	Sarana Pasar	:
	Mesjid	: 1 buah
	Mushola	: 2 buah
	Klinik Kesehatan	: 1 buah
	Toilet	: 9 buah
	Ruang Menyusui	: 1 buah
	Lapangan Parkir	: 4 lokasi
	Taman	: 2 lokasi
	Tempat Pengolahan Terpadu (TPST)	: 1 unit
	Pos Keamanan	: 2 lokasi
	Sarana Informasi Publik	: RadioLand 1 unit Videotron 1unit majalah dinding 4 buah
10	Pengelola Pasar	: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Bidang Pengelolaan Pasar
11	Jumlah Pedagang	: Toko : 157 Unit



	Kios	:	348 Unit
	Petak/Los	:	156 Unit
	PKL	:	773 Orang
12	Komoditi	:	Bahan Kebutuhan Pokok, Sayur Mayur, Buah, Pakaian Jadi, Kelontong, Pupuk, Kosmetik dll.
13	Letak Geografis	:	-0.230641 100.635.682

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2022

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representative.

Tabel 3.37
Prasarana dan Fasilitas Pasar Pusat pertokoan Kota Payakumbuh

1	Nama Pasar	:	Pasar Kota Payakumbuh
2	Alamat	:	Jl. A. Yani Kel. Ibulh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
3	Telpon /Fax	:	0752 92239
4	Hari Operasional	:	Setiap hari
5	Jam Operasional/hari	:	05.00 Wib s.d 21.00 Wib
6	Sarana Pasar	:	
	Mesjid	:	2 buah
	Mushola	:	5 buah
	Klinik Kesehatan	:	1 buah
	Toilet	:	14 buah
	Lapangan Parkir	:	4 lokasi
	Jembatan Penyebrangan	:	1 Unit
	Gudang Ikan	:	1 Unit
	Gudang Sarana Pasar	:	1 Unit
	Rumah Potong Unggas	:	1 Unit
	Kantor Bidang Pasar	:	1 Unit



	Hidran Umum	:	8 buah	
	Sarana Informasi Publik	:	Radio Land	1 unit
7	Pengelola Pasar	:	Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Bidang Pasar	
8	Jumlah Pedagang	:	Toko	: 1.269 Unit
		:	Kios	: 510 Unit
		:	Petak/Los	: 421 Unit
		:	PKL	: 431 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2022

Melalui pembinaan yang kontinyu dari Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terhadap pedagang yang ada di pasar (pedagang kaki lima dan asongan) yang meliputi kualitas dan mutu barang dagangan, serta perlindungan konsumen. Pembinaan dan pengamanan pasar tradisional di Payakumbuh juga melibatkan banyak pihak, antara lain pihak Kepolisian, para trantib pasar Bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan keamanan dan ketertiban sarana perdagangan secara langsung memiliki dampak baik terhadap kenyamanan area perdagangan yang berimbas pada peningkatan omset perdagangan di pasar-pasar Payakumbuh.


Keberpihakan Pemerintah Kota Payakumbuh semakin meningkat dalam mengembangkan perdagangan dan Pedagang kaki lima dan asongan di Kota Payakumbuh dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 terkait Penataan Pasar Tradisional.

Di samping itu cluster-cluster terhadap pedagang di sentra pasar Kota Payakumbuh dibina dengan kepastian identitas jenis usaha, serta fasilitasi untuk kerjasama antar daerah maupun antara pelaku perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sebagai tindak lanjut dari cluster ini juga disiapkan system zonasi perdagangan diwilayah Payakumbuh, berupa zona merah (untuk dilarang berdagang di lokasi tersebut), zona biru (untuk yang hanya diperbolehkan berdagang diatas pukul 15.00 wib) dan zona hijau (untuk wilayah yang diperbolehkan berdagang sepanjang waktu).

Gambar 3.10
Fasilitas Perdagangan Antar Daerah dan antar Negara

MENINGKATKAN KERJASAMA PERDAGANGAN

Penuhi Kebutuhan Jemaah Haji, Payakumbuh Siap Ekspor 480 Ton Bumbu Rendang

HAJI © Kamis, 20 Februari 2020 | 09:17 WIB  jabar@antaranews.com

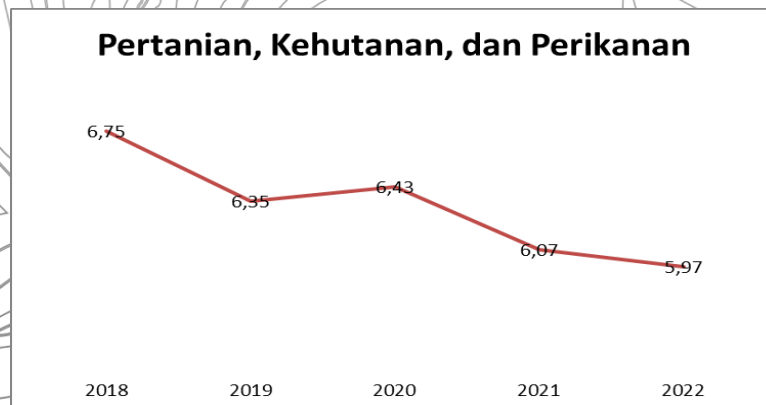
Koperasi Rendang Payo dengan Brand Iko Sero sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta pada Rabu (19/2/2020). Kerja sama itu difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).



2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian di kota Payakumbuh merupakan sektor yang tidak terlalu besar berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Payakumbuh, bahkan cenderung turun dari tahun ke tahun, namun sektor ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka mendukung sektor industri dan sektor perdagangan karena sektor pertanian menghasilkan bahan pangan yang nantinya akan diolah oleh sektor industri dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran.

Grafik 3.12
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2022 (data diolah)





Sebagai wilayah perkotaan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah 6,75 %, pada tahun 2019 turun menjadi 6,35%. Tahun 2020 naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 6,43 %, tahun 2021 turun lagi menjadi 6,07 % dan pada tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5,97 %. Angka ini masih cukup tinggi untuk daerah kota dan dibandingkan dengan daerah kota lainnya di Sumatera Barat.

Meningkatnya nilai produksi pertanian diharapkan akan berdampak pada sektor perdagangan dan sektor perindustrian. Untuk itu, setiap pengembangan komoditi pertanian akan memperhitungkan arah pengembangan industri olahan serta arah pengembangan pasar yang akan dilakukan. Begitu juga halnya dengan pengembangan pariwisata, dimana dalam struktur ekonomi digambarkan melalui data subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor Industri pengolahan, di kota Payakumbuh memiliki karakteristik kreatif dan budaya kerja yang relatif baik, industri yang berkembang seperti kuliner rendang, makanan ringan spesifik daerah seperti galamai, keripik dan kerupuk, tenunan dan kakau perlu dibina dan dikembangkan khususnya untuk proses hilirisasi seperti *packing*, *packaging*, branding, dan jaminan mutu.

Peluang dan kekuatan yang ada seperti keberadaan RPH modern, peternakan sapi Padang Mangateh mini *breeding farm*, budidaya komoditi yang mendukung untuk sektor industri pengolahan menjadi potensi yang perlu penanganan agar berkontribusi maksimal bagi kemakmuran masyarakat.

Peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan melalui dinas Pertanian diukur dengan 9 (sembilan) indikator sebagaimana tergambar pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	7,47	5,97	79,92	
2	Produksi padi	Ton	41.200	42.927	104,19	
3	Produksi cabe	Ton	905	1.337,61	147,8	
4	Produksi bawang	Ton	220	298	135,45	



5	Produksi Kakao	Ton	1.110	573,45	51,66	🟡
6	Produksi Jagung	Ton	2.950	2.863	97,05	👍
7	Jumlah sapi	Ekor	6.025	4.182	69,41	🟡
8	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	560	566,51	101,16	👍
9	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/tn	37	38,37	103,70	👍

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

Kinerja Dinas Pertanian pada tahun 2022 tercapai dengan baik, produksi padi, cabe bawang, ikan konsumsi dan angka konsumsi ikan realisasinya melebihi dari 100%, sedangkan jagung telah mencapai 97,05 %.

Produksi padi pada tahun 2022 masih cukup tinggi mencapai 42.927 ton Melebihi target yang ditetapkan sebesar 41.200 ton. Masih terjaganya produksi padi pada tahun 2022 didukung oleh beberapa faktor yaitu: Adanya Penerapan Program Upaya Khusus (UPSUS); Pemakaian pupuk berimbang; Pemakaian benih unggul yang berlabel; Pemakaian teknologi anjuran seperti penerapan jajar legowo dan padi tanam sebatang (PTS); Sistem pengairan yang baik; Sistem pengendalian hama terpadu (PHT); Penggunaan alat mesin pertanian; dan Penanganan panen.

Produksi cabe pada tahun 2022 adalah 1.337,61 ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 905 ton, dengan capaian 147,8%. Perhatian dan dukungan pemerintah dalam pengembangan komoditi cabe pada tahun 2022 di kota Payakumbuh masih sangat tinggi dengan berbagai program/kegiatan, pembinaan, dan kunjungan langsung kepada petani cabe. Selain itu, komoditi cabe juga menjadi komoditi yang dianjurkan untuk ditanam di pekarangan dan kelompok wanita tani, serta Kelompok Dasawisma.

Untuk produksi kakao hanya mencapai 51,66 % disebabkan tanaman kakao sudah banyak ditebang karena sudah tua dan tidak produktif lagi dan dialihkan menjadi tanaman lain seperti tanaman jagung dan hortikultura. Untuk komoditi bawang merah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, produksi pada tahun 2022 mencapai 298 ton tercapai sebesar 135,45 % dari target 220 ton.

Sedangkan pada bidang peternakan, jumlah populasi sapi menurun drastis akibat adanya wabah PMK dari target 6.025 ekor pada tahun 2022, terealisasi hanya 4.182 (69,41 %), selain ada ternak yang terkena wabah PMK,

masyarakat banyak yang menjual ternak karena ada keraguan sapi mereka akan terjangkau penyakit tersebut.

Meningkatnya pemanfaatan lahan kolam menyebabkan capaian indikator produksi ikan konsumsi pada tahun 2022 mencapai 101,16% dimana target adalah 560 ton dan terealisasi sebesar 566,51ton. sementara itu, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat makan ikan capaian angka konsumsi ikan adalah 103,70%, dari target 37 Kg/kap/thn terealisasi sebesar 38,37 Kg/kap/thn.

Berdasarkan uraian mengenai capaian produksi pertanian kota Payakumbuh tahun 2022 maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan produksi beberapa komoditi unggulan, namun ada juga beberapa komoditi yang mengalami penurunan, namun tidak menyebabkan kontribusi lapangan usaha atau sektor pertanian terhadap total PDRB keseluruhan menurun drastis. Faktor cuaca yang tidak menentu yang terjadi juga berpengaruh terhadap kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang menurun dibandingkan tahun 2016. Namun demikian, sektor pertanian dipandang mampu bertahan dimasa pandemi Covid-19, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya komoditi pertanian yang mengalami peningkatan produksi. Pandemi ternyata menjadi batu loncatan bagi sektor pertanian di semua daerah di Indonesia, khususnya di kota Payakumbuh untuk bisa semakin kuat. Kemajuan-kemajuan sektor pertanian harus terus dilakukan. Kondisi pasca pandemic bisa menjadi kemudahan dalam menghasilkan inovasi-inovasi lain setelah beradaptasi dengan pandemi.

Kebijakan tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan sebagai amanat dari UU No 41 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mendukung terhadap peningkatan produksi tanaman pangan khususnya Padi.

Tabel 3.39
Jumlah Teknologi yang Disampaikan oleh Penyuluh
Tahun 2018-2022

No	Sub sektor	Jumlah Teknologi (paket)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	22	23	23	76	24
2	Hortikultura	23	25	25	75	25

3	Perkebunan	16	17	17	50	10
4	Peternakan	21	23	23	62	26
5	Perikanan	12	13	13	13	13
Jumlah		92	94	100	100	98

Sumber: Dinas Pertanian, Data Diolahuntuk Tahun 2022

Peningkatan produktifitas komoditi pertanian erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi budidaya dan penerapan teknologi anjuran untuk masing-masing komoditi yang akan dikembangkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah: Pemakaian teknologi anjuran seperti penerapan jajar legowo dan padi tanam sebatang (PTS); Penggunaan alat mesin pertanian; Penanganan panen dan pasca panen (penurunan lossis). Hal ini didukung oleh data pada Tabel 3.39 yang menunjukkan peran penyuluh pertanian kota Payakumbuh dalam menyampaikan teknologi terapan pertanian kepada petani.

Tabel 3.40
Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan tahun 2018-2022

No	Sub sektor	Jumlah Teknologi (Paket)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	22	22	23	76	24
2	Hortikultura	23	23	24	75	25
3	Perkebunan	16	17	17	50	10
4	Peternakan	21	25	26	62	26
5	Perikanan	12	12	13	13	13

Sumber: Dinas Pertanian, 2022

Pada Tabel 3.40 terlihat perbandingan antara jumlah teknologi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian, namun belum sepenuhnya diterapkan oleh petani. Akan tetapi, hal initetap menjadi pendorong tingginya penerapan teknologi yang berdampak pada tingginya produktivitas komoditi pertanian di kota Payakumbuh. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana pertanian di kawasan pertanian. Kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat petani di Kota Payakumbuh juga terlihat dengan semakin meningkatnya sarana prasarana pertanian baik dari segi kuantitas maupun kulaitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di kota Payakumbuh. sebagaimana terlihat pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41
Jumlah dan Tipe Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun
pada Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	I. Irigasi tersier					
1	Payakumbuh barat	-	-	-	-	1 paket
2	Payakumbuh timur	-	-	-	-	2 paket
3	Payakumbuh utara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
4	Payakumbuh selatan	-	-	-	1 paket	1 paket
5	Latina	1 paket	-	-	-	1 paket
	II. Jalan usaha tani					
1	Payakumbuh barat	5 paket	-	-	1 paket	-
2	Payakumbuh timur	-	-	-	-	-
3	Payakumbuh utara	1 paket	-	-	-	-
4	Payakumbuh selatan	4 paket	-	-	-	-
5	Latina	6 paket	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, 2022

Selain sarana irigasi dan jalan usaha tani yang selalu dibenahi, secara teknis pemerintah kota Payakumbuh melalui Dinas Pertanian Kota Payakumbuh juga secara bertahap memberikan rangsangan kepada petani dengan pemberian bantuan bibit unggul, pupuk baik organik maupun anorganik maupun bantuan berupa fasilitasi kemudahan memperoleh alat mesin pertanian (alsintan) melalui UPTD Perbenihan dan Jasa Alsintan.

Minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup tinggi. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya sebagaimana Tabel 3.44. Namun, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian justru mengalami penurunan. Sebagai perwujudan peran Pemerintah dalam memfasilitasi perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan berbagai fasilitas di bidang pertanian kepada kelompok masyarakat petani yang membutuhkan pengembangan usaha dan permodalan.

Tabel 3.42
Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan
Di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Sub Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	101	124	146	147	153
2	Hortikultura	48	109	90	149	64
3	Bunhut	15	17	13	7	5
4	Perikanan	3	2	2	7	29
5	Peternakan	114	98	52	86	288
6	UP3HP	4	4	85	96	167
7	Poklahsar	2	1	2	5	2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2022

Dari Tabel 3.45 terlihat bahwa Jumlah Usaha Pertanian yang membutuhkan akses permodalan dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah Masyarakat Petani yang mengakses permodalan pada LKMA yang ada di Kota Payakumbuh. Namun karena keterbatasan terutama kelayakan usaha belum semuanya dapat diberikan bantuan tersebut, dari tahun 2018 - 2022 hanya 32 Gapoktan yang mendapat fasilitasi permodalan yang tersebar di 5 kecamatan sebagaimana Tabel 3.43 berikut :

Tabel 3.43
Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan
Di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Jumlah Awal Gapoktan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah awal yang difasilitasi		32	32	32	32	32
1	Payakumbuh barat	7	7	7	7	7
2	Payakumbuh timur	7	7	7	7	7
3	Payakumbuh utara	4	4	4	4	4
4	Payakumbuh selatan	9	9	9	9	9
5	Lamposi Tigo Nagori	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2022

Fasilitas permodalan pada Gapoktan sama dari tahun 2014 - 2022 karena merupakan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) yang disalurkan Kementerian Pertanian melalui LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang ada pada masing masing Gapoktan mulai tahun 2008-2010. Dana ini merupakan dana bergulir bagi anggota Gapoktan sebagai

modal dalam usaha budidaya pertanian, sehingga petani terhindar dari rentenir dan pinjaman dengan bunga tinggi. Untuk Payakumbuh Barat ada 7 Gapoktan yang difasilitasi, Payakumbuh Timur ada 7 Gapoktan, Payakumbuh Utara ada 4 Gapoktan, Payakumbuh Selatan ada 9 Gapoktan dan Lamposi Tigo Nagori ada 5 gapoktan.

Di samping itu, dalam meningkat produksi dan produktifitas sektor pertanian, juga telah difasilitasi penerapan teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, tidak hanya pada sektor pertanian saja, tapi juga pada sektor peternakan dan perikanan. Walaupun secara umum terjadi perubahan alih fungsi lahan pada sektor pertanian, namun minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup menggembarakan. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya sebagaimana Tabel 3.44 Namun, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian justru mengalami penurunan.

Tabel 3.44
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian
Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Jenis usaha/ komunitas	Kelompok yang mengusahakan (kelompok)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	175	175	177	171	167
2	Palawija	46	46	48	89	87
3	Hortikultura					
	- Sayuran	45	45	46	105	163
	- Buah-buahan	8	8	8	8	8
	- Tanaman hias	15	15	15	8	9
	- Biofarmaka	21	42	42	18	23
4	Peternakan					
	- Ternak besar	47	42	42	55	50
	- Unggas	40	4	4	30	35
5	Perikanan	3	30	35	35	38
6	UP3HP	6	6	6	15	15
7	Poklarsar	3	4	2	3	6
8	Perkebunan	24	24	24	29	29

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2022

Jumlah kelompok usaha pertanian tanaman padi tahun 2022 sebanyak 167 kelompok, turun dari tahun sebelumnya. Jumlah kelompok palawija adalah 87, turun sedikit dibandingkan dari tahun sebelumnya. Untuk kelompok hortikultura meningkat menjadi 203 kelompok, peternakan

50 untuk ternak besar dan 35 untuk ternak unggas, UP3HP sama dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 15 kelompok, Poklarsar naik menjadi 6 dan perkebunan 29 kelompok sama dengan tahun 2021.

Pada tabel 3.44 juga dapat dilihat perkembangan kelompok usaha pertanian di Kota Payakumbuh dari tahun 2018-2022 berfluktuasi antar jenis usaha yang dilaksanakan oleh petani di kota Payakumbuh bersifat sangat fleksibel, hal tersebut dipengaruhi ketersediaan air dan harga komoditi pertanian di pasaran. Petani padi pada musim tertentu beralih untuk menanam komoditi hortikultura seperti sayuran dan cabe. Disamping itu ada beberapa kelompok yang telah melakukan penggabungan sehingga jumlah kelompok menjadi berkurang. Untuk kota Payakumbuh jumlah kelompok tersebut sudah memadai yang perlu dilakukan adalah membina agar kelompok kelompok tersebut terus aktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan anggotanya.

Tabel 3.45
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Sektor	Tenaga Kerja (org)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	22.122	9.217	12.280	8.050	5.147
2	Hortikultura	3.723	1.563	2.064	2.682	1.118
3	Perkebunan	1.811	1.876	2.481	1.931	1.206
4	Peternakan	9.322	2.980	3.971	2.983	2.451
Jumlah		37.024	36.978	15.636	15.646	9.922

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2022

Dari Tabel 3.45 terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja sektor tanaman pangan (padi, Jagung) tahun 2022 adalah sebesar 5.147 orang. Jumlah tenaga kerja sektor hortikultura (Cabe, Bawang, Sayuran, dsb) sebesar 1.118 orang. Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan sebesar 1.206 orang. Jumlah tenaga kerja sektor peternakan sebesar 2.451 sehingga total tenaga kerja yang terserap sebesar 9.922 orang. Terjadinya pengurangan tenaga kerja disektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan karena mulai berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani dan lebih memilih profesi selain menjadi petani beralih kesektor ekonomi lain seperti

perdagangan dan jasa. Kebanyakan tenaga kerja di sektor pertanian merupakan petani penggarap bukan petani pemilik lahan sehingga mudah untuk berpindah ke sektor ekonomi lain.

Tabel 3.46
Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian
di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Jenis Keahlian	Jumlah (org)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pegawai Negeri Sipil						
1	Tanaman pangan	19	12	12	-	-
2	Peternakan	14	13	13	-	-
3	Perkebunan	1	-	-	-	-
4	Penyuluhan					
	- Pertanian	2	1	1	1	16
	- Peternakan	2	5	5	8	9
	- Perikanan	3	3	3	3	4
Tenaga Harian Lepas						
S1						
5	Tanaman pangan	-	-	-	-	11
6	Peternakan	-	-	-	-	8
D3						
7	Tanaman pangan	-	-	-	-	-
SMK						
8	Tanaman pangan	-	-	-	-	-
9	Peternakan	-	-	-	-	-
10	Tanaman pangan	11	11	11	-	-
11	Peternakan	8	8	8	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2022

Tahun 2022, jumlah penyuluh dengan dasar keilmuan tanaman pangan sebesar 16 orang, penyuluh dengan dasar keilmuan peternakan 9 orang, penyuluh dasar keilmuan perikanan berjumlah 4 orang. Jumlah penyuluh PNS tanaman pangan dan peternakan berkurang dari tahun sebelumnya karena adanya penyuluh yang pensiun dan pindah ke struktural. Sedangkan jumlah THL-TBPP tahun 2022 berjumlah 19 orang, sama dengan jumlah tahun sebelumnya dengan dasar keilmuan tanaman pangan sebanyak 11 orang dan dasar keilmuan peternakan sebanyak 8 orang.

Upaya-upaya lain untuk terus meningkatkan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2022 dilakukan keberlanjutan dari pengembangan 7 komoditi unggulan yaitu padi, jagung, cabe, bawang, kakao, ikan dan sapi.

Untuk peningkatan produksi cabe dan bawang merah akan dilakukan upaya-upaya intensifikasi pertanian serta penerapan teknologi yang tepat baik dalam budidaya serta dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Untuk komoditi kakao akan diarahkan pada peningkatan nilai jual biji kakao dengan teknologi fermentasi serta pengolahan lebih lanjut menjadi produk pangan. Pemerintah kota Payakumbuh dalam hal ini juga menunjukkan keseriusan dengan membentuk BUMD yang dapat menangani lebih profesional keenam komoditi ini. Untuk pengembangan sapi, dukungan dana dari pusat juga diperoleh dalam meningkatkan jumlah populasi sapi di Kota Payakumbuh. Komoditi pertanian yang dipilih ini tak lepas dari rencana hilirisasi makanan yang berasal dari komoditi ini yang sangat erat kaitannya dengan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Untuk itu dalam rencana aksi ke depan akan disinkronisasikan ketiga sektor ini dalam suatu perencanaan yang terintegrasi.

3. Penyediaan Akomodasi dan Makan minum

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatkan produktivitas suatu daerah. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sub sektor pariwisata dalam dokumen PDRB secara implisit terlihat pada sektor akomodasi makan minum dan sektor jasa lainnya. Kota Payakumbuh tidak mempunyai potensi pariwisata alam yang memadai, hanya terbatas di Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Namun, potensi pengembangan pariwisata kedepannya cukup besar, terutama wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh. Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun belum

memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

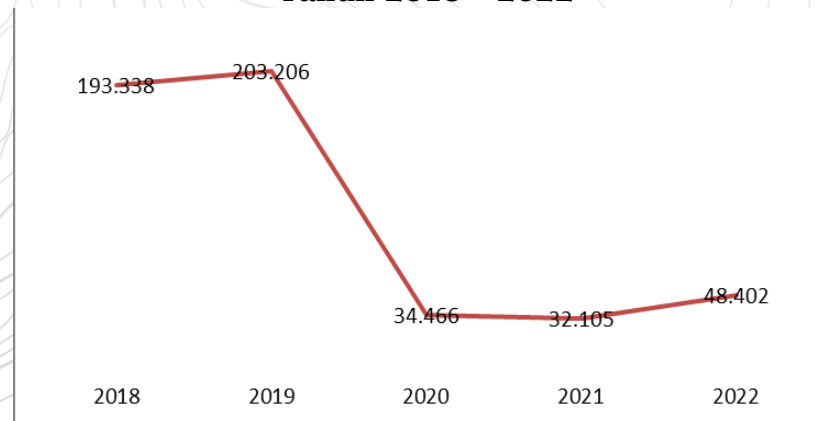
Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, namun untuk tahun 2022 seiring dengan semakin landainya pandemi Covid-19 dan pelanggaran PPKM, terjadi peningkatan kunjungan wisata menjadi 48.402 orang pada tahun 2022. Termasuk even-even pariwisata dan budaya yang dilaksanakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, terjadi peningkatan dari tahun 2021 menjadi 27 even, namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kunjungan wisata, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47
Data Kunjungan Wisatawan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan wisata	orang	193.502	203.389	34.479	32.110	48.402
	Kunjungan wisata asing	orang	164	183	13	5	-
	Kunjungan wisata domestik	orang	193.338	203.206	34.466	32.105	48.402
2	Jumlah objek wisata unggulan	buah	3	3	3	3	12
3	Jumlah restoran, rumah makan dan warteg	unit	176	187	189	188	188
4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	kali	12	24	1	7	27

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2022

Grafik 3.13
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik di Kota Payakumbuh
Tahun 2018 – 2022



Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2022 (data diolah)

Data kunjungan ini didapatkan dari jumlah karcis yang terjual pada 3 (tiga) lokasi objek wisata, yaitu : Panorama Ngalau Indah dan Ampangan serta Kolam Renang Ngalau Indah, dan dari jumlah wisatawan yang menghadiri setiap event kepariwisataan yang dilaksanakan.

Tabel 3.48
Laporan Pengunjung Hotel/Wisma Tahun 2020-2022

NO	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tamu Menginap		
				2020	2021	2022
1	Hotel Mangkuto	46	65	6.341	5.900	9.917
2	Hotel Bundo Kandung	54	104	762	2.607	3.199
3	Wisma Flamboyan	12	22	2.667	3.092	4.462
4	Hotel Farabi	12	12	756	2.891	3.288
5	Hotel Kolivera I	13	31	669	1.527	2.081
6	Hotel Kolivera II	15	24	584	1.463	2.041
7	Hotel Kolivera III	16	26	735	908	1.791
8	Hotel Kolivera IV	11	18		50	647
9	Hotel Sari I	18	34	844	1.256	2.268
10	Hotel Faradisa	16	32	444	1.363	1.154
11	Hotel Pondok Bambu	15	19	277	481	8.62
12	Hotel Hafara Inn	9	14	151	533	750
13	Grand Narasaki	23	31	1.098	1.150	1.817
14	Hotel Candano	12	18	76	451	413
Jumlah		272	450	36.195	15.404	34.690

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2022

Tingkat hunian pada 14 hotel Payakumbuh, tahun 2022 meningkat cukup tajam dibanding tahun 2021. Diperkirakan hotel ini masih meningkat

kunjungan karena digunakan untuk penginapan bagi keluarga yang melaksanakan hajjat pernikahan antar daerah dengan warga Payakumbuh di masa pandemi covid-19. Atraksi wisata sudah dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelum pandemi covid. Jika dilihat kecenderungan atraksi wisata yang dilaksanakan selama tahun perencanaan mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 saja yang menurun.

Tabel 3.49
Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Atraksi Wisata	14	15	6	14	15

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.11 Kawasan Olahraga Payakumbuh Bugar



Gambar 3.12 Prasarana olahraga Payakumbuh Bugar



Gambar 3.13 Stadion Mini

Daya tarik wisata alam berbasis kepada potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik ini meliputi gunung, lembah, air terjun, hutan, dan objek wisata yang masih alami. Kota Payakumbuh memiliki potensi keindahan dan kekayaan alam yang layak untuk dikembangkan. Keindahan dan kekayaan alam ini terbentang dalam bentuk keindahan panorama yang indah serta perbukitan dengan gunung-gunung yang menarik. Posisinya yang strategis merupakan perlintasan menuju ke Provinsi Riau dan ke Kota Bukittinggi. Kuliner merupakan salah satu ikon wisata di Kota Payakumbuh, selain itu ada wisata alam seperti Goa Ngalau dan wisata budaya di Kampung Budaya Koto Nan Gadang. Pada Tabel 3.50 disajikan potensi wisata di kota Payakumbuh.

Tabel 3.50

Potensi Wisata Kota Payakumbuh Menurut Jenis dan Spesifikasinya

No	Jenis	Spesifikasi	Alamat
1	Wisata Alam	Objek Wisata Ngalau Indah - Objek Wisata Ngalau Sampik - Objek Wisata Panorama Ampangan - Objek Wisata Puncak Marajo - Objek Wisata Kolam Renang - Objek Wisata Bukik Panjang/Patah Sembilan	Pakan Sinayan - Balai Panjang - Aur Kuning - Ngalau Indah - Pakan Sinayan - Air Tabik Payakumbuh
2	Wisata Sejarah	Jembatan Ratapan Ibu - Makam Pejuang	Ibuh - Balai Jariang Payakumbuh Utara


3	Wisata Budaya	Masjid Tuo Koto Nan Ampek (Masjid Gadang) - Perkampungan Minang Kabau Balai Kaliki - Rumah Gadang Tuanku Nan Chedoh atau Rumah Gadang Regent - Tugu Bukik Sibaluk - Makam – Makam 1. Niniak Nan Batigo 2. Bani Asyad M. Toha 3. Si Puti Elok 4. Abd. Alis M. Wongso 5. Medan Nan Bapaneh	Balai Nan Duo - Balai Kaliki - Balai Nan Duo - Balai Panjang - Payobadar - Limbukan - Koto Nan Gadang - Balai Nan Duo - Pakan Sinayan
4	Wisata Kuliner	Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada)	Pusat jajanan malam sepanjang Jalan Sudirman dan Soekarno Hatta
5	Wisata Alam Buatan	Bendung Talawi	Kecamatan Payakumbuh Utara
6	Wisata Tirta	Atlantik - Tara Pool - Taman Sahati	Payakumbuh Utara Payakumbuh Barat Payakumbuh Barat
7	Wisata Olahraga	Kolam Renang Prestasi - Lapangan Tenis Indoor - Lapangan Basket - GOR M. Yamin - Lapangan Bola Kaki - Lapangan Pacu Kuda	Ngalau Indah Kubu Gadang Kubu Gadang Kubu Gadang Kubu Gadang Kubu Gadang

4. Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja Urusan Perindustrian sebagaimana tergambar pada Tabel 3.51 dari ketiga indikator mengindikasikan capaian “sangat tinggi”.

Tabel 3.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	6,12	5,04	82,35	



2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	3,00	3,10	103,33	
3	Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri	buah	1	6	600	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Payakumbuh masih belum dapat dicapai sesuai dengan target karena masih belum pulihnya aktivitas bisnis pelaku IKM yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 diantara tahun 2019 hingga 2021 serta diperparah dengan terjadinya inflasi dan kenaikan harga BBM pada tahun 2022, meskipun pada kenyataannya terjadi penambahan jumlah pelaku usaha yang dulunya tahun 2021 berjumlah 1.928 unit usaha meningkat menjadi 2.369 unit usaha di tahun 2022. Atau bisa jadi peningkatan kontribusi sektor industry pengolahan masih jauh dibawah sektor lain seperti sektor jasa dan perdagangan yang mungkin juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.369 unit usaha, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

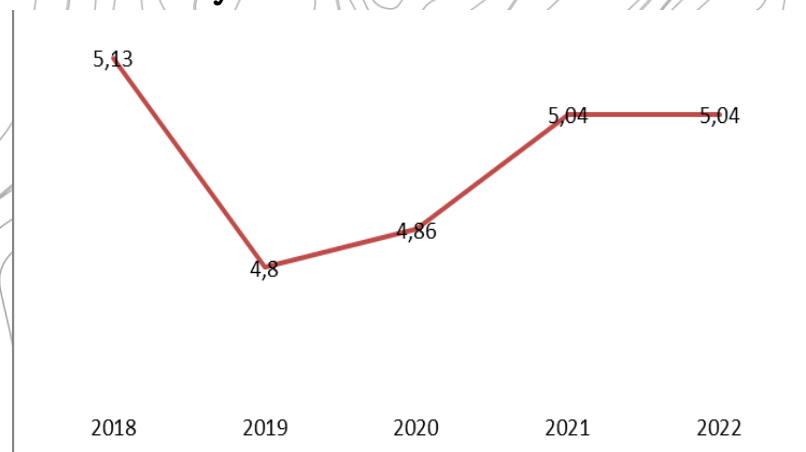
Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri realisasinya melebihi target, karena 6 IKM yang difasilitasi sertifikasi halal berhasil mendapatkan sertifikat halal. Capaian tahun ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena jumlah anggaran yang tersedia untuk fasilitasi sertifikasi IKM juga menurun. Tahun 2021 dana

fasilitasi tersedia sebesar 31.500.000 untuk 10 IKM masing-masing 1 produk, sementara di tahun 2022 hanya tersedia 20.760.000,- untuk 6 IKM masing-masing 1 produk.

Ditinjau dari PDRB sektor industri pengolahan termasuk sektor non basis, maju, namun pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Sumatera Barat. Telah dilakukan berbagai upaya percepatan pengembangan sektor industri pengolahan di kota Payakumbuh. Upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh mulai pada tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pembinaan IKM potensial melalui berbagai kegiatan-kegiatan strategis seperti Pengembangan kapasitas prana pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas produk IKM, penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri, Pembinaan kemampuan teknologi industri, Pengembangan dan pelayanan teknologi industri, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan mempercepat pertumbuhan sektor industri pengolahan di kota Payakumbuh.

Grafik 3.13
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (data diolah)



Gambar 3.14 Sentra Makanan Ringan dan Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022

Guna mempercepat pertumbuhan sektor industri pengolahan juga telah diimplementasikan dalam program **one produk one village (OVOP)** yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang di area kecamatan Lamposi Tigo Nagari, kampung tenun di area kelurahan Balai Panjang, sentra makanan ringan di area kelurahan Bulakan Balai Kandi dan kampung kerajinan bambu di area Kecamatan Payakumbuh Selatan. Ke depan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau Home Industry yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program one vilage produk (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu.

Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

Adapun perkembangan usaha industri di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.52
Data Perkembangan Industri Tahun 2018-2022
Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Unit Usaha	Unit	1.783	1.853	1.902	1.928	2,369
2.	Formal	unit	225	583	630	643	1,084
3.	NonFormal	unit	1.558	1.270	1.272	1.285	1,285
4.	Tenaga Kerja	orang	5.854	6.106	6.271	6.308	7,557
5.	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86.742.512	88.040.791	95.649.716	95.954.716	98,899,287
6.	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	337.720.000	342.785.800	257.089.350	296.463.459	305,561,059

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2022

Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Jumlah IKM meningkat tajam dari 1.928 unit usaha di tahun 2021 menjadi 2.369 unit usaha pada tahun 2022, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga pelaku usaha yang dulunya enggan mengurus perizinan menjadi terpaksa membuat izin usaha. Data IKM yang mengurus NIB ini diperoleh dari DPMPSTSP yang hanya bisa diperoleh dari data OSS per 31 Desember 2022.

Penambahan IKM sebanyak 441 unit usaha hanya terjadi di sektor industri formal saja. Pada tahun 2021 tercatat 643 unit usaha industri formal (industri yang memiliki perizinan) menjadi 1.084 unit usaha pada tahun 2022, meningkat tajam sebanyak 441 IKM (68%).

Sedangkan IKM sektor Non Formal tidak mengalami perubahan, barangkali disebabkan oleh belum dilaksanakannya pendataan ril IKM di Kota Payakumbuh sehingga fluktuasi/dinamika bertambah/berkurangnya jumlah IKM (baik formal maupun non formal) belum dapat diberikan.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya 1.928 menjadi 2.369 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.557 dari tahun sebelumnya, meningkat sebesar 19,8%.

Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha.

Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.369 unit usaha, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 1.928 unit usaha di tahun 2022 meningkat menjadi 2.369 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.557 dari tahun sebelumnya, meningkat sebesar 19,8%.

Tabel 3.53
Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2022

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging	14	57
2	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	6	13



3	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	19	80
4	Industri minyak dari Kelapa	5	5
5	Industri susu	2	11
6	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	20	31
7	Industri ransum pakan ternak/ikan	-	-
8	Industri konsentrat pakan ternak	6	16
9	Industri roti dan sejenisnya	120	397
10	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun dan sejenisnya	112	255
11	Industri pengolahan teh dan kopi	19	39
12	Industri es (macam-macam es)	7	17
13	Industri tempe	6	22
14	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kacang dan tempe (Industri Tahu)	63	268
15	Industri kerupuk dan sejenisnya	464	2,148
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	48	165
17	Industri kue basah	276	891
18	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	82	226
19	Industri minum ringan (Soft Drink)	14	33
20	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	33
21	Industri pengrajin kayu	11	36
22	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	3	9
23	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	12	32
24	Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan	115	188
25	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	3	7
26	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	2	2
27	Industri air minum dalam kemasan	73	177
28	Industri penggilingan padi	61	158
29	Industri percetakan	48	153
30	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	10	23
31	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	6	12
32	Industri batu bata dari tanah liat	21	58
33	Industri kapur	3	5
34	Industri barang-barang dari semen	93	182



35	Industri barang dari untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	4
36	Industri furniture dari kayu	126	427
37	Industri pemintalan benang	-	-
38	Industri pertenunan	12	58
39	Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi	51	153
40	Industri bordir/sulaman	16	62
41	Industri kain rajut	34	103
42	Industri pakaian jadi dari tekstil	136	352
43	Industri furniture dari logam	18	44
44	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	19	28
45	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	-	-
46	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang	128	319
47	Industri alat pertanian dari logam	3	10
48	Industri alat pertukangan dari logam	-	-
49	Industri alat-alat dapur	6	19
50	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	-	-
51	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3
52	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	7
53	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3	5
54	Industri penempatan pengepresan dan penggilingan logam	3	4
55	Industri mainan	-	-
56	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	29	86
57	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	24	96
58	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	3	8
59	Industri jasa reparasi jam	-	-
60	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (Mobil)	1	3
61	Industri bengkel/reparasi sepeda motor	4	10
62	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (Sepeda)	-	-
63	Industri jasa perorangan lainnya	2	7
64	Industri alat musik tradisional	-	-
Jumlah		2.369	7.557

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.15 Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.16 Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi Sentra IKM Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.17 Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022

5. Informatika dan Komunikasi

Perkembangan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Di samping itu juga mendorong meningkatnya lapangan usaha Komunikasi dan informatika dengan kontribusi 11,10 % menempati peringkat 4 dalam perekonomian Payakumbuh. Ketika pandemi Covid-19, banyak sektor usaha lain yang sangat tergantung dengan informasi dan komunikasi dalam mendukung usaha seperti, perdagangan, bisnis online, promosi wisata, jasa Pendidikan Kesehatan dan lain-lain. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika telah berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan pemerintahan. Pada tahun 2015 telah disusun Master Plan *E-Government* untuk periode Tahun 2015–2020, sehingga acuan pengembangan Teknologi Informatika (TI) di Kota Payakumbuh dapat terarah sesuai dokumen tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Jumlah Hotspot

Jumlah hotspot yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh dimulai dari 2013 sebanyak 1 unit dan terus ditingkatkan sampai tahun 2017 sudah ada sebanyak 15 unit. Mulai tahun 2017 ditingkatkan dengan titik hotspot Fiber Optic (FO) di meetingpoint untuk publik melalui hotspot PT Telkom, sedangkan pada tahun 2018 ditingkatkan dengan radio penerima dan pemancar pada 15 titik perkantoran. Pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 11 dan 12 titik yang diutamakan pada lokasi-lokasi prioritas saja dan untuk tahun 2022 meningkat menjadi 110 titik diseluruh perkantoran pemerintah kota Payakumbuh. Perkembangan dan lokasi penempatan hotspot tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.54 dan Tabel 3.55

Tabel 3.54
Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Hotspot	Unit	15	11	12	12	110

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2020

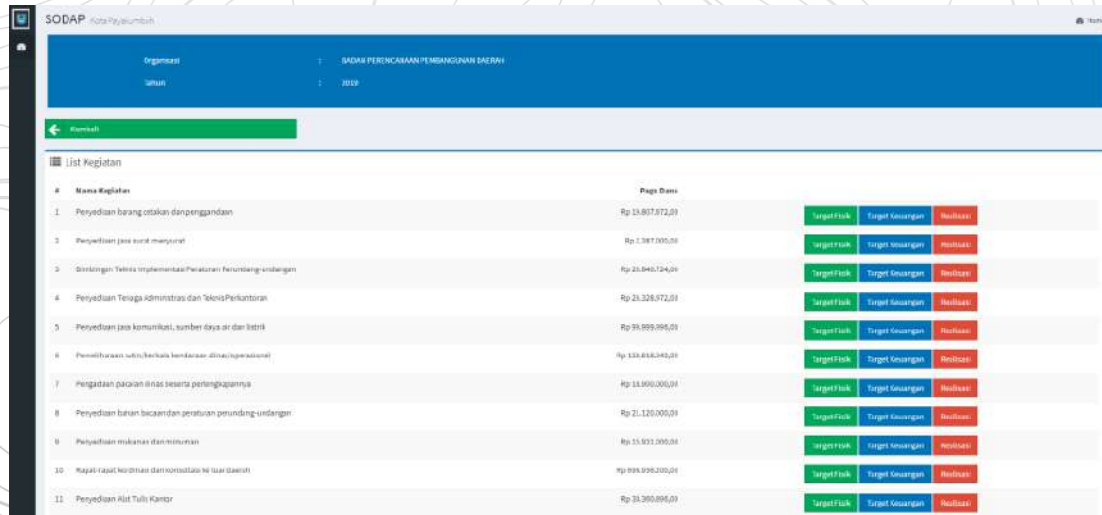
Tabel 3.55
Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Lokasi	Jenis	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	Intranet Hotspot	5
2	SKB	Intranet Hotspot	2
3	Bappeda	Intranet Hotspot	1
4	Bidang Pasar	Intranet Hotspot	1
5	Blud Fasilitas Pembiayaan	Intranet Hotspot	1
6	BPP Kec.Latina	Intranet Hotspot	1
7	BPP Kec.Payakumbuh Barat	Intranet Hotspot	1
8	BPP Kec.Payakumbuh Selatan	Intranet Hotspot	1
9	BPP Kec.Payakumbuh Timur	Intranet Hotspot	1
10	BPP Kec.Payakumbuh Utara	Intranet Hotspot	1
11	Bukik Sibaluik	Intranet Hotspot	6
12	Kecamatan Payakumbuh Timur	Intranet Hotspot	1
13	Kecamatan Payakumbuh Timur	Publik Hotspot	1
14	Kecamatan Payakumbuh Utara	Publik Hotspot	2
15	Kecamatan Payakumbuh Utara	Intranet Hotspot	1
16	Kecamatan Payakumbuh Barat	Publik Hotspot	1
17	Kecamatan Latina	Publik Hotspot	1
18	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Publik Hotspot	1
19	Dinas Kesehatan	Intranet Hotspot	1
20	Dinas Kominfo	Intranet Hotspot	5
21	DisNaker	Intranet Hotspot	3
22	Inspektorat	Intranet Hotspot	1
23	Kelurahan	Intranet Hotspot	47
24	Koperasi balaikota	Intranet Hotspot	1
25	Mal Pelayanan Public	Intranet Hotspot	5
26	Mal Pelayanan Public	Publik Hotspot	1
27	Puskesmas Air Tabit	Intranet Hotspot	1
28	Puskesmas Ibh	Intranet Hotspot	2
29	Puskesmas Lampasi	Intranet Hotspot	1
30	Puskesmas Padang Karambia	Intranet Hotspot	1
31	Puskesmas Parit Rantang	Intranet Hotspot	1
32	Puskesmas Payolansek	Intranet Hotspot	1
33	Puskesmas Tarok	Intranet Hotspot	2
34	Puskesmas Tiakar	Intranet Hotspot	2
35	Rumdin Wawa	Intranet Hotspot	1
36	Rumdin Wako	Intranet Hotspot	3
37	UPTD RPH Pasar Ternak	Intranet Hotspot	1
38	Dinas Pertanian	Intranet Hotspot	1
	Jumlah		110

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2022

b. Integrasi Sistem Informasi Teknologi

Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat melalui integrasi sistem informasi teknologi pada Sub Domain Web Resmi Kota Payakumbuh, yakni <http://www.payakumbuhkota.go.id>



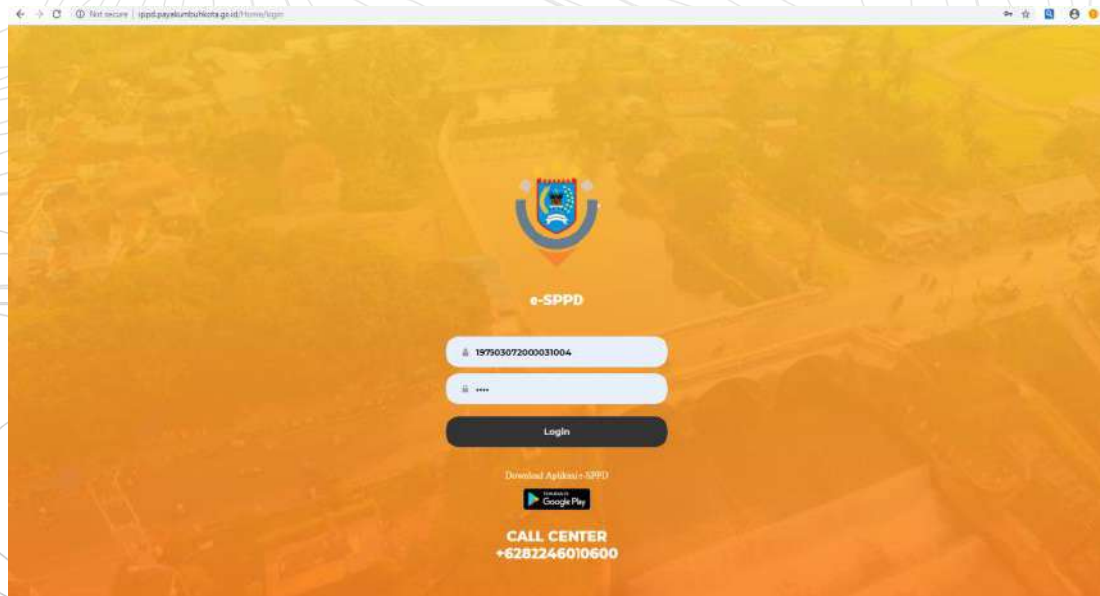
No	Nama Kegiatan	Page	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
1	Penyediaan barang otomotif dan penggantian	Rp 12.807.872,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
2	Penyediaan jasa sosial masyarakat	Rp 1.387.200,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
3	Diseminasi, Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 20.940.724,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
4	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Rp 23.328.872,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 39.999.998,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/pejabat	Rp 133.636.342,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
7	Hengatan pameran dinas beserta pertanggungjawabannya	Rp 13.900.000,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
8	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	Rp 21.120.000,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
9	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 15.933.200,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
10	Majalah rasmi kecamatan dan kecamatan ke luar daerah	Rp 899.498.200,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 33.390.800,00	Target Fisik	Target Keuangan	Realisasi

Gambar 3.18
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh

Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari :

- Aplikasi e-Musrenbang, e-Pokir, SIPPD dan SIPKD
- Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- Aplikasi CCTV Jalan Raya
- Aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi SETDAKO)
- Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)
- Aplikasi Kliping (Kominfo)
- Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- Aplikasi SIPADUKO (Kominfo)
- SMS Centre RSUD (Dinas Kesehatan)
- Aplikasi AKIP Online (BKPSDM)
- Aplikasi E-SPPD

- Aplikasi SODAP untuk Pengendalian dan Evaluasi
- Aplikasi E-Kinerja



Gambar 3.19
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD

6. Konstruksi

Sebagai tindak lanjut dari Perda RTRW yang sudah ada, maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah Kota Payakumbuh dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Pada tahun 2022, untuk 100 ha wilayah Kota terdapat 0,801 ha penggunaan lahan sudah mengikuti rencana tata ruang.

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Selama kurun waktu perencanaan dari tahun 2017-2020 ketaatan terhadap RTRW cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan

peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik

Tabel 3.56
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi RTRW (ha)	6.345,93	6.372,52	6.400,72	6.431,97	6.442,44
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3.	Rasio (:100)	78,90	79,23	79,58	79,97	80,10

Sumber : Dinas PUPR, 2022

Program yang Mendukung Pencapaian Target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri kabupaten/Kota;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
9. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan;
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
14. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
15. Program Perizinan Usaha Pertanian;
16. Program penyuluhan Pertanian;
17. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
18. Program Pemasaran Pariwisata;
19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Program Informasi dan Komunikasi Publik;

21. Program Aplikasi Informatika;
22. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
23. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rencana Aksi

- a. Revitalisasi dan mengembangkan sektor pertanian dan perikanan Sektor pertanian dan perikanan sebagai penyuplay bahan baku bagi industri, tempat pemasaran hasil hasil industri, dan menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan kualitas pasar pusat pertokoan dan pasar tradisional;
- c. Meningkatkan pembinaan berupa pelatihan tematik bagi UMKM terkait dengan pengembangan industri. UMKM sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi hampir sebesar 96% dari seluruh pelaku usaha di Payakumbuh;
- d. Melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku industri;
- e. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah;
- f. Menyediakan media untuk kerjasama antara pelaku industri dengan pihak swasta;
- g. Meningkatkan kegiatan pemasaran dan promosi produk secara *offline* maupun *online*;
- h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan terkait dengan ketersediaan bahan baku serta integrasi antara sisi hulu dan hilir;
- i. Meningkatkan pengembangan koperasi sebagai lembaga pendukung pengembangan sektor pertanian dan industri;
- j. Upaya meningkatkan lama tinggal wisatawan di kota Payakumbuh Dengan meningkatkan standar pelayanan hotel, sanitasi dan kepuasan konsumen dan juga diperlukan pembuatan standar dalam hal sanitasi dan kesehatan bagi rumah makan.

Sasaran 3. Meningkatnya investasi

Pemerintah harus merencanakan investasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, karena investasi juga sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Investasi

pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut.

Pembentukan daya tarik investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik investasi suatu negara atau daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

Sasaran ketiga pada tujuan kedua dan tujuan kedua RPD kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dapat dilihat dari indikator Nilai realisasi investasi (milyard Rp). Pencapaian target indikator ini dapat dilihat dalam Tabel 3.57

Tabel 3.57
Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Kategori	Target Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022	Capaian tahun 2022 thdp RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1.	Nilai Realisasi Investasi (Milyar rupiah)	417,24	203,8	199,70	97,99%	Sangat baik	1.190,5	111,58%

Sumber Data: BPS 2022 dan hasil monev perangkat daerah diolah

Target nilai realisasi investasi tahun 2022 adalah Rp. 203,8 Milyard realisasinya adalah Rp. 199,70 Milyard dengan capaian 97,99% kategori sangat baik. Realisasi ini memberikan sumbangan terhadap akumulasi capaian target 5 (lima) tahun pada RPJMD perubahan 2017-2022 menjadi sebesar 111,58%.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi sebagai salah satu faktor pembentuk penghasilan daerah dan berperan penting dalam menghela roda perekonomian daerah, maka dalam perumusan

dokumen perencanaan daerah secara makro dan perubahannya, indikator kinerja utama (IKU) “nilai realisasi investasi” tetap menjadi alat ukur. Oleh sebab itu di saat terjadinya evaluasi dan review yang bermuara ke perubahan dokumen perencanaan maka perlu dilaporkan realisasi dan capaian IKU dimaksud terhadap target yang dimuat pada dokumen perencanaan. Nilai realisasi Investasi tahun 2022 adalah 199,70 Milyar rupiah. Nilai capaiannya adalah 97,99% dengan kategori sangat baik. Peranan IKU ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD perubahan 2022 adalah 98,57%, hal ini dapat dijelaskan melalui uraian Tabel 3.58

Tabel 3.58
Capaian Realisasi Investasi tahun 2018-2022 dibandingkan akumulasi 5 tahun RPJMD Perubahan 2017-2022

Investasi	Tahun					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Target (Milyar Rp.)	231,50	250,60	74,40	200,90	203,80	1.190,50
Realisasi (Milyar Rp.)	231,50	250,60	74,40	417,24	199,70	1.173,44
capaian	100,00%	100,00%	100,00%	207,69%	97,99%	98,57%

Sumber : Perubahan RPJMD 2017-2022 dan data diolah

Investasi masih memiliki kendala baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama di Sumatera Barat termasuk di Kota Payakumbuh. Tiga masalah besar yang mengganggu investasi adalah soal tenaga kerja, konflik komunal, dan sengketa tanah. Sementara pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga iklim usaha harus terjaga. Status tanah ulayat selalu jadi momok oleh investor, ini mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2020 realisasi investasi di Kota Payakumbuh Rp 74,40 milyar, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp 250,60 milyar, namun melihat upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang memadai baik dari sisi pelayanan dan perijinan termasuk kenyamanan dan keamanan bagi investor, nilai realisasi ini belum optimal khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena ternyata realisasi investasi di tahun 2020 tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh di Tahun 2020 justru mengalami kontraksi menyentuh angka -1,66%. Pada tahun 2021, telah terjadi kenaikan nilai investasi mencapai angka Rp 417,24 milyar dan ini diperkirakan dapat mendorong kembali pertumbuhan ekonomi Kota

Payakumbuh pada angka 3,58%. Nilai realisasi investasi yang cukup besar ini belum dapat sepenuhnya mengembalikan kondisi perekonomian Kota Payakumbuh seperti sebelum adanya wabah Covid-19, perkembangan realisasi investasi dibanding pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel. 3.59

Tabel 3.59
Perkembangan Realisasi Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai realisasi investasi (Milyard Rp.)	milyar	231,5	250,6	178,3	417,24	199,70
2	Pertumbuhan ekonomi	%	6,02	5,92	-1,65	3,58	3,58

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PMD dan PTSP Kota Payakumbuh, 2022

Permasalahan investasi dan penanaman modal secara komprehensif di Payakumbuh meliputi :

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran daerah khususnya potensi investasi;
2. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
3. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
4. Masih rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
5. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi;

Di samping itu kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas, rendahnya pertumbuhan realisasi investasi, terbatasnya kepastian hukum dan pendukung usaha terutama tentang pajak, tanah, dan infrastruktur, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi, perlu menjadi perhatian pemerintah kota Payakumbuh.

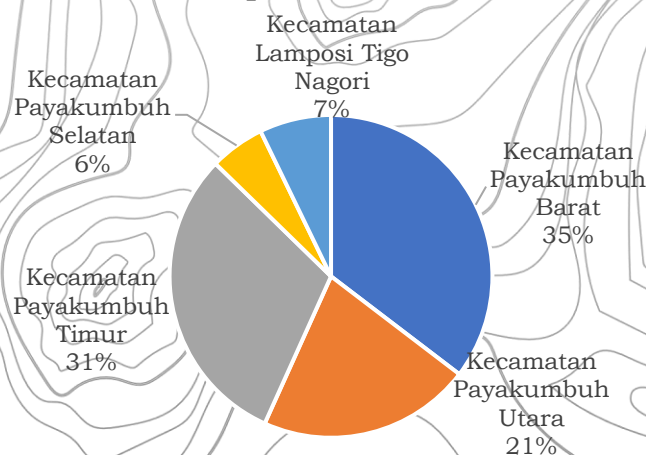
Tabel 3.60
Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah usaha	Modal (Rp)	%
1.	Kecamatan Payakumbuh Barat	154	Rp. 63.082.640.666	35,37
2.	Kecamatan Payakumbuh Utara	82	Rp. 38.105.691.045	21,37
3.	Kecamatan Payakumbuh Timur	65	Rp. 54.496.524.283	30,56
4.	Kecamatan Payakumbuh Selatan	22	Rp. 9.823.376.740	5,51
5.	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	15	Rp. 12.827.096.424	7,19
	Total	338	Rp. 178.335.329.158	100,00

Sumber Data : DPMPSTP tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.60 investasi terbesar di Kota Payakumbuh berada di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan nilai investasi Rp. 63.082.640.666,- atau sekitar 35,37%, pada urutan kedua adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Nilai Investasi Rp. 54.496.524.283,- atau sekitar 30,56% secara lebih jelas tergambar pada Grafik 3.15

Grafik 3.15
Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan
pada Tahun 2022



Sumber Data : DPMPSTP tahun 2022

Jumlah nilai realisasi investasi di Kota Payakumbuh selalu meningkat untuk setiap tahunnya. Hal ini dapat digambarkan pada Tabel 3.61





Tabel 3.61
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Payakumbuh tahun 2018-2022

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI (Milyard Rp.)	% PERTUMBUHAN
1	2018	231,50	0,93
2	2019	250,69	8,29
3	2020	178,34	-28,86
4	2021	417,24	207,68
5	2022	199,70	-52,14%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Untuk tahun 2022 ini terjadi Penurunan Jumlah Realisasi Investasi dari tahun 2021, yaitu sebesar **minus 52,14%**.

Tabel 3.62
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Jumlah investor	Orang	1.839	3.758	204,35	
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,50	96,63	102,25	
3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	%	4	2	200	
4	Nilai realisasi investasi	Milyar rupiah	200,9	417,24	207,68	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Dari 4 (empat) indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pada urusan ini, 4 (empat) indikator mencapai status “sangat tinggi”.

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh

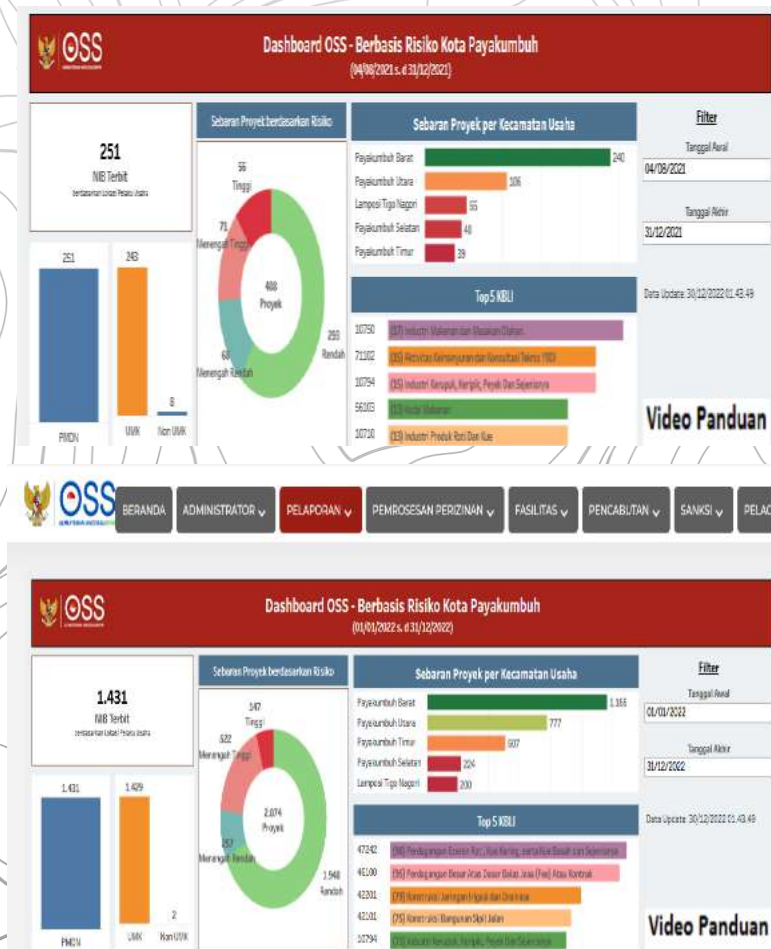
Penyelenggaraan perizinan terpadu di MPP kota Payakumbuh khususnya terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha sudah terselenggara melalui **Online Single Submission Risk-Based Approach** (OSS RBA-Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) menggantikan versi sebelumnya, yaitu OSS 1.1. Sesuai namanya, OSS-RBA, izin usaha akan dikeluarkan melalui pendekatan risiko, sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Penerbitan NIB OSS RBA di kota Payakumbuh sebagaimana tersaji pada Tabel 3.63

Tabel 3.63
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
pada Aplikasi OSS RBA 2022

No	Tahun	NIB terbit
1	2021	251
2	2022	1.431

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Terdapat peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sangat signifikan sejak penerapan OSS RBA, yaitu sebanyak 1.180 peningkatan NIB dimana tahun 2021 adalah 251 NIB dan tahun 2022 sebanyak 1.431 NIB. Data ini tercantum pada beranda aplikasi OSS RBA seperti pada Gambar 3.20



Gambar 3.20 Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Dari gambar tersebut jelas terlihat pelaku usaha di kota Payakumbuh 99,00% didominasi oleh usaha Mikro dan Kecil. Terdapat beberapa perubahan kualitas layanan sejak menggunakan aplikasi OSS RBA yaitu :

1. Pengukuran kecepatan untuk pelayanan pada tahun 2021 untuk penerbitan NIB memerlukan waktu lebih kurang 3 jam apabila tidak ada kendala sistem, untuk tahun 2022 penerbitan NIB melalui OSS RBA memerlukan waktu 30 menit untuk usaha mikro Perseorangan dan 60 menit untuk Non Perseorangan;
2. Guna kemudahan pelayanan pada tahun 2022 maka penerbitan NIB dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi di android yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan dapat dilakukan pengisian mandiri, dilaksanakan penerbitan langsung pada saat bimbingan teknis yang difasilitasi DPMPSTP, tahun 2021 untuk penerbitan NIB mayoritas di terbitkan di DPMPSTP hanya beberapa yang melakukan pengisian mandiri;



Gambar 3.21
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengurusan NIB Tahun 2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

3. Berkaitan dengan transparansi perizinan tahun 2022 untuk penerbitan NIB sangat transparan, petugas menjelaskan semua syarat untuk penerbitan NIB mandiri cukup dengan KTP, email, NPWP dan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp, pada tahun 2021

karena Sistem OSS RBA ini masih baru jadi belum semua perizinan berusaha dapat terakomodir dalam sistem dan aplikasi pendukung untuk entri mandiri hanya berupa **website oss.go.id** ;

4. Pengukuran kualitas untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah sangat baik pada tahun 2022 Sistem OSS sudah mengakomodir KKPR, izin lingkungan, serta PBUMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) bagi NIB yang memerlukan sertifikat standar/Izin. Pada tahun 2021 sistem OSS RBA belum bisa mengakomodir KKPR dan PBUMKU;
5. Penggunaan digitalisasi pelayanan pada tahun 2022 terjadi penambahan pelayanan digital untuk menunjang pelayanan digital seperti Pustaka digital yang ada di MPP, disamping aplikasi perizinan yang sudah ada sejak tahun 2021 seperti SICANTIK Cloud, SIMBG, OSS RBA , Sitarang, Aplikasi Antrian di MPP. Terjadi peningkatan kinerja 10% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.



Gambar 3.4
Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Salah satu gagasan cerdas sebagai strategi meningkatkan investasi ini adalah pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) dilaksanakan berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh terhadap sistem layanan informasi Rencana Tata Ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK), dan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan data awal bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh. Namun yang terjadi di kota Payakumbuh sebelum adanya inovasi SITARANG disaat investor sudah mendapatkan sering terjadi permasalahan dimana lokasi yang didapat tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan status lahanpun belum ada kejelasan legalitasnya (rata-rata lahan yang berstatus ulayat) sehingga lahan yang telah di tetapkan tidak bisa dibangun dan merugikan investor tersebut dan akhirnya berakibat engganannya investor khususnya dari luar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Hal inilah yang menjadi salah satu strategi bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan kepastian informasi yang merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pemerintah.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN		
Setelah Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha		
SEBELUM	SESUDAH	Keunggulan
1 WAKTU PELAYANAN KRK 14 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN KRK 7 HARI KERJA	Adanya kepastian waktu pelayanan
2 WAKTU PELAYANAN IMB 10 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN IMB 5 HARI KERJA	
3 MASIH MENGGUNAKAN PETA MANUAL SEHINGGA TINGKAT KETELITIAN MASIH RENDAH	TERINTEGRASI DENGAN PETA DIGITAL, BERBASIS TITIK KOORDINAT & PETA BIDANG TANAH BPN	Tidak ada intervensi, akurat, terukur, meminimalisir Kesalahan
4 DOKUMEN PETA BELUM DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	SUDAH DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	Dapat diakses semua pihak
5 BELUM ADA DATABASE PELAYANAN PENERBITAN	SUDAH MEMPUNYAI DATABASE PETA	Satu Referensi, Satu Standar

Gambar 3.23 SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI KOTA PAYAKUMBUH						
	Satuan	2018	2019	2020	2021	
		Proses Manual	SITARANG	SITARANG	SITARANG	
1 Jumlah investor berskala Menengah dan Besar	investor	22	6	38	139	
2 Nilai investasi berskala Menengah dan Besar	Rp Milyar	49,4	16,10	130,60	349.24	

PEMANFAATAN PETA DIGITAL SITARANG DALAM PELAYANAN PENERBITAN IMB DAN PBG	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAKSES LAYANAN			KEMANFAATAN
	2019	2020	2021	
	MANUAL	SITARANG	SITARANG	
	568	600	880	Kemudahan mendapatkan informasi peruntukan ruang oleh masyarakat yang dapat diakses dimana saja secara online Dan Mempercepat Proses Perizinan.

Gambar 3.24

Peningkatan kualitas Pelayanan Investasi melalui aplikasi SITARANG

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022 (*menunggu update dari DPMDPTSP kondisi desember 2022*)

Program yang Mendukung Pencapaian Target

- a) Program Promosi Penanaman Modal;
- b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- d) Program Pelayanan Penanaman Modal
- e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya realisasi investasi di Kota Payakumbuh disebabkan oleh beberapa faktor :

- a) Membaiknya perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh, yang membuat investor semakin bergairah berinvestasi di Kota Payakumbuh.
- b) Kegiatan promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha;
- c) Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Payakumbuh melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP)**;
- d) Terwujudnya penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMD PTSP) yang dibuktikan dengan penghargaan layanan terbaik 1 nasional.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Strategi yang dibangun sesuai RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dalam rangka meningkatkan realisasi investasi adalah dengan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi

Misi 3 : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan

Tujuan : tujuan misi ini adalah meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan sasaran pembangunan yaitu : meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Misi ini diarahkan pada pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Apapun bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seoptimal mungkin diupayakan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya dengan pembangunan justru kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial Kota Payakumbuh akan semakin baik dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan dalam penataan kota, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan sebaliknya. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup digunakan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environment Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara dan (3) Kualitas Tutupan Lahan. Kriteria dan parameter untuk masing-masing indikator perhitungan IKLH sebagai berikut ini :

Tabel 3.64
Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ ; SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (PU - 0.1) \right)$ <p>PU = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂ PU = Indeks Pencemar Udara</p>
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan (TH); Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH)	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>DKK = \sum Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p> <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{L_{avg}\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{L_{avg}\ PRG}{L_{avg}\ PRG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{L_{avg}\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_PRG_Bakar}{L_{avg}\ PRG}$</p>

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Perhitungan Capaian Indikator

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan rumusan di bawah ini :

$$IKLH\ Kota = (0.376)IKA + (0.405)IKU + (0.219)IKL$$

Cara Perolehan Data :

- Data IKA** diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau,

Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua.

2. **Data IKU** diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler.
3. **Data IKTL** diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air diambil dari hasil pengujian kualitas air di beberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKA Kota Payakumbuh ini merupakan kontribusi dari data kualitas air ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, untuk Kota Payakumbuh Perhitungan Indeks Kualitas vegetasi. air dilakukan dengan mengambil 35 sampel uji kualitas air pada 7 (tujuh) sungai yang melintas di Kota Payakumbuh yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua. Dengan hasil uji sebagaimana tabel 3.65 dan tabel 3.66.

Tabel 3.65
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Titik Sampling	Persentase	Bobot Nilai	IKA
Memenuhi	10	29%	70	20
Ringan	24	69%	50	34,29
Sedang	1	2%	30	0,86
Berat	0	0%	10	0
Total	35	100%		
Indek Kualitas Air				55,14

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 3.66
Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memu- nuhi	Ringa- n	Seda- ng	Berat	Memu- uhi	Ringa- n	Sedan- g	Berat	
1	Kota Pariaman	0	7	28	1	0	9.72	23.33	0.28	33.33
2	Kota Bukittinggi	0	7	15	7	0	12.07	15.52	2.41	30
3	Kota Payakumbuh	10	24	1	0	20	34.29	0.86	0	55.14
4	Kabupaten Solok Selatan	5	2	2	0	38.89	11.11	6.67	0	56.67
5	Kabupaten Dharmas Raya	8	46	4	0	9.66	39.66	2.07	0	51.38
6	Kabupaten Solok	5	19	0	0	14.58	39.58	0	0	54.17
7	Kabupaten Sijunjung	24	28	3	0	30.55	25.45	1.64	0	57.64
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	18	46	0	0	19.69	35.94	0	0	55.63
9	Kabupaten Pasaman	13	8	0	0	43.33	19.05	0	0	62.38
10	Kabupaten Pesisir Selatan	53	10	0	0	58.89	7.94	0	0	66.83
11	Kabupaten Padang Pariaman	4	17	0	0	13.33	40.48	0	0	53.81
12	Kabupaten Tanah Datar	17	29	0	0	25.87	31.52	0	0	57.39
13	Kota Sawah Lunto	3	16	1	0	10.5	40	1.5	0	52
14	Kota Solok	1	23	0	0	2.92	47.92	0	0	50.83
15	Kabupaten Pasaman Barat	19	12	1	0	41.56	18.75	0.94	0	61.25
16	Kota Padang	55	11	0	0	58.33	8.33	0	0	66.67
17	Kabupaten Agam	55	37	2	0	40.96	19.68	0.64	0	61.28
18	Kota Padang Panjang	7	35	19	0	8.03	28.69	9.34	0	46.07
Sumatera Barat		297	377	76	8	24.28	26.12	3.47	0.15	54.03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKU Kota Payakumbuh ini merupakan kontribusi dari data kualitas udara ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.67 berikut;

Tabel 3.67
Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (Âµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Âµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (Âµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Âµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kota Pariaman	5	5.04	0.12	0.25	0.19	95.09
2	Kabupaten Pesisir Selatan	5.72	6.59	0.14	0.33	0.24	92.43
3	Kabupaten Solok	7.31	7.15	0.18	0.36	0.27	90.55
4	Kabupaten Solok Selatan	3.94	7.86	0.1	0.39	0.25	91.9
5	Kabupaten Sijunjung	7.33	4.29	0.18	0.21	0.2	94.51
6	Kabupaten Tanah Datar	7.56	6.66	0.19	0.33	0.26	91.06
7	Kabupaten Padang Pariaman	5.3	5.75	0.13	0.29	0.21	93.89
8	Kabupaten Agam	5.59	7.73	0.14	0.39	0.26	90.94
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.32	5.6	0.21	0.28	0.24	92
10	Kabupaten Pasaman	4.22	6.61	0.11	0.33	0.22	93.44
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.08	7.74	0.08	0.39	0.23	92.68
12	Kabupaten Dharmas Raya	10.29	9.42	0.26	0.47	0.36	85.32
13	Kabupaten Pasaman Barat	7.21	4.46	0.18	0.22	0.2	94.36
14	Kota Solok	7.18	6.84	0.18	0.34	0.26	91.07
15	Kota Sawah Lunto	6.17	10.28	0.15	0.51	0.33	87
16	Kota Padang Panjang	6.17	7.19	0.15	0.36	0.26	91.29
17	Kota Bukittinggi	8.24	8.6	0.21	0.43	0.32	87.89
18	Kota Payakumbuh	6.6	5.66	0.16	0.28	0.22	93.11
19	Kota Padang	13.12	16.25	0.33	0.81	0.57	73.87
	Sumatera Barat	6.76	7.75	0.17	0.37	0.27	90.65

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh berada di angka 93,11 merupakan angka tertinggi kedua bila dibandingkan dengan 6 (enam) Kota dan diperingkat ke 6 (enam) di Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di Kota Payakumbuh masih dapat dikendalikan.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh dari analisis foto citra satelit terhadap tutupan vegetasi. Data ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang setiap tahun melakukan penghitungan IKTL Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada tabel 3.68:

Tabel 3.68
Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Agam	0.28	47.88	-0.00143057	0.27843598	48.01
2	Kabupaten Dharmas Raya	0.22	42.7	0	0.220769133	42.7
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.77	93.21	0	0.769225876	93.21
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	0.44	62.53	0	0.436108128	62.53
5	Kabupaten Padang Pariaman	0.19	39.76	0	0.188775168	39.76
6	Kabupaten Pasaman	0.59	76.56	0	0.588473495	76.56
7	Kabupaten Pasaman Barat	0.26	46.66	-0.001659916	0.265391629	46.81
8	Kabupaten Pesisir Selatan	0.52	70.15	-0.000587822	0.519451434	70.21
9	Kabupaten Sijunjung	0.47	65.58	0	0.469200096	65.58
10	Kabupaten Solok	0.55	72.96	0	0.549360805	72.96
11	Kabupaten Solok Selatan	0.57	75.07	0	0.572284097	75.07
12	Kabupaten Tanah Datar	0.32	52.26	0	0.32452602	52.26
13	Kota Bukittinggi	0	22.38	0	0	22.38
14	Kota Padang	0.54	72.34	0	0.542627918	72.34
15	Kota Padang Panjang	0.37	56.18	0	0.367112937	56.18
16	Kota Pariaman	0.02	24.24	0	0.02027788	24.24
17	Kota Payakumbuh	0.04	25.78	0	0.036949782	25.78
18	Kota Sawah Lunto	0.16	37.01	0	0.158936487	37.01
19	Kota Solok	0.17	38.3	0	0.172942921	38.3
	Sumatera Barat	0.34	53.77	-0.00019	0.341097357	53.78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota pada tahun 2022 diangka 25, 78 meningkat sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya ini merupakan bukti bahwa Kota Payakumbuh komit dalam pelaksanaan gerakan penanaman pohon setiap tahunnya untuk mengimbangi perkembangan permukiman

Analisis Capaian Indikator

Dengan telah diperolehnya angka untuk Indeks Kualitas Air (IKA) adalah **55,14**, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah **93,11** dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah **25,78** maka perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0,376) \text{IKA} + (0,405) \text{IKU} + (0,219) \text{IKTL}$$

$$\text{IKLH} = (0,376 \times 55,14) + (0,405 \times 93,11) + (0,219 \times 25,78)$$

$$\text{IKLH} = 20,733 + 37,310 + 5,546$$

Dari perhitungan tabel diatas, maka **nilai IKLH** adalah **64,09**

Tabel 3.69
Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir RPJMD	Capaian tahun 2022 terhadap RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian %	Kategori		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,34	58,59	64,09	109,39	Sangat Baik	58,59	109,39

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 64,09, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 dengan target pada RPJMD sebesar 58,59 capaiannya IKLH pada tahun 2022 adalah 109,39% dengan kategori sangat baik

Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengklasifian peringkat IKLH disusun secara Nasional berdasarkan Nilai IKA, IKU dan IKTL . Predikat IKLH dikategorikan dalam beberapa klas sebagai berikut :

Tabel 3.70
Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5	Sangat Tidak Baik	40 < IKLH ≤ 50
6	Waspada	30 < IKLH ≤ 40

Sumber : IKLH Nasional, 2018

Dengan melihat perbandingan angka IKLH Payakumbuh Tahun 2022 dengan Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan, maka Nilai IKLH sebesar **64,09** berada pada Predikat **CUKUP BAIK**.

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 didukung oleh :

a. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup melalui 7 (tujuh) Program

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Pengelolaan Persampahan

b. Dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 4 (empat) Program

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

c. Dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 7(tujuh) Program

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Pemukiman
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

d. Dukungan Dinas Perhubungan melalui 1 (satu) Program

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

e. Dukungan Satuan Polisi Pamong Praja melalui 1 (satu) Program

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Katertiban Umum

Permasalahan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh tahun 2022 jika dibandingkan pada target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 telah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang mungkin jadi penyebab yang mempengaruhi IKLH adalah :

1. Dari tiga indikator yang menjadi agregat pembentuk IKLH, Indikator Kualitas Udara, Indikator Kualitas Tutupan Lahan dan Indikator Kualitas Air pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021. Pada tahun 2021 sampel yang diambil adalah 16 titik yang berada di 7 sungai dengan hasil pengujian kualitas air 10 titik sampel yang tercemar ringan dan 6 titik yang tercemar sedang. Di tahun 2022 dari 7 sungai sampel yang diambil sebanyak 35 titik dimana 10 titik memenuhi, 24 titik tercemar ringan dan 1 tercemar sedang, secara indeks mengalami kenaikan namun masih ada status tercemar ringan

dan sedang. Dari pengamatan dilapangan masih ditemukan di beberapa titik yang berdekatan dengan sempadan sungai terdapat beberapa industri-indutri kecil pengolahan makanan dan perbengkelan yang masih belum melakukan pengolahan terhadap limbahnya.

2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat pelaku indutri kecil menengah maupun indutri rumah tangga dan pelaku usaha perbengkelan dan cucian moobil dan motor tentang pentingnya penanganan limbah yang mereka hasilkan dari aktifitas usaha mereka.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan pengolahan sampah rumah tangga sehingga belum mampu mengurangi timbulan sampah dari sumber rumah tangga secara simultan.
4. Masih banyaknya terdapat septictank yang belum kedap, sehingga masih berpotensi mencemaran air tanah dan air sungai.
5. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu diluar wilayah Kota Payakumbuh.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Terkait dengan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2022 yang sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih belum signifikan, masih diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dijadikan sebagai pedoman kinerja ditahun mendatang, antara lain :

1. Penyiapan fasilitas pengukuran kualitas air dan kualitas udara yang terstandarisasi dan terakreditasi sehingga dapat menghasilkan data ukuran yang absah. Hal ini menjadi dasar berpijak dalam pengembangan lualitas air dan udara di beberapa titik di wilayah kota Payakumbuh.
2. Penguatan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendidikan serta latihan.
4. Perlunya peningkatan pemahaman pelaku indutri pengolahan

makanan skala IKM dan pelaku usaha perbengkelan dan cuci motor tentang penanganan limbah yang mereka hasilkan agar tidak sampai mencemari air permukaan.

5. Peningkatan pemahaman masyarakat untuk tetap menjaga kualitas udara dan kualitas air, menyiapkan resapan-resapan yang baik, membudayakan penanaman kembali pepohonan di lahan-lahan masyarakat untuk mendapatkan tutupan lahan yang semakin baik.
6. Menyiapkan program-program konservasi di Dinas Terkait secara berkesinambungan.
7. Peningkatan pembangunan Septictank aman dan kedap sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Gambar 3.24
Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2022



Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan 7 ribu bibit pohon untuk ditanam bersama warga



World Cleanup Day 2022: Masyarakat Payakumbuh Kumpulkan sampah Sepanjang Sungai Batang Agam



Penataan pohon pelindung di Taman Kota



Momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) bulan disikapi dengan mengadakan Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS)



Penanda tangani komitmen gerakan menuju Stop BABS berkelanjutan dan menerapkan septictank aman



Momentum Momentum hari Ulang tahun kota dan Bulan menanam pohon serta Quickwin Starategi Sanitasi Kota Payakumbuh



Momentum Momentum hari Ulang tahun kota dan Bulan menanam pohon langsung oleh Pj Walikota



Momentum Momentum hari Ulang tahun kota dan Bulan menanam pohon



Pengambilan sampel uji kualitas air



Pengambilan sampel uji kualitas limbah rumah Tangga



Pengambilan sampel uji kualitas air



Pengambilan sampel uji kualitas air



Alat pemantau kualitas air



Alat pemantau kualitas air



Gotong royong pengumpulan sampah disepanjang Sungai Batang Agam



Gotong Royong Komunitas Peduli Sungai (KOMPAS) Kota Payakumbuh

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik & Bersih

Tujuan : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi (RB)

Misi ini merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan, mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur dan menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik. Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Payakumbuh merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, menghilangkan praktek KKN secara menyeluruh di semua unit dan bidang kerja pemerintah daerah. Perencanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah diselaraskan dengan Road Map Nasional 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

Guna mencapai tujuan Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi, diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut

Tabel 3.71
Sasaran dan Indikator Misi 4 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1.	Meningkatnya Akuntabilitas layanan pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	
		Indeks SPBE	2,50	
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK	WTP	

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing indikator sasaran pada Misi 4 ini diuraikan pada Tabel 3.72

Tabel 3.72
Data Capaian Indikator Sasaran Misi 4 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2021 thdp RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	BB	100	Sangat Baik	BB	100,00
2	Indeks SPBE	2,42	2,50	3,02	120,8	Sangat Baik	2,50	120,80
3	Indeks Pelayanan Publik	4,39	4,51	4,56	103,87	Sangat Baik	4,51	103,87
4	Opini LKPD dari BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik	WTP	100,00

Sumber : Kemenpan RB, BPK RI

Sasaran 7 : Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan sasaran Reformasi Birokrasi berupa Birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

Selanjutnya guna mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024, perbaikan layanan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan. Akuntabilitas sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Disamping itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan diterima. Tolak ukur atau indikator yang digunakan dalam sasaran ini yaitu Nilai Evaluasi AKIP Kota, Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.73

Tabel 3.73
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2021 thdp RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	BB	100	Sangat Baik	BB	100
2	Indeks SPBE	2,42	2,50	3,02	120,8	Sangat Baik	2,50	120,8
3	Indeks Pelayanan Publik	4,39	4,51	4,56	103,87	Sangat Baik	4,51	103,87
Rata-rata						108,22%		

Sumber data : Kementerian PANRB, 2022

Sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Nilai evaluasi AKIP Kota

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan evaluasi AKIP adalah untuk menilai mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

- a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Disamping itu tujuan evaluasi AKIP juga untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel 3.74
Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	71,66	BB
2	2019	72,75	BB
3	2020	72,99	BB
4	2021	73,46	BB
5	2022	73,46*)	BB

Sumber : Kementerian PAN&RB

*) Nilai SAKIP Tahun 2022, menunggu LHE AKIP oleh KemenpanRB

Berdasarkan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB tahun 2022 terhadap implementasi SAKIP Kota Payakumbuh, Kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh pada tahun 2022 memperoleh predikat Nilai “BB”. Hasil tersebut diumumkan bersamaan dengan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi oleh

Kementerian PANRB pada tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta. Namun untuk rincian nilai dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh termasuk dalam tiga daerah yang telah memperoleh nilai BB. Berikut capaian nilai AKIP dan RB Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2022.

Tabel 3.75
Nilai Evaluasi SAKIP dan RB Kabupaten/ Kota
di Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Nilai RB
1	Kota Padang	BB	BB
2	Kota Payakumbuh	BB	B
3	Kota Bukittinggi	BB	B
4	Kota Pariaman	B	B
5	Kab. Solok	B	B
6	Kota Solok	B	B
7	Kab. Tanah datar	B	B
8	Kab. Padang Pariaman	B	B
9	Kab. Agam	B	CC
10	Kab. Pasaman	B	CC
11	Kab. Sijunjung	B	CC
12	Kab. Lima Puluh Kota	B	CC
13	Kab. Pesisir selatan	B	CC
14	Kab. Kepulauan Mentawai	B	CC
15	Kota Sawahlunto	B	CC
16	Kota Padang Panjang	B	CC
17	Kab. Dharmasraya	B	CC
18	Kab. Pasaman Barat	B	CC
19	Kab. Solok selatan	CC	C
	Prov. Sumatera Barat	BB	B

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2022

Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah 100% dengan kategori sangat baik. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh dan telah mengacu kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena rincian penilaian untuk komponen yang dinilai mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Langkah perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 antara lain :

- a. Melakukan reviu atas keselarasan antara sasaran strategis, program dan kegiatan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu :

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang baru berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dimana dalam proses penyusunan dokumen telah menggunakan konsep THIS (Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial) dan diturunkan kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
2. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD), merupakan dokumen perencanaan jangka menengah bagi daerah yang masa jabatan walikota selesai tahun 2022. Selanjutnya dilakukan review terhadap dokumen turunan RPD sampai ke level perangkat daerah;

3. Penggunaan anggaran telah mempedomani prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 serta Perubahan RKPD Tahun 2022 mengacu pada kinerja perangkat daerah pada triwulan II dan memastikan Tahunan program dan kegiatan telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.



Gambar 3.25
Pembahasan Keselarasan Antara Sasaran Strategis, Program Dan Kegiatan dalam Penyusunan RKPD

- b. Meningkatkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar-menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, selanjutnya memberikan *reward and punishment* bagi pimpinan sesuai komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam meningkatkan kinerja.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :

1. Melaksanakan dialog kinerja dalam penyusunan target kinerja denganyang efektif pendampingan serta melakukan verifikasi perubahan Renja perangkat daerah untuk mewujudkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja;



Gambar 3.26
Pelaksanaan Dialog Kinerja

2. Pemberian Reward terhadap Perangkat Daerah berkinerja tinggi.

Hal ini dilaksanakan dalam bentuk penyerahan Anugerah Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan Terinovasi, Inovator, dan Inisiator Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dimana inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 4 (empat) kategori yang mendapat



penghargaan, yakni Kategori Perangkat Daerah Terinovasi dengan juara pertama Dinas Pertanian, disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kategori kedua yaitu Kecamatan terinovator yang diraih Kecamatan Payakumbuh Utara. Selanjutnya kategori ASN Terinovator yaitu Eka Diana Rilva, ST, M.Eng dari Dinas PUPR dengan inovasi Sitarang serta Faisal, ST dari Bappeda Kota Payakumbuh dengan inovasi Data

Spasial Terintegrasi. Untuk kategori ASN Supporting Dan Inisiator Penyelenggaraan Inovasi diraih oleh Fifella Aziza, S.T, M.Eng, MSc dari Dinas PUPR dengan lingkup inovasi yang dikelola sebanyak 11 inovasi dan Sri polya Kettipusem, S.ST.Ars dari Dinas Pertanian dengan lingkup inovasi yang dikelola sebanyak 7 inovasi.



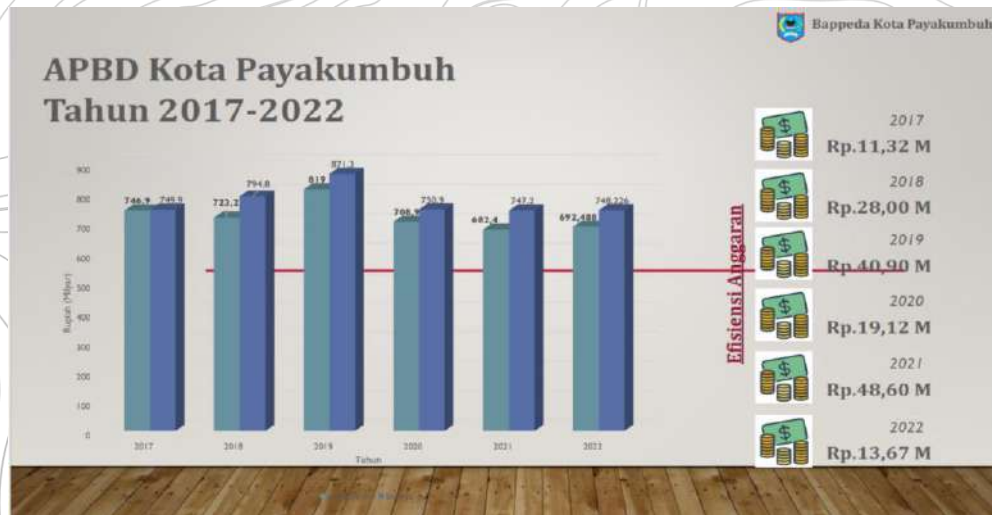
Gambar 3.27
Penyerahan Reward Perangkat Daerah dan ASN Terinovator

- c. Melakukan penghapusan program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis kerangka logis penjabaran kinerja dalam rangka refocusing program/ kegiatan untuk menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :
1. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 telah melakukan penghapusan sub-sub kegiatan yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh dengan mengacu kepada Pohon Kinerja Kota dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;



2. Melakukan Refocusing anggaran mengacu kepada cascading dan pohon kinerja berupa penghapusan dan refocusing sub kegiatan yang tidak

memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja melalui verifikasi renja maupun RKA yang diimplementasikan dalam DPA perubahan 2022 sebesar 13,67% dari APBD



d. Memperbaiki indikator kinerja individu menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi khususnya pada aplikasi pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjadikan proses *reward and punishment* yang dilakukan akan sesuai dengan besaran kontribusi yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya .

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :

1. Penyusunan indikator kinerja individu sudah mengacu kepada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kode Rekening dan Nomenklatur Program dan Kegiatan, serta

Penetapan Indikator kinerja Individu juga telah mengacu kepada Peraturan PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dimana Perjanjian Kinerja pegawai sudah diselaraskan dengan Sasaran Kinerja Pegawai;

2. Penerapan *reward dan punishment* telah berdasarkan capaian kinerja individu pada aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Perbaikan Kebijakan terkait penerapan sistem penilaian kinerja;
4. Update dan penyempurnaan aplikasi e-kinerja sesuai perubahan kebijakan.

4

Memperbaiki Indikator kinerja individu menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi khususnya pada aplikasi pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjadikan proses reward and punishment yang dilakukan akan sesuai dengan besaran kontribusi yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya

Rekomendasi perbaikan;

TINDAK LANJUT REKOMENDASI



step 01

Penyusunan indikator kinerja individu sudah mengacu kepada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodedan penetapan indikator kinerja individu juga sudah mengacu kepada Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dimana Perjanjian Kinerja pegawai sudah diselaraskan dengan Sasaran Kinerja Pegawai

step 02

- a. Penerapan reward dan punishment telah berdasarkan capaian kinerja individu pada aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh
- b. Perbaikan kebijakan Terkait penerapan sitem penilaian Kinerja
- c. Update dan Penyempurnaan Aplikasi e Kinerja sesuai perubahan kebijakan

- e. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal dalam menggunakan instrumen evaluasi secara berkualitas, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja OPD. Selain hal tersebut, tindak lanjut OPD atas hasil evaluasi yang diberikan harus dipastikan.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :

1. Melakukan peningkatan kapasitas evaluator dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan evaluasi internal. Hal ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS) dilindungi Pemerintah Kota Payakumbuh dengan bekerjasama dengan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

2. Memberikan rekomendasi berupa penghapusan sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja.
3. Memastikan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat.



Gambar 3.28
Pelatihan Peningkatan Kapasitas APIP

- f. Melakukan Mempercepat upaya reformasi birokrasi dengan menjadikan perbaikan AKIP sebagai dasar dalam mengungkit utama pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap level organisasi.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :

1. Melaksanakan evaluasi SAKIP perangkat daerah setiap triwulan;
2. Menyampaikan rekomendasi evaluasi AKIP perangkat daerah untuk ditindaklanjuti serta pendampingan terhadap seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan AKIP;
3. Melaksanakan Bimtek penguatan SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah mulai dari pengelola SAKIP, SDM evaluator SAKIP hingga kepala perangkat daerah. Disamping itu juga dilaksanakan *desk* SAKIP sebagai media konsultasi dan koordinasi bagi perangkat daerah dalam implementasi SAKIP.



Gambar 3.29
Bimtek Penguatan SAKIP Kota Payakumbuh

Rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya antara lain :

1. Akan mereviu atas keselarasan sasaran strategis, program dan kegiatan serta memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja;
2. Melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Melakukan dialog kinerja terhadap target kinerja yang akan diperjanjikan untuk meningkatkan rasa kepemilikan kinerja dan strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut serta *reward and punishment* sesuai komitmen yang dibuat;
4. Melakukan penghapusan program dan kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil analisis kerangka logis penjabaran kinerja dalam rangka *refocusing* program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja individu yang lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi terutama pada aplikasi pengukuran kinerja
6. Peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal;

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Komitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing;
2. Mengupayakan internalisasi nilai-nilai SAKIP dan menjadikannya budaya kerja bagi setiap personil pada setiap unit kerja
3. Terdapat *reward and punishment* terhadap pencapaian kinerja masing-masing individu yang terintegrasi dalam aplikasi e-kinerja pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Kota antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
6. Program Kepegawaian Daerah;
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
9. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

2. Indeks SPBE

Selanjutnya indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas layanan pemerintah yaitu Indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Untuk

memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Secara umum Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada instansi pemerintah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen berupa 47 indikator pada 4 (empat) domain dan 8 Aspek SPBE. Dengan struktur penilaian terdiri dari : 1). Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; 3). Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai;

Dengan bobot nilai untuk setiap domain sebagai berikut :

1. Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 13%;

2. Domain Tata Kelola SPBE sebesar 25%;
3. Domain Manajemen sebesar 16,5%; dan
4. Domain Layanan SPBE sebesar 45,5%.

Dalam penilaian indeks SPBE dilakukan pada setiap indikator kegiatan/ aktifitas yang disertai data dukung sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut. Nilai indeks SPBE diberikan untuk masing-masing indikator dalam domain dan aspek penilaian. Kategori dari nilai indeks SPBE dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.74
Kategori Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 ≤ 4,2	Sangat Baik
3	2,6 ≤ 3,5	Baik
4	1,8 ≤ 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No 59 Tahun 2020

Hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 mencerminkan kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan nilai Indeks SPBE Kota Payakumbuh berada di posisi 2,50 dengan realisasi 3,02 dengan capaian kinerja 120,8% atau kategori **Sangat Baik**. Indeks SPBE 3,02 berada pada predikat **Baik** dari skala 5,00 atau memuaskan. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,42 atau naik 0,6 poin dari tahun 2021. Nilai Indeks SPBE Kota Payakumbuh juga lebih baik dari rata-rata nasional dimana Indeks SPBE Nasional 2,35, yang merupakan hasil dari evaluasi 623 instansi pemerintah.

Tabel 3.75
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota
Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2018	2,29	Cukup
2	2019	2,57	Cukup
3	2020	2,89	Baik
4	2021	2,42	Cukup
5	2022	3,02	Baik

Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan data sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana tahun 2020 indeks SPBE 2,89 dan turun menjadi 2,42 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian instrumen penilaian, dimana sebelumnya menggunakan 37 indikator menjadi 47 indikator. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun 2021. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun pada tahun ini Indeks SPBE Kota Payakumbuh meningkat cukup signifikan yaitu 3,02 atau naik 0,6 point dari tahun sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka mendukung pencapaian target indikator Indeks



SPBE. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu dengan menyusun Peta Rencana SPBE. Penyusunan Peta Rencana SPBE merupakan tindaklanjut dari rekomendasi pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun sebelumnya yaitu terkait penyusunan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk

memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (Kerangka SPBE)
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (Arah Strategis SPBE)
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (Rencana Aksi SPBE)

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Peta Rencana SPBE Kota Payakumbuh yaitu :

1. Tersedianya arah kebijakan strategis pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan visi dan misi Walikota Payakumbuh;
2. Tersedianya acuan langkah penyiapan SPBE di Kota Payakumbuh yang melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK dan SDM SPBE;
3. Tersedianya panduan pelaksanaan SPBE yang melingkupi layanan administrasi pemerintahan terpadu dan layanan publik terpadu.

Dalam dokumen Peta Rencana SPBE juga telah tertuang Visi SPBE Kota Payakumbuh yang telah selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 yaitu :

Visi SPBE Kota Payakumbuh :

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

Untuk mewujudkan Visi SPBE tersebut, telah dirumuskan Misi SPBE Kota Payakumbuh yaitu :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, Kota Payakumbuh juga telah menetapkan Tujuan SPBE Kota Payakumbuh, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Dari tujuan SPBE Kota Payakumbuh tersebut maka sasaran SPBE Kota Payakumbuh yang ingin dicapai yaitu :

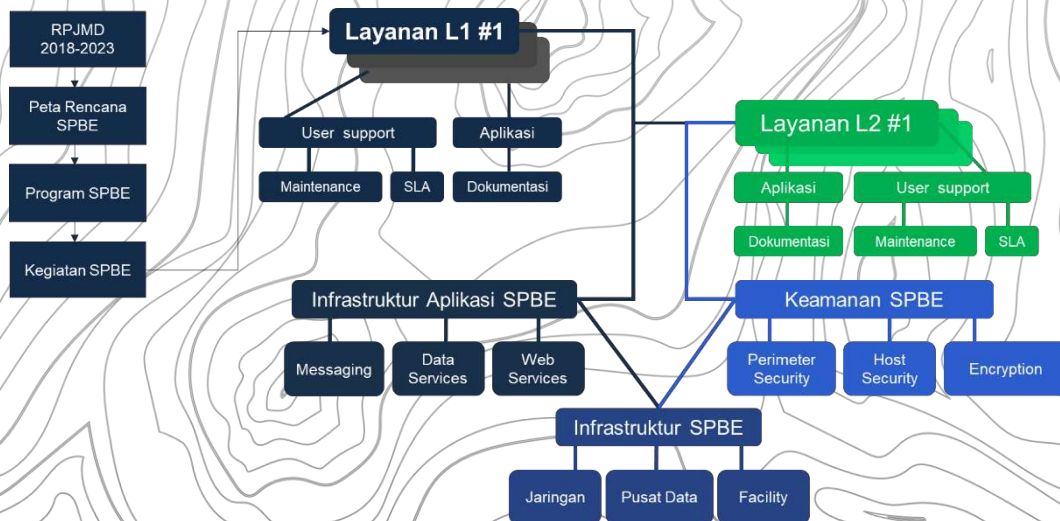
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

Berdasarkan tujuan dan sasaran SPBE tersebut, target sasaran strategis per Domain SPBE Kota Payakumbuh terdiri dari 4 kategori yaitu : 1) Tata Kelola SPBE; 2) Layanan SPBE; 3) Teknologi Informasi dan 4) Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Managemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 3. 30
Kategori Pengembangan SPBE Kota Payakumbuh

Selanjutnya untuk mendapatkan program kegiatan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan Kota Payakumbuh, telah dilakukan analisa kesenjangan melalui Meta Model Peta Rencana, Keterpaduan Unsur SPBE Keterikatan SPBE dan SDI dan komponen Peta Rencana SPBE (Aktual dan Target). Berdasarkan hal tersebut telah digambarkan meta model komponen penyusunan SPBE Kota Payakumbuh sebagai berikut :



Gambar 3.31
Meta Model Komponen Penyusun SPBE Kota Payakumbuh

Pendekatan terakhir yang digunakan dalam menganalisa program kegiatan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan Kota Payakumbuh yaitu melalui komponen Peta Rencana SPBE. Hal ini dilakukan dengan menganalisa kondisi aktual dan target yang ditetapkan, sehingga untuk komponen Peta Rencana SPBE langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76
Daftar Langkah Strategis Pelaksanaan SPBE dalam
Perspektif Komponen SPBE

N	Komponen	Yang harus dilakukan
1	Tata Kelola SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat Arsitektur SPBE ▪ Membuat Perda / Perwako SPBE
2	Manajemen SPBE	Membuat seluruh Pedoman/ diamanatkan
3	Layanan SPBE	Membuat Portal Layanan (Integrasi Proses
4	Aplikasi SPBE	Membuat aplikasi untuk Layanan Publik
5	Infrastruktur SPBE	Membuat GSB (<i>Government Service Bus</i>)
6	Keamanan SPBE	Penerapan Pedoman SMKI
7	Audit TIK	Melakukan Audit aplikasi, keamanan secara internal atau eksternal

Sumber : Peta Rencana SPBE Kota Payakumbuh, Diskominfo, 2022

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kota Payakumbuh yang terdiri dari tahapan 1). Pembangunan Fondasi SPBE Tahun 2022-2024; dan 2) Tahapan pengembangan SPBE Tahun 2025-2026. Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2024 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, manajemen SPBE ,infrastruktur SPBE, SDM SPBE dan program unggulan /prioritas sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian yang diharapkan pada tahapan ini adalah :

1. Tersedianya Arsitektur SPBE Kota Payakumbuh;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Tersedianya Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE (Perda / Perwako);
4. Tersedianya Panduan / Pedoman Manajemen SPBE;

5. Peningkatan Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE;
6. Tersedianya Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
7. Tersedianya Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD);
8. Tersedianya Big Data dan Kecerdasan Buatan Kota Payakumbuh;
9. Tersedianya Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi)

Untuk tahapan Pengembangan SPBE Tahun 2025- 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan SPBE. Pencapaian pada tahap ini adalah :

1. Proses Evaluasi dan perbaikan diseluruh komponen SPBE;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE (G2C, G2B,G2E,G2G) sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi;
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat pada indikator Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Payakumbuh. Layanan Keuangan dibuktikan dengan digunakannya aplikasi SIKPD memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan aplikasi aplikasi BLUD, Bank Nagari, E-Skul, dan e-Kinerja. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibuktikan dengan digunakannya aplikasi SPSE v.4 memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi SIKAP dan e-Katalog. Layanan Kepegawaian dibuktikan dengan digunakannya aplikasi SIMPEG memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan aplikasi e-Kinerja. Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan digunakannya aplikasi e-Kinerja memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi SIMPEG, SiKOPAY, ePresensi.

Untuk Layanan Kearsipan Dinamis dengan memanfaatkan aplikasi Srikandi telah dimulai pada awal tahun 2023.

Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat pada indikator Layanan Publik Sektor 1 dan Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Payakumbuh. Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan digunakannya aplikasi SiPADUKO memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan aplikasi DWH CAPIL/SIK dan telah dilakukan review. Layanan Publik Sektor 3 dibuktikan dengan digunakannya aplikasi Uda Kopay memanfaatkan fungsi kolaborasi dengan pusat data covid 19 Sumbar dan telah dilakukan review.

Disamping itu, dalam mendukung peningkatan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh



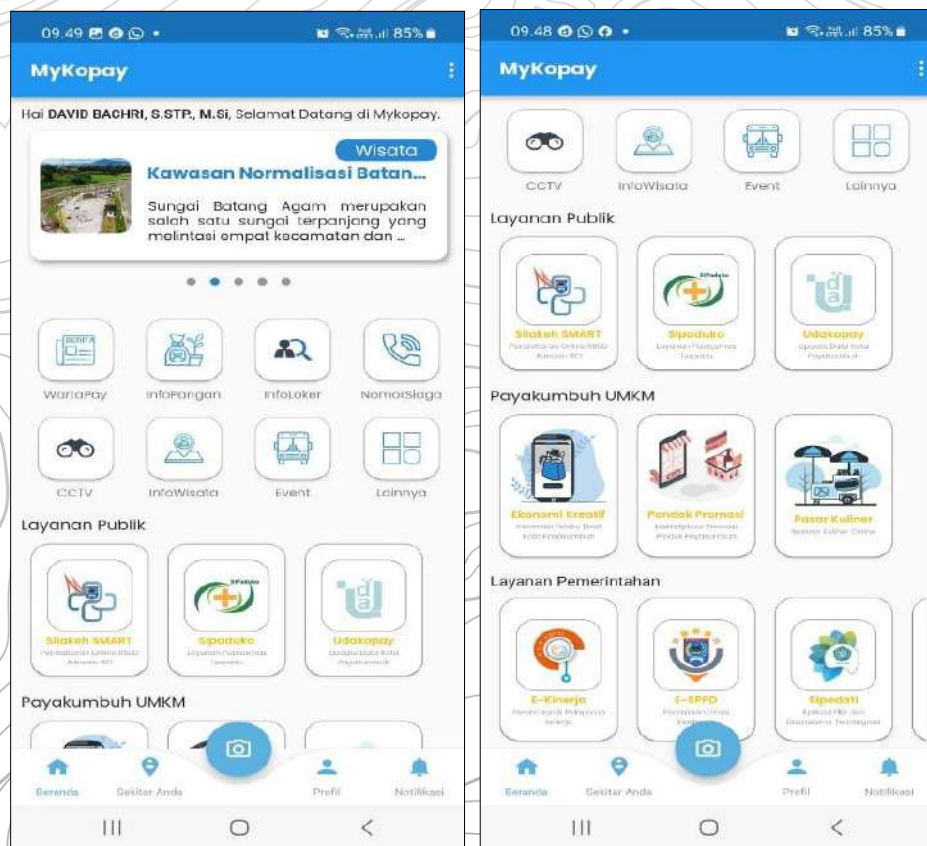
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plan Smart City Kota Payakumbuh dengan mengambil tema

“Penyusunan Master Plan *Smart City* dan *Quick Win* Program Unggulan Payakumbuh Kota Cerdas”. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu :

1. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2022;
2. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2022;
3. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 22-23 Agustus 2022
4. Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2022;

Dengan pelaksanaan Bimtek ini, Pemerintah Kota Payakumbuh dengan pendampingan oleh Kementerian Kominfo telah memiliki *Master Plan Smart City* yang memuat *Roadmap* Pembangunan *Smart City* Kota Payakumbuh. Salah satu indikator utama *Smart City* Kota Payakumbuh pada sasaran dimensi *Smart Governance* adalah Indeks SPBE, dimana ketersediaan kebijakan yang mengatur SPBE Kota Payakumbuh merupakan salah satu kekuatan dalam pelaksanaan *Smart City* Kota Payakumbuh. Disamping itu, juga telah ditetapkan *Quickwin* pada dimensi *Smart Governance* berupa Inovasi MY KOPAY. Aplikasi MY KOPAY merupakan Aplikasi terintegrasi

yang dirancang oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang mengelola berbagai sumber daya informasi yang dimiliki Kota Payakumbuh yang mengintegrasikan semua data ke dalam sebuah Aplikasi Mobile. Aplikasi masih dalam proses pengembangan, dimana melibatkan OPD dan Instansi Vertikal sebagai sumber datanya. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkini seputar UMKM, harga produk hingga nomor kontak untuk menghubungi pemesanan. Selain itu juga terdapat fitur info harga pangan, lowongan pekerjaan, nomor telp siaga, CCTV jalan raya serta event-event yang ada di Kota Payakumbuh.



Gambar 3.34
Tampilan Aplikasi MY KOPAY



Penyusunan *Master Plan Smart City* melalui Bimtek dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan *stakeholder* terkait juga telah mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat, dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu dari 50 Kota di Indonesia yang memperoleh penghargaan Gerakan Menuju Smart City Tahun 2022 dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia.

Program capaian untuk mendukung indikator sasaran Indeks SPBE tahun 2022 :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
4. Pengelolaan Arsip;
5. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek :

1. Kebijakan pelayanan yang terdiri dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat.
2. Profesionalisme SDM.
3. Sarana Prasarana yang terdiri dari ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, sarpras berkebutuhan khusus.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terdiri dari ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data.
5. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan.
6. Inovasi pelayanan.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dengan lokus evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. untuk penilaian tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut diumumkan pada tanggal 6 Desember 2022 bersamaan dengan pengumuman penghargaan inovasi pelayanan publik, penghargaan zona integritas, penghargaan WBK dan WBBM serta penghargaan RB dan Sakip oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Pelayanan Prima”. DPMPSTP Kota Payakumbuh memperoleh nilai 4,58 (Predikat A) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 4,53 (Predikat A). Dengan rata-rata nilai Kota Payakumbuh 4,56 (Predikat A). Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh secara



umum telah memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

terus melakukan terobosan yang menunjang pelayanan publik. Realisasi kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 4,56 dengan capaian 103,87% atau sangat baik karena melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,51. Capaian ini naik 0,17 poin dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai rata-rata 4,39. Data capaian Indek Pelayanan Publik Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.77
Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Nilai IPP	Predikat	Kategori
1	2018	3,72	B	Baik
2	2019	3,82	B	Baik
3	2020	4,24	A-	Sangat Baik
4	2021	4,39	A-	Sangat Baik
5	2022	4,56	A	Pelayanan Prima

Sumber : Kementerian PANRB

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat secara umum menempati posisi kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman, namun untuk nilai IPP pelayanan publik oleh DPMPSTSP Kota Payakumbuh memperoleh nilai tertinggi di Sumatera Barat dengan nilai 4,58. Rincian nilai untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.78
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2022

No	Kabupaten/ Kota	DPMPSTSP		DisDukCapil		Rata-Rata	
		Nilai IPP	Predikat	Nilai IPP	Predikat	Nilai IPP	Predikat
1	Kab. Padang Pariaman	4,56	A	4,74	A	4,65	A
2	Kota Payakumbuh	4,58	A	4,53	A	4,56	A
3	Kota Solok	4,44	A-	4,49	A-	4,47	A-
4	Kota Pariaman	4,51	A	4,29	A-	4,40	A-
5	Kota Padang Panjang	4,38	A-	4,31	A-	4,35	A-
6	Kab. Tanah datar	4,22	A-	4,46	A-	4,34	A-
7	Kota Bukittinggi	4,57	A	4,03	A-	4,30	A-
8	Kota Sawahlunto	4,52	A	3,89	B	4,21	A-
9	Kota Padang	4,41	A-	3,92	B	4,17	A-
10	Kab. Pasaman	3,96	B	4,29	A-	4,13	A-
11	Kab. Solok	3,83	B	4,41	A-	4,12	A-

12	Kab. Agam	3,99	B	3,99	B	3,99	B
13	Kab. Dharmasraya	3,91	B	3,95	B	3,93	B
14	Kab. Sijunjung	3,47	B-	4,37	A-	3,92	B
15	Kab. Solok selatan	3,88	B	3,48	B-	3,68	B
16	Kab. Pasaman Barat	3,43	B-	3,91	B	3,67	B
17	Kab. Kepulauan Mentawai	3,43	B-	3,49	B-	3,46	B-
18	Kab. Pesisir selatan	3,43	B-	3,42	B-	3,43	B-
19	Kab. Lima Puluh Kota	3,54	B	3,24	B-	3,39	B-

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2022

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara *online*. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain,



penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan. Penghargaan kategori pelayanan prima bagi Kota Payakumbuh adalah suatu bentuk apresiasi tertinggi dari Pemerintah Pusat untuk daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan juga berkaitan langsung dengan pelayanan yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghadirkan pelayanan prima sesuai kebijakan pusat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan dan penyederhanaan prosedur

pelayanan publik. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur guna percepatan pelayanan publik dilaksanakan melalui digitalisasi operasional Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh memiliki 9 ruang pelayanan, 17 konter pelayanan, dan 10 tempat khusus pendukung Pelayanan, yang ditempati oleh 26 tenant dengan 162 jenis layanan.

Pengembangan MPP Kota Payakumbuh selalu dilakukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022 terdapat beberapa penambahan jenis layanan yang di MPP Kota Payakumbuh yaitu penyediaan konter e-katalog lokal, konter klinik LKPM, Pojok Baca Digital (POCADI) dan ruang untuk UPP Satgas Saber Pungli.



Penyediaan konter e-katalog lokal untuk mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog lokal. Selanjutnya klinik LKPM difungsikan bagi pelaku usaha baik UKM maupun UMKM untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online. Pojok Baca Digital (POCADI) dan ruang untuk UPP Satgas Saber Pungli

merupakan layanan pendukung, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan bagi pengguna layanan di MPP Kota Payakumbuh.



Gambar 3.35

Layanan POCADI, Posko UPP Satgas Saber Pungli dan Konter LKPM di MPP Kota Payakumbuh

Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menciptakan

berbagai inovasi dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat seperti di bidang kesehatan, terdapat inovasi digitalisasi layanan berupa inovasi Sipaduko (Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh dan Silakeh SMART pada RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh. Kedua inovasi merupakan aplikasi mobile yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Payakumbuh untuk mendapatkan layanan kesehatan dan informasi di Puskesmas dan dRSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, Dengan SiLakeh SMART dan Sipaduko masyarakat dapat mengambil nomor antrian layanan kesehatan yang anda inginkan tanpa harus datang ke puskesmas dan rumah sakit serta dapat melihat jadwal Poliklinik, dan informasi ketersediaan kamar rawat inap.



Gambar 3.36
Tampilan Aplikasi Silakeh SMART & SiPaduko

Dimasa pandemi Covid-19 ini, inovasi SIPADUKO sangat membantu dalam mengurangi penumpukan pasien di suatu puskesmas. Dimana melalui aplikasi SiPaduko masyarakat bisa mendaftar dimana saja dan kapan saja, tidak perlu antri dengan waktu yang lama, mewujudkan penerepan protokol kesehatan selama pandemi. Bagi Puskesmas Pengisian Rekam Medis lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari keterlambatan pengembalian Rekam Medis, seluruh layanan internal puskesmas terintegrasi dalam satu sistem serta data pelayanan sudah terintegrasi dengan *data warehouse* Dirjen Capil Kemendagri dan Inovasi ini berhasil masuk nominasi TOP 99 inovasi pelayanan publik tingkat nasional pada tahun 2021.

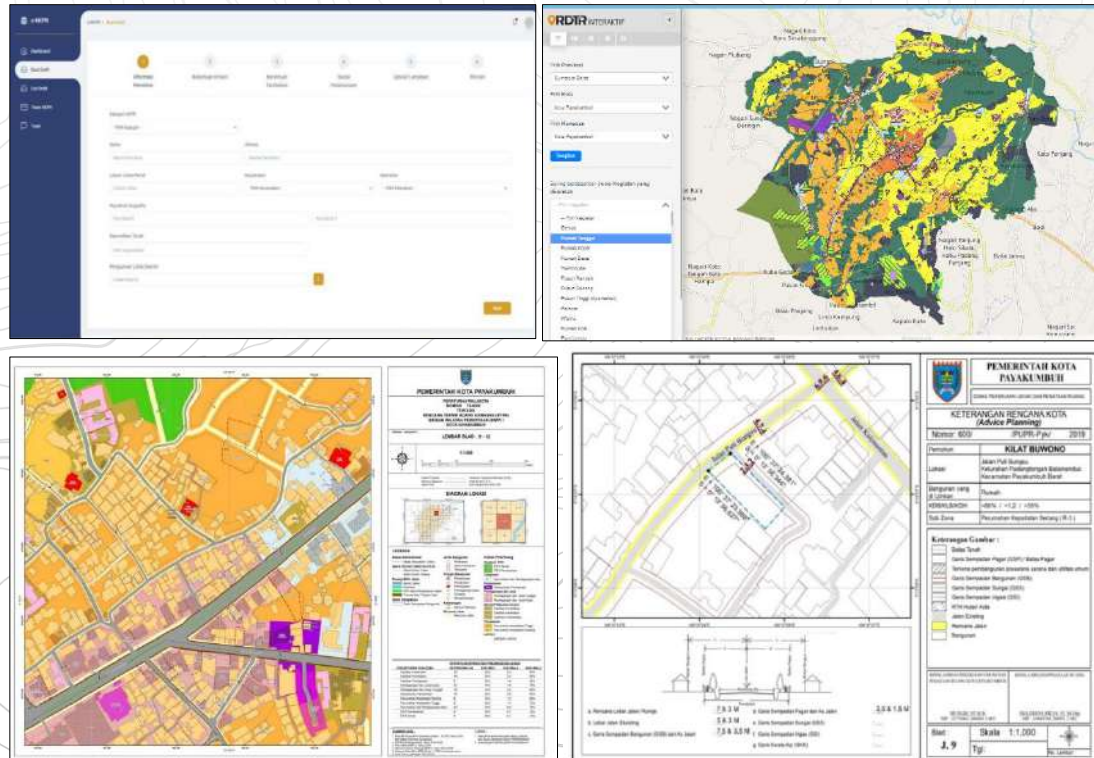
Peningkatan pelayanan publik juga dilaksanakan dengan memfasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Perizinan berusaha dimaksud



meliputi: kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan kegiatan usaha

dengan tingkat risiko tinggi. Penyelenggaraan perizinan melalui OSS-RBA ini mengakomodir perizinan berusaha dalam berbagai macam sektor usaha, yaitu: kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan. pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; pertanahan dan keamanan; dan ketenagakerjaan;

Disamping itu, Inovasi lain yang juga mendukung kemudahan pelayanan publik antara lain fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha diluar aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (non OSS RBA) melalui aplikasi SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Untuk Publik) pada DPMPPTSP yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Selanjutnya pelayanan publik pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, dilakukan pemanfaatan peta digital untuk pertimbangan teknis dalam pelayanan PBG dan pelayanan informasi rencana kota berupa SIM BG (Sistem Informasi Bangunan), GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang), Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARANG) dan Aplikasi Keterangan Rencana Kota Online (KRK ONLINE).



Gambar 3.37
Tampilan Aplikasi Sitarang, Gistaru, SIMBG, KRK Online

Disamping itu, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh juga memperoleh penghargaan dari Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana pada tahun 2022 penilaian diperluas tidak hanya pada pemenuhan Standar Pelayanan Publik namun juga pada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Penilaian Tahun 2022 lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik mulai dari input, proses hingga output dan dampak pelayanan publik. Berdasarkan penilaian tersebut, Kota Payakumbuh memperoleh nilai kepatuhan 89,45 pada zona hijau, kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Hasil penilaian ini menempatkan Kota Payakumbuh pada urutan ke 14 dari 98 Kota di

Indonesia dan merupakan pemerintah daerah yang memperoleh nilai tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Penilaian Tingkat Pemerintah Kota

Penilaian dilakukan pada 640 unit layanan dan 191 produk layanan dengan hasil sebagai berikut:

No	Kota	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
1.	Magelang	95,10	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Depok	94,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Surakarta	94,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pekalongan	94,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Denpasar	93,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Palembang	91,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Yogyakarta	90,75	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Tegal	90,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Banda Aceh	90,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Sorong	90,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Salatiga	90,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Kota Lhokseumawe	89,95	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Jambi	89,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Payakumbuh	89,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Padang Panjang	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Tangerang Selatan	88,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Tebing Tinggi	88,60	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Samarinda	88,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Tangerang	88,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Tanjung Pinang	88,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pangkal Pinang	87,80	Hijau	B	Kualitas Tinggi
22.	Balikpapan	87,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
23.	Bogor	87,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
24.	Pontianak	87,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
25.	Lubuklinggau	86,92	Hijau	B	Kualitas Tinggi
26.	Jakarta Timur	86,31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
27.	Sungai Penuh	86,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
28.	Tarakan	85,46	Hijau	B	Kualitas Tinggi

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022

Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2022 untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota
di Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
1	Kota Payakumbuh	89,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Kota Padang Panjang	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Kab. Solok	88,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Kab. Dharmasraya	88,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kab. Tanah datar	88,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kota Pariaman	85,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
7	Kab. Agam	84,16	Hijau	B	Kualitas Tinggi
8	Kab. Pasaman	83,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9	Kota Padang	82,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kab. Sijunjung	81,33	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11	Kab. Lima Puluh Kota	80,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
12	Kab. Pesisir selatan	80,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
13	Kab. Kepulauan Mentawai	80,40	Hijau	B	Kualitas Tinggi
14	Kota Solok	79,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
15	Kota Sawahlunto	78,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
16	Kab. Solok selatan	78,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi
17	Kab. Padang Pariaman	78,20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
18	Kota Bukittinggi	77,33	Kuning	C	Kualitas Sedang
19	Kab. Pasaman Barat	65,59	Kuning	C	Kualitas Sedang
	Prov. Sumatera Barat	82,60	Hijau	B	Kualitas Tinggi

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022

Dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Payakumbuh, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas (LPPM UNAND) Padang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjangkau persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh dua puluh dua (22) Unit Kinerja Pelayanan Publik (UKPP) yang ada di Kota Payakumbuh dan guna mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Tabel 3.80
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 22 UKPP yang ada di Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Nama UKPP	Konversi Nilai SKM	Mutu Pelayanan
1	DPMPTSP	98,02	A
2	Puskesmas Ibh	96,14	A
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,76	A
4	Dinas Perhubungan	95,76	A
5	Dinas Sosial	95,01	A
6	Kecamatan Payakumbuh Timur	93,96	A
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,80	A
8	Puskesmas Tiakar	93,80	A
9	Dinas Lingkungan Hidup	93,45	A
10	Puskesmas Air Tabit	93,15	A
11	Puskesmas Padang Karambia	92,10	A
12	Puskesmas Tarok	91,15	A
13	Kecamatan Payakumbuh Barat	91,00	A
14	Puskesmas Parit Rintang	90,90	A
15	Puskesmas Payolansek	90,53	A
16	Puskesmas Lampasi	90,03	A
17	Kecamatan Payakumbuh Utara	89,79	A
18	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	89,75	A
19	RSUD dr. Adnaan WD	89,48	A

20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88,13	B
21	Kecamatan Payakumbuh Selatan	86,92	B
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,60	B
Rata-rata Nilai IKM Kota Payakumbuh		91,99	A

Sumber : LPPM Universitas Andalas, Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LPPM UNAND, Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2022 berada pada indeks 91,99 dengan mutu pelayanan Sangat Baik (A), nilai ini naik dari nilai survei yang dilakukan tahun sebelumnya yaitu 90,90 atau naik 1,9 point. Disamping survei yang dilakukan oleh pihak ketiga, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melaksanakan survei mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.81
Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Nilai IKM	Mutu Layanan
1	2018	80,92	Baik
2	2019	81,66	Baik
3	2020	86,48	Baik
4	2021	87,30	Baik
5	2022	87,66	Baik

Sumber : Bagian Organisasi, Setdako Payakumbuh (data diolah)

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan pelayanan prima;
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik yang representatif sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh;

3. Kesadaran unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik.;
4. Kerjasama semua stakeholder terkait baik dari segi kebijakan maupun dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik;

Program yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik;
3. Program Pendaftaran Penduduk;
4. Program Pencatatan Sipil;
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Indikator yang digunakan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu opini LKPD dari BPK. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Target Kota Payakumbuh untuk indikator ini adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 April 2022, Nomor : 62/S-HP/XVIII.PDG/04/2022, Kota Payakumbuh memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini menunjukkan capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.82
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Thn 2022 thd RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Opini LKPD dari BPK	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Baik	WTP	100

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan

kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.38
Penyerahan Piagam Opini WTP Tahun 2022
kepada Pj. Walikota Payakumbuh oleh Gubernur Sumatera Barat

Penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan Opini WTP telah diraih Pemerintah Kota Payakumbuh selama 8 (delapan) tahun berturut-turut. Penghargaan ini adalah sebagai wujud apresiasi atas capaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh. Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID). Selain itu penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan *e-budgeting* dan *e-procurement* serta persyaratan lainnya dalam penerimaan DID di daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh juga sudah menerapkan sistem yang berbasis dan terintegritasi teknologi IT. Sistem ini diterapkan, agar pengelolaan keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik tentunya hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Opini WTP ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 komponen penilaian yaitu :

- a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

c. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan

Berdasarkan hasil rekomendasi dari BPK RI terhadap Pemerintah Kota Payakumbuh, pencapaian target ini tidak terlepas dari :

1. Tidak ditemukannya kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan atau dengan kata lain laporan keuangan yang disusun memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
2. Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (Accrual Basis).
3. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh terkait Inovasi Tata Kelola Keuangan dan Atas Penyelesaian Pengajuan Penyaluran DAK Fisik Tercepat Tahun 2022. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi terhadap Penyaluran DAK Tahun 2022 tercepat di Provinsi Sumatera Barat dan Percepatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi QRIS Dinamis.

Disamping itu, Kota Payakumbuh juga meraih penghargaan Peringkat 1 Kategori Kota dengan Kemampuan Keuangan Rendah untuk Pengukuran



Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2022. Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota, dan hasil dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun Anggaran 2021 telah dikeluarkan pada 18 November 2022 dan dilaksanakan penyerahan penghargaan itu oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 16 Desember 2022. IPKD merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam rangka menilai sejauh mana pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan, agar segala aspek yang berkaitan di dalamnya dapat bersinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Indikator dalam penilaian ini adalah terpenuhinya 6 dimensi penilaian, seperti Kesesuaian RKPD, KUA PPAS dan APBD, Pemenuhan SPM, Publikasi, Penyerapan anggaran, Kemandirian Fiskal, dan Opini WTP.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Membangun komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
2. Penetapan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah serta didukung oleh komitmen dari seluruh *stakeholder* untuk melaksanakannya;
3. Penerapan pemberian *reward and punishment* bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan aset di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Melakukan evaluasi berjenjang terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh OPD agar terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mempedomani seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program capaian untuk sasaran optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2022 :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, pembangunan akhlak mulia dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Akhlak mulia yang berasal dari pengamalan ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Pengamalan ajaran agama seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya serta bersikap empati kepada sesama yang salah satunya dapat diwujudkan melalui kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat baik melalui lembaga zakat maupun secara swadaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah “Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis”. Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pengelolaan ZIS

Sasaran 9 : Meningkatnya pengelolaan ZIS

Sasaran ini merupakan upaya untuk mencapai misi kelima Walikota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang bertujuan meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis. Sasaran ini didukung oleh indikator Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/Wakaf.

Capaian Kinerja sasaran pada tahun 2022 diperoleh dari hasil perubahan target yang lebih rasional yang berdampak sangat besar terhadap penyaluran zakat/wakaf oleh masyarakat, sehingga capaian kinerja dapat memperoleh hasil yang baik.

Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/Wakaf

Pengelolaan zakat dan wakaf di Kota Payakumbuh dilakukan melalui lembaga Zakat/Wakaf seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh untuk pengelolaan zakat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Payakumbuh untuk pengelolaan wakaf.

Analisis dan Capaian Kinerja Indikator :

a. Perhitungan Capaian Indikator

Capaian Indikator Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga/Badan Zakat/wakaf dihitung dengan menggunakan rumusan dibawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{ Zakat yg dikumpulkan Lembaga } \frac{\text{zakat}}{\text{wakaf}} \text{ th n} - \Sigma \text{ Zakat yg dikumpulkan Lembaga } \frac{\text{Zakat}}{\text{Wakaf}} \text{ th n} - 1}{\Sigma \text{ Zakat yg dikumpulkan Lembaga } \frac{\text{Zakat}}{\text{Wakaf}} \text{ th n} - 1} \times 100\%$$

b. Cara Perolehan Capaian Indikator

Perolehan capaian indikator peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/wakaf didapat dari laporan yang disampaikan oleh Lembaga/Badan Zakat/Wakaf Kota Payakumbuh. Data tersebut memuat data tahun 2021 dan 2022, seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.83
Capaian Kinerja Indikator Persentase peningkatan zakat/wakaf, yang dikumpulkan melalui Lembaga/Badan Zakat/Wakaf Tahun 2022 s/d 2023

No	Zakat/Wakaf	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Peningkatan /Penurunan	%
1	Jumlah Zakat yang diterima	1.538.598.107	4.893.923.660	Peningkatan	218,08
2	Jumlah Wakaf yang diterima	321.146.113	261.171.519	Penurunan	(18,68)
	Jumlah	1.859.744.220	5.155.095.179	Peningkatan	177,19

Sumber : Baznas, Lazismu dan BWI Kota Payakumbuh Tahun 2023

c. Analisis Capaian Indikator

Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga/Badan Zakat/Wakaf ini adalah sebagai berikut :

$$= \frac{5.155.095.179 - 1.859.744.220}{1.859.744.220} \times 100\%$$

$$= (177,19)\%$$

Tabel 3.84
Target pada sasaran Meningkatnya
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

No	Indikator	Capaian tahun 2021	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian tahun 2022 terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/wakaf	0	100,00	177,19	177,19	Sangat Baik	100,00	177,19

d. Evaluasi Capaian Indikator

Lembaga/Wakaf seperti BAZNAS, dan BWI Kota Payakumbuh adalah lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Peran tersebut tidak hanya dalam hal yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah zakat dan wakaf yang dikelola, tapi lebih dari itu, keduanya merupakan media bagi umat untuk mengamalkan ajaran agama khususnya ibadah zakat dan wakaf.

Dari data dan analisa capaian kinerja indikator yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga/Badan Zakat/wakaf tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 3.355.325.553,- atau 218,08 % hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk pemungutan zakat pada seluruh ASN di Kota Payakumbuh melalui surat Nomor : 450/26/Kesra/2022 tanggal 3 Februari 2022, 450/61/Kesra/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan 400/261/Wk-Pyk/2022 tanggal 22

November 2022 Perihal Pengumpulan Zakat ASN Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Ketua Baznas Nomor 14 tahun 2021 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.

Faktor Peningkatan Pencapaian Indikator

Adanya Pengumpulan zakat dari seluruh ASN Kota Payakumbuh yang diambil dari Zakat gaji dan tambahan penghasilan PNS lainnya.

Rencana Aksi

Untuk mengoptimalkan pembayaran zakat oleh para muzakki dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan zakat maka dilakukan beberapa strategi, diantaranya:

1. Penguatan peran dan fungsi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Payakumbuh dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, melalui Media informasi elektronik/website, BAZNAS Kota Payakumbuh menjadikan bagian dari strategi memberikan pembelajaran bagi umat tentang pentingnya membayar zakat. Disamping itu juga menjadi sarana untuk menginformasikan kegiatan Baznas serta menjadi bentuk transparansi pengelolaan zakat di Kota Payakumbuh.



Gambar 3.39 Tampilan Website Baznas Kota Payakumbuh.

2. Penerimaan zakat secara non tunai melalui rekening BAZNAS guna mempermudah masyarakat untuk menyalurkan zakatnya.



Gambar 3.40 Informasi Penerimaan Zakat secara non tunai

3. Pemberian informasi dan sosialisasi pentingnya ibadah zakat dan wakaf.
4. Mengoptimalkan penerimaan zakat dari Aparatur Sipil Negara baik vertical maupun horizontal yang ada di Kota Payakumbuh, utamanya zakat dari ASN Pemerintah Kota Payakumbuh.



Gambar 3.41 Penerimaan Zakat Profesi Dari Muzakki Yang Diterima Oleh Staff BAZNAS Kota Payakumbuh

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.85
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya pembangunan manusia yang berkualitas	107.770.186.230	99.423.385.627	92.26
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2.724.013.440	1.720.879.104	63.17
3	Menurunnya tingkat pengangguran	350.451.082	328.086.743	93.62
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	13.803.385.692	11.826.180.378	85.68
5	Meningkatnys investasi	6.171.368.606	6.068.359.052	98.33
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	118.677.770.440	111.278.175.728	93.76
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	497.900.436.077	460.876.589.444	92.56
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.958.395.745	4.394.308.099	88.62
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	0	0	0,0
JUMLAH		752.356.007.312	695.915.964.175	92.50

Sumber Data : BKD Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 3.85 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar Rp. 752.356.007.312,- untuk menunjang 9 (sembilan) sasaran strategis daerah.
2. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebesar Rp. 752.356.007.312,- dan terealisasi sebesar Rp. 695.915.964.175,- atau sebesar 92,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang

pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 56.440.043.137,- atau 7.50%. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap pencapaian Misi Pemerintah Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan RB tahun 2022



Provinsi Sumatera Barat	SAKIP	RB
Kota Padang	BB	BB
Kota Padang Panjang	B	CC
Kota Pariaman	B	B
Kota Payakumbuh	BB	B
Kota Sawahlunto	B	CC
Kota Solok	B	B

Kegiatan Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi serta penghargaan SAKIP Award tahun 2022 di pelaksanaannya digabungkan secara bersamaan oleh Kementerian PAN RB RI melalui Zoom Meeting dan Live melalui canel Yuotebe Kementerian PANRB dari Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 06 Desember 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas pada acara pengumuman dan penyerahan hasil evaluasi SAKIP dan RB di Bidakara Hotel & Convention Center, Jakarta, Nilai Evaluasi **SAKIP** Kota Payakumbuh Tahun 2022 meraih **Predikat BB**, dan **Prediket B** untuk penilaian hasil penyelenggaraan **Reformasi Birokrasi**.

2. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Syafwal dan Kepala Inspektorat Andri Narwan menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan (LKPD) Tahun 2021 yang diserahkan pada Tahun 2022 oleh Gubernur Sumbar Didampingi Kepala BPK Perwakilan Prov.Sumbar di Padang, penghargaan WTP tersebut diterima Pemko Payakumbuh yang ke 8 kali secara berturut-turut.

3. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya pada Tahun 2022 dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama



Kota yang dipimpin oleh Riza Falepi itu berhasil menyabet penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yakni **Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya pada tahun 2022**, ini merupakan penghargaan KLA keenam bagi Kota Randang setelah mendapat penghargaan dengan Kategori Pratama sebanyak 3 kali di tahun 2013, 2017, dan 2018, serta kategori Madya dari tahun 2019 lalu.

4. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022



Walikota Payakumbuh menerima predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik yang diumumkan pada (22/12) lalu, oleh Ketua Ombudsman RI melalui zoom meeting. Ketua Ombudsman RI berpesan agar kedepannya pelayanan publik di Kota Payakumbuh bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai serta terus meningkatkan dan menghadirkan inovasi pelayanan publik

terbaik untuk masyarakatnya. “Mencapai sesuatu yang baik itu cukup mudah tapi untuk mempertahankannya itu bukan pekerjaan yang mudah, jadi teruslah pertahankan dan berikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat,”. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani, Asisten I, II dan III, Staf Ahli Wali Kota serta seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemko Payakumbuh.

5. Penghargaan Kota Peduli HAM.

Penghargaan Kota Peduli HAM yang ke-lima secara berturut-turut, dari Kementerian Hukum dan HAM (12/12/2022)



6. Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai A untuk PTSP Kota Payakumbuh (dari Kemenpan-RB)



7. Piala Nirwasita Tantra, Penghargaan pengelolaan Lingkungan Hidup terbaik Nasional Green Leadership



Piala Nirwasita Tantra, Penghargaan pengelolaan Lingkungan Hidup terbaik Nasional Green Leadership (Ketua DPRD), kategori Kota Kecil. (dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-dua kali) (20 Juli 2022)

8. Piala Nirwasita Tantra, Penghargaan pengelolaan Lingkungan Hidup terbaik ke-dua Nasional Green Leadership (Kepala daerah) kategori Kota Kecil



Wali Kota Riza Falepi meraih Piala Nirwasita Tantra, Penghargaan pengelolaan Lingkungan Hidup terbaik ke-dua Nasional Green Leadership (Kepala daerah) kategori Kota Kecil. (dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-empat kali) (20 Juli 2022)

9. Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima



Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai A untuk Disdukcapil Kota Payakumbuh, tahun sebelumnya masih nilai A (-) (dari Kemenpan-RB)

10. Penghargaan Nasional Anugerah Pendidikan Indonesia (API)



Penghargaan Nasional Anugerah Pendidikan Indonesia (API) dari Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia

11. Penghargaan Komunitas Peduli Sungai terbaik



Penghargaan Komunitas Peduli Sungai terbaik, dari Kementerian PUPR

12. Penghargaan terbaik ke-3 Nasional Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK)

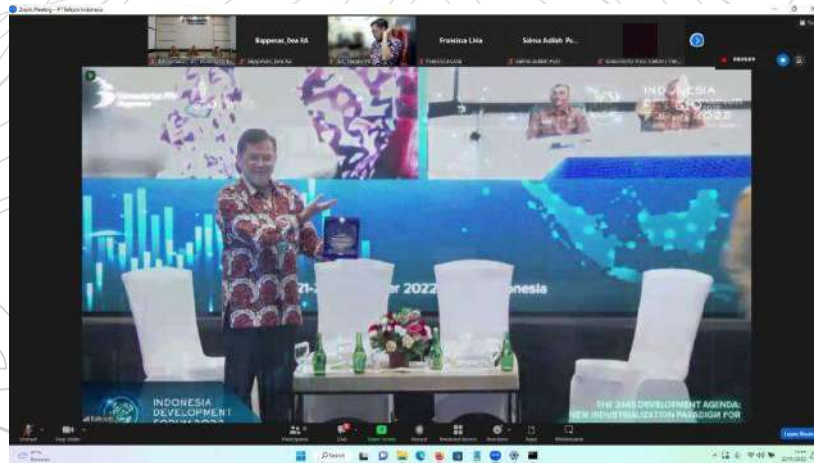
Penghargaan terbaik ke-3 Nasional Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) dari Kementerian Dalam Negeri

13. Piala Bhumandala Rajata, peringkat ke-dua Nasional dalam pengelolaan simpul jaringan data geospasial daerah



Piala Bhumandala Rajata, peringkat ke-dua Nasional dalam pengelolaan simpul jaringan data geospasial daerah dari Badan Informasi Geospasial-RI

14. Penghargaan implementasi satu data Indonesia melalui Pemanfaatan BigBox



Penghargaan implementasi satu data Indonesia melalui Pemanfaatan BigBox oleh Pemko Payakumbuh diberikan oleh PT, Telkom Indonesia dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2022

15. Penghargaan Smart City



Penghargaan Smart City (hanya 50 Kabupaten/Kota di Indonesia) dari Kementerian Kominfo

16. Penghargaan BKN Award 2022

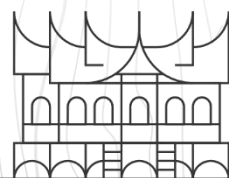


Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Dan Cat (22 Juli 2022)

17. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Sumbar tahun 2022



BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2017-2022 dan telah memenuhi 9 (sembilan) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran.

Kategori penilaian keberhasilan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan kategori sangat baik (>90.00) sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja atau sebesar 100%.

Anggaran program yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 752.356.007.312,- dan terealisasi sebesar Rp. 695.915.964.175,- atau

92,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 56.440.043.137,- atau 7,50%. yang mencerminkan cukup baiknya perencanaan dan penganggaran terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

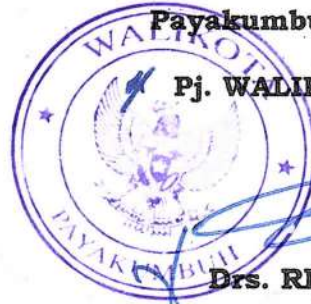
Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022. Di masa mendatang, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus (continuous improvement) seperti peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Payakumbuh yang selaras dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Payakumbuh, Februari 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH



Drs. RIDA ANANDA, M.Si



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 69 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, perlu merubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi angka 1 surat Menpan RB Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB RI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR : 69

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81
 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2017-2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2017-2022

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas	1 IPM	Indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS/Bappeda	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	2 Tingkat Kemiskinan	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen $P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$	BPS/Bappeda	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	3 Tingkat Pengangguran	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	TPT = (Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100%	BPS/Naker	Penganggur terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	$LPE = ((PDRB(t) - PDRB(t-1)) / PDRB(t-1)) \times 100\%$	BPS/Bappeda	Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan
5	Meningkatnya investasi	5 Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun n	DPM-PTSP	

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6 Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	$30\% \text{ IKA} + 30\% \text{ IKU} + 40\% \text{ ITL}$	DLH/ DPKP, Dinas Perhubungan	Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	7 Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPAN RB/ Bagian Organisasi Sekdako	Evaluasi penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.
		8 Indeks SPBE	Nilai/ indeks	Sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju e-government	Nilai Evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPANRB/ Kominfo	SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
		9 Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ indeks	Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPAN RB/ Bagian Organisasi Sekdako	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemko dengan memperhatikan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan.
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	10 Opini LKPD dari BPK	Kategori/ Nilai	Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI Tahun ke -n	BPK/ BKD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berupa Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	11 Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	Persentase	Pemberdayaan ekonomi umat	Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n dikurangi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dibagi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dikali 100 persen	BAZNAS/ Bagian Kesra Setdako	


WALIKOTA PAYAKUMBUH,
RIZA FALEPI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**
Jabatan : **PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Payakumbuh, 01 November 2022


PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang berkualitas	1 IPM	79,52	Bappeda/BPS
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2 Tingkat Kemiskinan	5,64	Bappeda/BPS
3	Menurunnya tingkat pengangguran	3 Tingkat Pengangguran	6,30	Naker Perind/BPS

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,07	Bappeda/BPS
5	Meningkatnya investasi	5 Nilai Realisasi Investasi	203,8	DPM-PTSP

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6 Indeks kualitas lingkungan hidup	58,59	DLH, DPKP, Dinas Perhubungan

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya Akuntabilitas layanan pemerintahan	7 Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	Setdako/Semua Perangkat Daerah
		8 Indeks SPBE	2,50	Kominfo
		9 Indeks Pelayanan Publik	4,51	Bagian Organisasi Setdako
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	10 Opini LKPD dari BPK	WTP	BKD

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	11 Persentase peningkatan zakat/ wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/Wakaf	100,00	Bagian Kesra Setdako

Payakumbuh, 01 November 2022
PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si

ANGGARAN PROGRAM APBD PERUBAHAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM TAHUN 2022	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	466.289.764.734
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.611.189.390
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.378.609.452
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.351.068.830
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	317.146.530
6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	307.988.630
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.072.815.156
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.253.908.615
9	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	341.794.604
10	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	492.724.390
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	38.613.950
12	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	99.365.240
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.227.809.310
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.158.534.818
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.657.079.908
16	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	52.199.590
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	639.265.580
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.037.144.340
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	665.317.610
20	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	638.004.210
21	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	106.895.010
22	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	125.018.650
23	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.073.215.337
24	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.250.922.312
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.682.660.362
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	994.370.810
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	253.016.615
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	581.580.230
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	190.251.282
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51.306.090
31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.069.863.440
32	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	56.519.890
33	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.108.990.940
34	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	18.527.820
35	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.531.344.326
36	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.109.362.780
37	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	712.550.370
38	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	210.583.010
39	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	87.496.050
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.263.756.316
41	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.258.576.833
42	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	616.261.950
43	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	418.803.366
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.999.710
45	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.053.876.350

NO	PROGRAM TAHUN 2022	ANGGARAN
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.240.440.910
47	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	3.196.980.782
48	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-
49	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	61.129.770
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.839.682.240
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	754.103.338
52	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	892.602.660
53	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.405.454.403
54	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	889.344.600
55	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.693.216.550
56	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	721.047.650
57	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	107.931.860
58	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	230.216.530
59	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	627.784.710
60	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39.999.020
61	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77.351.260
62	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	265.945.250
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.046.049.870
64	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	29.180.070
65	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.659.597.250
66	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33.601.080
67	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	119.549.772
68	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	253.452.560
69	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.864.802.715
70	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	676.710.085
71	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	550.457.526
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	206.504.375
73	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.164.579.500
74	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14.999.930
75	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	758.668.330
76	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	55.616.770
77	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	284.153.550
78	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	411.865.280
79	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	230.526.040
80	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20.318.300
81	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	30.340.160
82	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	772.923.180
83	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	245.807.740
84	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	457.823.830
85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.639.234
86	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.117.739.695
87	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	36.661.180

NO	PROGRAM TAHUN 2022	ANGGARAN
88	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.391.620
89	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	205.693.400
90	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.610.250
91	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	85.287.000
92	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	370.141.830
93	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	193.537.260
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	526.910.410
95	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.038.146.210
96	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.299.310
97	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	60.731.010
98	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.745.910
99	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13.056.524.982
100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	49.999.940
101	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	22.959.310
102	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	684.210.550
103	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	62.317.120
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	16.481.450
105	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.821.240
106	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.966.078.850
107	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	413.403.690
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	285.825.005
109	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	267.060.880
110	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.521.836.768
111	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	642.847.870
112	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	107.715.510
113	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	410.150.390
114	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.096.260
115	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	87.761.850
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	33.303.701.458
117	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.659.252.500
118	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	473.174.374
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.054.398.814
	JUMLAH	752.356.007.312,00

Payakumbuh, 01 November 2022
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Dr. RIDA ANANDA, M.Si

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	696.617.590.928	704.772.719.939	101,17	677.296.933.413
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.913.694.154	126.962.317.953	116,57	90.291.310.165
4.1.01.	Pajak Daerah	19.936.853.240	22.033.326.343	110,52	20.359.631.895
4.1.02.	Retribusi Daerah	7.948.097.267	5.833.854.340	73,40	5.448.725.559
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.460.178	9.493.460.178	100,00	7.693.095.695
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	71.535.283.469	89.601.677.092	125,26	56.789.857.016
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	586.803.896.774	576.910.401.986	98,31	568.343.603.248
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	547.261.060.763	538.515.001.673	98,40	534.136.923.988
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.542.836.011	38.395.400.313	97,10	34.206.679.260
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	900.000.000	900.000.000	100,00	18.662.020.000
4.3.01.	Pendapatan Hibah	900.000.000	900.000.000	100,00	879.000.000
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	17.783.020.000
5.	BELANJA DAERAH	752.356.007.312	695.915.964.175	92,50	677.726.610.137
5.1.	BELANJA OPERASI	622.544.994.517	577.363.467.901	92,74	567.600.948.466
5.1.01.	Belanja Pegawai	356.945.256.804	328.320.458.462	91,98	320.454.438.227
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251.297.404.115	235.849.841.467	93,85	241.510.699.923
5.1.05.	Belanja Hibah	12.120.583.598	11.869.567.972	97,93	5.635.810.316
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.181.750.000	1.323.600.000	60,67	-
5.2.	BELANJA MODAL	129.577.795.665	118.552.496.274	91,49	110.125.661.671
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	23.696.333.833	22.029.941.027	92,97	19.565.837.794
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.573.993.776	19.429.430.097	86,07	20.835.763.861
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.829.019.933	19.802.166.485	83,10	26.121.702.952
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.513.924.180	55.351.575.875	96,24	42.586.365.655
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.964.523.943	1.939.382.790	98,72	1.015.991.409
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	233.217.130	-	-	-
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	233.217.130	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(55.738.416.384)	8.856.755.764	(15,89)	(429.676.724)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	55.738.416.384	68.165.838.303	122,30	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.878.416.384	74.305.838.303	120,08	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.878.416.384	74.305.838.303	120,08	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	55.738.416.384	68.165.838.303	122,30	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	77.022.594.067	-	(429.676.724)

Payakumbuh, 31 Desember 2022

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH



Drs. RIDA ANANDA, M.Si

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Jambu Telepon (0752) 94235 Payakumbuh

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2022**

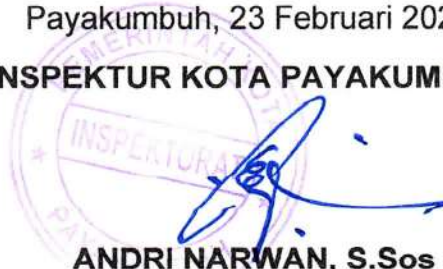
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Payakumbuh, 23 Februari 2023

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda / NIP. 19730319 199308 1 001

CHECK LIST REVIU

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Lkj telah diyakini keandalannya	√
		6 Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7 LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan RPJMD	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10 IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, 23 Februari 2023

INSPEKTUR

ANDRI NARWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda /Nip.19730319 199308 1 001

